

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN PENGELOLAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DESA WURAN DAN
TARINSING KABUPATEN BARITO TIMUR**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**JOSMAR LAMBOK BANJAR NAHOR
L4D008077**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN PENGELOLAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DESA WURAN DAN
TARINSING KABUPATEN BARITO TIMUR**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**JOSMAR LAMBOK BANJAR NAHOR
L4D008077**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 12 Februari 2010

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Februari 2010

Tim Penguji :

Dr. Ing. Asnawi Manaf – Pembimbing
Santy Paulla Dewi, ST, MT – Penguji
Ir. Titin Woro Murtini, MSA – Penguji

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam tesis saya ternyata ditemukan duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/ Institusi lain maka saya bersedia melepaskan Gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, Februari 2010

JOSMAR LAMBOK BANJAR NAHOR
L4D008077

*Mintalah, maka akan diberikan kepadamu,
Carilah, maka kamu akan mendapat,
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
(Matius 7:7)*

*“Tak ada kesulitan yang dapat dikalahkan oleh kasih yang dalam; tak ada pintu yang tak akan dibukakan oleh kasih yang dalam; tak ada dinding yang tak dapat dihancurkan oleh kasih yang dalam; tak ada dosa yang tak dapat ditebus oleh kasih yang dalam; tak peduli betapa besarnya kesulitan; betapa sirnanya harapan; betapa besarnya kesalahan”
(Toserba Surgawi, Hanisius 2003, film, 184)*

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu
Padahal ia amat baik bagimu
Dan boleh jadi pula kamu menyukai
sesuatu
Padahal ia amat buruk bagimu
Allah mengetahui sedang kamu tidak
mengetahui*

Tesis ini kupersembahkan kepada :
Istriku Tercinta Dr. Zarmiyeni, SP, MP dan Anakku Tersayang Rifanny P Banjar Nahor dan Nayla P Banjar Nahor Atas limpahan kebahagiaan, kesabaran dan pengertiannya. Teruntuk Bapak, Ibu, dan Mertua serta Saudara-Saudaraku Atas doa dan restunya.

ABSTRAK

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan fisik. Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan air tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing keluarga, akan tetapi pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat UUD Tahun 1945 yaitu dengan membangun berbagai prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum baik di perkotaan maupun di pedesaan di seluruh wilayah Indonesia.

Kecenderungan pembangunan nasional saat ini, yang menjadikan salah satu prasyarat utama dengan partisipasi masyarakat. Kemauan pemerintah dalam memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu langkah maju, akan tetapi dalam aplikasi di lapangan masih cukup banyak ditemukan permasalahan maupun hambatan. Pembangunan SPAM di desa Wuran dan Tarinsing termasuk salah satu program pemerintah, sudah seharusnya mengikuti kecenderungan pembangunan yaitu peningkatan partisipasi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan SPAM di desa Wuran dan Tarinsing sangat perlu diperhatikan agar dalam pelaksanaan program sejenis kedepan dapat tepat sasaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan SPAM di desa Wuran dan Tarinsing. Adapun yang diteliti adalah program pemerintah penggunaan dana DAK APBN infrastruktur subbidang air minum tahun anggaran 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, teknik analisis dengan distribusi frekuensi, teknik sampling probability sampling dengan simple random sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilaksanakan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Berdasarkan hasil perhitungan, besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 56 responden yang terdiri dari 20 responden desa Tarinsing dan 36 responden desa Wuran.

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan SPAM di desa Wuran dan Tarinsing adalah berbeda. Perbedaan dalam hal karakteristik masyarakat, bentuk peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, aspek teknis bangunan SPAM, penentuan lokasi bangunan SPAM, pembentukan badan pengelola SPAM, tingkat kehadiran rapat pengelolaan dan iuran operasional yang mengakibatkan pengelolaan SPAM di desa Tarinsing tetap jalan sementara di desa Wuran tidak beroperasi pasca pembangunan.

Dalam mengatasi kegagalan pengelolaan SPAM, maka sangat diperlukan pembangunan peningkatan sosial ekonomi masyarakat disamping diadakan pembangunan fisik kepada masyarakat, partisipasi masyarakat khususnya dalam tahap perencanaan program SPAM, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum diharapkan dapat melakukan kajian yang mendasar khususnya mengenai pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan yang melibatkan seluruh *stakeholders* dalam teknis perencanaan, pelaksanaan, dan operasional, adanya peningkatan *capacity building* masyarakat penerima program SPAM serta pembentukan badan pengelola SPAM pada setiap penerima program SPAM pedesaan, kemudian menyiapkan peraturan-peraturan mengenai tata kerja operasional dan sumber pembiayaan.

Kata Kunci: Faktor-faktor, pengaruh, manajemen pengelolaan, SPAM

ABSTRACT

Fresh water is a basic need for human which has directly impact to the health and physical welfare. Basically, the fulfillment of water needs is the responsibility of each family, but the government has a responsibility in order to increase public welfare according to The Constitution 1945 that is by developing various infrastructure of drinking water supply system both in cities and villages in all parts of Indonesia.

The tendency of national development nowadays which becomes a prominent requirement is public participation. The government will in understanding the importance of public participation to the development is an advancing stroke but it is found some problems and obstacles in the implementation of field. The development of SPAM in the village of Wuran and Tarinsing is a program of the government which should follow the development plan that is an increase of public participation. The influence factors of failure and successful of management system of drinking water supply in the village of Wuran and Tarinsing should be noticed in order to be able of conducting such program on target in the future.

Purpose of the research is to analyze the influence factors of failure and successful of management system of drinking water supply in the village of Wuran and Tarinsing. While the research study about the government program of APBN DAK funding utilization of infrastructure sub sector of drinking water in the budget year of 2008. The research uses quantitative method with analysis technique of frequent distribution, sampling probability is simple random sampling that is sampling of population which is randomly conducted without considering the existing strata of population. The analysis method is descriptive quantitative. According to the calculation, the obtained sample of this research is 56 respondents which consists of 20 respondents in the village of Tarinsing and 36 respondents in the village of Wuran.

According to the analysis, it is obtained the influence factors of failure and successful of management system of drinking water supply in the village of Wuran and Tarinsing is different. The differences are public characteristics, public participation in the each development, building technique aspects of SPAM, building location determination of SPAM, the establishment of management agency of SPAM, presence level of management meeting and operational contribution which gives impact the management of SPAM in the village of Tarinsing is continue to operate whereas in the village of Wuran not operates in the time after development.

In order to overcome the failure of SPAM management hence it is necessary to conduct an increase development of social-economics in the society besides to conduct physical development for people, public participation especially in the plan level of SPAM development, The Local Government of Barito Timur Regency through Public Works Official is expected able to conduct a basically study especially of management system of drinking water supply (SPAM) in villages which involves all stakeholders in operational, implementation and plan technique, the presence of increased capacity building of receivers of SPAM program and the establishment of the management agency of SPAM in each program receivers of SPAM of villages, afterwards it should prepare regulations of operational working procedures and funding resources.

Keywords: *Factors, impact, management, SPAM*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas tuntunan rahmat dan hikmat yang dianugerahkan sehingga penyusunan Tesis dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegagalan dan Keberhasilan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum di desa Wuran dan Tarinsing Kabupaten Barito Timur“** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghormatan yang mendalam kepada :

1. Orangtua saya: Bapak St. B.Banjar Nahor, Ibu H.Lumban Gaol dan Mertua Bapak Zamran, Ibu Rosyati serta spesial buat istri yang tercinta Dr. Zarmiyeni, SP, MP dan anak-anakku yang cantik Rifanny P.Banjar Nahor dan Nayla P.Banjar Nahor;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur yang telah memberikan dukungan biaya dan kesempatan Tugas Belajar untuk mengikuti Pendidikan Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro;
4. Bapak Dr. Ing. Asnawi Manaf selaku Pembimbing atas bimbingan dan waktu yang diberikan;
5. Bapak Santy Paulla Dewi, ST, MT selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan koreksi dalam penyempurnaan penyusunan tesis ini;
6. Ibu Ir. Titin Woro Murtini, MSA selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan koreksi dalam penyempurnaan penyusunan tesis ini;
7. Ibu Ir. Sunarti, MT selaku Dosen Wali yang telah banyak memberi pengarahan, dukungan;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagi ilmunya kepada penulis, sehingga meningkatkan kapasitas penulis;
9. Bapak Drs. Ebsan Dioh, MM (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur yang memberikan ijin tugas belajar penulis;
10. Bapak Karlius Hindu, SH dan Drs. Sobari, MM selaku Inspektur Kabupaten Barito Timur atas segala bantuan, baik moril maupun material kepada penulis;
11. Seluruh Bapak, Ibu Inspektur Pembantu I, II, III dan IV serta staf pegawai Inspektorat Kabupaten Barito Timur yang turut memberikan dukungan, baik moril kepada penulis;
12. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Timur yang memberikan bantuan moril dan material dalam rangka tugas belajar penulis;
13. Rekan-rekan mahasiswa Program Modular NUSSP Kelas A, B, dan C;
14. Karyawan Balai LPPU Undip yang telah banyak memberi kemudahan, khususnya mbak Lulu, mas Imam dan pak Karjoko yang selalu siap membantu;
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri bagi saran-saran perbaikan agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, Februari 2010

Josmar Lambok Banjar Nahor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Sasaran Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup penelitian	6
1.5.1 Ruang lingkup Substansial	6
1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Pendekatan Penelitian.....	10
1.8 Kebutuhan Data	11
1.9 Teknik Pengumpulan Data	13
1.10 Metode dan Teknik Analisis	14
1.10.1 Metode Analisis.....	14
1.10.2. Teknik Analisis	14
1.10.3 Kerangka Analisis	17
1.11 Teknik Sampling	19
1.12 Sistematika Penulisan	21
BAB II. PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PEDESAAN	
2.1 Karakteristik Masyarakat	23
2.1.1 Stratifikasi Sosial Masyarakat Pedesaan	23
2.1.2 Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan.....	25
2.1.3 Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Konteks Keberlanjutan	29
2.1.4 Wujud partisipasi masyarakat	33
2.1.5 Faktor Internal yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	34
2.2 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	36

2.2.1	Kebijakan dan Strategi Nasional tentang SPAM	36
2.2.2	Pengertian Sistem Penyediaan Air Minum ...	37
2.2.3	Pengelolaan SPAM	38
2.2.4	Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAM.....	38
2.2.5	DAK Infrastruktur Subbidang Air Minum ...	38
2.3	Manajemen Pengelolaan	40
2.3.1	Lesson Learn Pengelolaan SPAM Pedesaan..	40
2.3.2	Manajemen Pengelolaan SPAM DAK Infrastruktur	42
2.3.3	Rangkuman Kajian Literatur.....	44

BAB III. GAMBARAN UMUM KAWASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PEDESAAN

3.1	Kondisi Fisik Wilayah.....	47
3.2	Kondisi Geografi.....	47
3.3	Kebijakan Pengembangan Kawasan.....	48
3.4	Distribusi Air Minum Kabupaten Barito Timur	51
3.5	Ruang Lingkup Wilayah Studi Penelitian	52
3.5.1	Desa Wuran.....	52
3.5.2	Desa Tarinsing	54

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN SPAM

4.1.	Identifikasi Data Karakteristik Masyarakat	56
4.1.1	Pendidikan.	56
4.1.2	Pekerjaan.....	58
4.1.3	Pendapatan.....	60
4.1.4	Pengeluaran.....	61
4.1.5	Penghuni per KK	63
4.1.6	Umur.....	64
4.1.7	Kepemilikan Luas Tanah.....	65
4.1.8	Kepemilikan Luas Bangunan	66
4.1.9	Keterkaitan antar Faktor-faktor Karakteristik Masyarakat	67
4.1.9.1	Hubungan Pendidikan dengan Pekerjaan	70
4.1.9.2	Hubungan Pendidikan dengan Jumlah Keluarga/ KK	71
4.1.9.3	Hubungan Pekerjaan dengan Umur	72
4.1.9.4	Hubungan Pekerjaan dengan Luas Tanah	73
4.1.9.5	Hubungan Penghasilan dengan Pengeluaran.	74
4.1.9.6	Hubungan Penghasilan dengan Jumlah Keluarga/ KK	76
4.1.9.7	Hubungan Penghasilan dengan Luas Bangunan	77
4.1.9.8	Hubungan Pengeluaran dengan Jumlah Keluarga/ KK	78
4.1.9.9	Hubungan Jumlah Keluarga/ KK	

	Dengan Luas Bangunan	79
4.1.9.10	Hubungan Umur dengan Pekerjaan	80
4.1.9.11	Hubungan Luas Tanah dengan Luas Bangunan	81
4.1.10	Faktor-faktor yang Mempengaruhi dari Aspek Karakteristik Masyarakat	83
4.2	Identifikasi Bentuk Peran Serta Masyarakat.....	85
4.2.1	Bentuk peran Serta Masyarakat dalam Tahap Perencanaan	85
4.2.2	Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan	86
4.2.3	Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Tahap Operasional	87
4.2.4	Bentuk Sumber Pembiayaan Operasional.....	89
4.2.5	Faktor-faktor yang mempengaruhi dari Bentuk Peran Serta Masyarakat	90
4.3	Identifikasi Aspek Teknis SPAM	92
4.3.1	Pendapat Masyarakat tentang Manfaat SPAM.....	92
4.3.2	Pendapat Masyarakat tentang Lokasi SPAM	94
4.3.3	Kondisi Eksisting Bangunan SPAM.....	95
4.3.3.1	Sumber Air Baku.....	95
4.3.3.2	Rumah Mesin.....	97
4.3.3.3	Jaringan Perpipaan.....	98
4.3.3.4	Hidran Umum.....	99
4.3.4	Faktor-faktor yang Mempengaruhi dari Aspek Teknis SPAM	100
4.4	Identifikasi Manajemen Pengelolaan SPAM.....	101
4.4.1	Organisasi Eksisting di Masyarakat.....	101
4.4.2	Tingkat Kehadiran Rapat Pengelolaan SPAM	102
4.4.3	Iuran Operasional.....	103
4.4.4	Kemampuan Membayar Iuran Operasional...	105
4.4.5	Faktor-faktor yang mempengaruhi dari Manajemen Pengelolaan SPAM.....	105
 BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		
5.1	Kesimpulan	108
5.2	Rekomendasi	110
 DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		112
		116

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian.....	20
TABEL II.1	Analisa Kebutuhan Air Pedesaan	39
TABEL II.2	Perkiraan Kebutuhan Air Minum Pedesaan	40
TABEL II.3	Daftar variabel dan Indikator.....	47
TABEL III.1	Data Penduduk dan Luas Wilayah Kec. Karusen Janang....	53
TABEL III.2	Data Penduduk dan Luas Wilayah Kec. Paku.....	55
TABEL IV.1	Rekapitulasi Hasil Chi-Square Test.....	67
TABEL IV.2	Chi-Square Test Pendidikan dengan Pekerjaan.....	70
TABEL IV.3	Chi-Square Test Pendidikan dengan Jumlah Keluarga/ KK	71
TABEL IV.4	Chi-Square Test Pekerjaan dengan Umur.....	72
TABEL IV.5	Chi-Square Test Pekerjaan dengan Luas Tanah.....	73
TABEL IV.6	Chi-Square Test Penghasilan dengan Pengeluaran Desa Tarinsing.....	74
TABEL IV.7	Chi-Square Test Penghasilan dengan Pengeluaran Desa Wuram.....	75
TABEL IV.8	Chi-Square Test Penghasilan dengan Jumlah Keluarga/KK	76
TABEL IV.9	Chi-Square Test Penghasilan dengan Luas Bangunan.....	77
TABEL IV.10	Chi-Square Test Pengeluaran dengan Jumlah Keluarga/KK	78
TABEL IV.11	Chi-Square Test Jumlah Keluarga/KK dengan Luas Bangunan.....	79
TABEL IV.12	Chi-Square Test Umur dengan Pekerjaan.....	80
TABEL IV.13	Chi-Square Test Luas Tanah dengan Luas Bangunan Desa Tarinsing.....	81
TABEL IV.14	Chi-Square Test Luas Tanah dengan Luas Bangunan Desa Wuram	82
TABEL IV.15	Neraca.....	103

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Peta Administrasi Pemerintahan	8
GAMBAR 1.2	Kerangka Pemikiran	9
GAMBAR 1.3	Kerangka Analisis	17
GAMBAR 1.4	Teknik Simple Random Sampling.....	18
GAMBAR 2.1	Proses seleksi kegiatan SPAM Sederhana.....	38
GAMBAR 2.2	Proses Pencapaian Tujuan Penelitian.....	46
GAMBAR 3.1	Luas Wilayah Barito Timur menurut Kecamatan.....	49
GAMBAR 3.2	Peta Satelit Kabupaten Barito Timur.....	51
GAMBAR 3.3	Distribusi Air Minum Kabupaten Barito Timur	52
GAMBAR 3.4	Desa Wurun.....	54
GAMBAR 3.5	Desa Tarinsing	56
GAMBAR 4.1	Tingkat Pendidikan desa Tarinsing dan Wurun.....	56
GAMBAR 4.2	Pekerjaan	57
GAMBAR 4.3	Pekerjaan Petani Karet	58
GAMBAR 4.4	Tingkat Pendapatan.....	59
GAMBAR 4.5	Tingkat Pengeluaran.....	60
GAMBAR 4.6	Jumlah Penghuni/ KK.....	62
GAMBAR 4.7	Tingkat Umur.....	63
GAMBAR 4.8	Kepemilikan Luas Tanah	65
GAMBAR 4.9	Kepemilikan Luas Bangunan.....	66
GAMBAR 4.10	Nilai Signifikan	69
GAMBAR 4.11	Bentuk Partisipasi Tahap Perencanaan.....	84
GAMBAR 4.12	Bentuk Partisipasi Tahap Pelaksanaan.....	86
GAMBAR 4.13	Bentuk Partisipasi Tahap Operasional.....	87
GAMBAR 4.14	Bentuk Sumber Pembiayaan Operasional.....	88
GAMBAR 4.15	Pendapat Manfaat SPAM.....	91
GAMBAR 4.16	Pendapat Lokasi Pembangunan SPAM.....	93
GAMBAR 4.17	Sumber Air Baku.....	95
GAMBAR 4.18	Rumah Mesin.....	96
GAMBAR 4.19	Jaringan Pipa.....	97
GAMBAR 4.20	Hidran Umum.....	98
GAMBAR 4.21	Badan Pengelola SPAM Tarinsing.....	101
GAMBAR 4.22	Tingkat Kehadiran Rapat SPAM.....	102
GAMBAR 4.23	Iuran Operasional.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Kuesioner.....	104
LAMPIRAN 1	Kuesioner.....	104
LAMPIRAN 1	Kuesioner.....	104
LAMPIRAN 1	Kuesioner.....	104
LAMPIRAN 1	Kuesioner.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan fisik. Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan air tersebut merupakan tanggung jawab masing keluarga, akan tetapi pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat UUD Tahun 1945 yaitu dengan membangun berbagai prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum baik di perkotaan maupun di pedesaan diseluruh wilayah Indonesia. Pola pembangunan sistem penyediaan air minum sejak dari jaman orde baru yang orientasi *top-down* banyak mengalami kegagalan, dimana masyarakat hanya sebagai penerima tanpa melibat masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan proses pembangunannya. Akibat dari pola pembangunan tersebut banyak bangunan sistem penyediaan air minum terbengkalai atau tidak berfungsi lagi.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen sangat kuat untuk mencapai target *Water Supply and Sanitation - Millenium Develop-ment Goals* (WSS-MDGs), yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50% pada tahun 2015. Berdasarkan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk membiayai investasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada masyarakat,

baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis, dan pengembangan sumber daya manusia. Program penyediaan prasarana dan sarana masyarakat seperti air minum dan kesehatan akan efektif dan berkelanjutan apabila berbasis masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan dilakukan dengan pendekatan tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan (*demand responsive approach*). Tanggap terhadap kebutuhan adalah bahwa proyek menyediakan sarana dan kegiatan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat bersedia untuk berkontribusi dan membiayai, serta bersedia mengelola dan memelihara sarana dan kegiatan secara sukarela sehingga terjadi proses pembentukan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif agar masyarakat mau dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun.

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa datang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah pedesaan, akan sangat membutuhkan ketersediaan air minum yang memadai secara berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah menyusun visi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk mewujudkan “Masyarakat hidup sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 6 misi dalam pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) secara nasional, yang meliputi:

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan air minum.
2. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan prinsip *good and corporate governance*.
3. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem penyediaan air minum.
4. Menegakkan hukum dan menyiapkan peraturan perundangan untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM).
5. Menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan.
6. Memberdayakan masyarakat & dunia usaha berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur secara umum masih belum mampu dalam menyediakan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana khususnya penyediaan air minum di pedesaan yang lebih layak, karena sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Kabupaten Barito Timur mempunyai kriteria desa tertinggal sebanyak 59 desa dari total 103 desa atau sekitar 50% (Sumber BPMD Kab.Bartim, 2008). Kondisi desa tertinggal tersebut kebanyakan mempunyai akses infrastruktur yang sangat terbatas baik jalan, air minum, dan listrik. Kondisi pedesaan di Kabupaten Barito Timur khususnya, pada musim kemarau sering mengalami krisis air minum bahkan sumber air baku maupun air tanah mengalami kekeringan. Hal ini dimungkinkan akibat sudah gundulnya hutan-hutan baik akibat *illegal logging* maupun pertambangan batubara. Kondisi ini yang menyebabkan Pemerintah Daerah berusaha mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan membuat program sistem penyediaan air minum pedesaan termasuk didalamnya program DAK-APBN Infrastruktur subbidang air bersih maupun pembiayaan dari APBD dan dana loan lainnya. Pada umumnya masyarakat pedesaan mendapatkan air minum adalah menggunakan air sumur. Akan tetapi permasalahan ini menjadi masalah besar ketika musim kemarau, daerah pedesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan PDAM mengalami kesulitan mendapatkan air minum.

Program pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten Barito Timur telah banyak dilakukan oleh Pemerintah baik yang bersumber dari dana APBD, APBN-DAK, program PKPS BBM IP (program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak untuk infrastruktur pedesaan), Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (P3DT), *Community Water Supply and Health (CWSH)* Dinas Kesehatan, maupun oleh PNPM Mandiri BPMD.

Pemerintah Pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum meluncurkan program DAK Infrastruktur subbidang air minum untuk tahun anggaran 2008 meliputi 9 desa penerima kegiatan tersebut. Desa-desa penerima program tersebut menyebar pada beberapa kecamatan. Adapun kegiatan DAK infrastruktur tersebut meliputi pembuatan kolam air baku, genset, pompa sentrifugal, jaringan distribusi perpipaan, pengadaan hidran umum dan sambungan rumah murah. Kemudian ditambah lagi

program Dinas Pekerjaan Umum yang menggunakan dana APBD dengan kegiatan pembangunan WTP (*Water Treatment Project*).

Akan tetapi kebanyakan pembangunan sistem penyediaan air tersebut mengalami kegagalan dalam pengelolaan pasca pembangunan. Dimana kegiatan tersebut hanya memfokuskan pada pembangunan fisiknya saja tanpa memfasilitasi pembentukan badan pengelola sistem penyediaan air minum (SPAM) di tingkat masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sistem penyediaan air minum (SPAM) yang telah dibangun. Hal inilah yang mengakibatkan banyak bangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) tidak berfungsi optimal seperti jaringan pipa bocor, mesin pompa hilang dan hidran umum rusak. Hal ini merupakan problem utama yang terjadi di lingkungan masyarakat, dimana pemerintah tetap setiap tahunnya menganggarkan program sistem penyediaan air minum pedesaan.

Pembangunan SPAM di desa Wurun meliputi jaringan pipa distribusi 2.082 m, rumah mesin 1 unit, resevoir 1 buah, mesin pompa 1 set dan hidran umum sebanyak 3 buah. Pembangunan di desa Tarinsing meliputi jaringan distribusi 614 m, rumah mesin 1 unit, mesin pompa 1 set, perlindungan mata air dan hidran umum sebanyak 9 buah. Akan tetapi setelah proses pembangunan selesai sampai dengan saat ini, sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dibangun di desa Tarinsing masih berfungsi dengan baik dengan pengelolaan dari masyarakat sendiri akan tetapi SPAM yang dibangun di desa Wurun tidak berfungsi sampai sekarang sejak selesai dibangun jaringan air bersih tersebut dan bahkan informasi dari masyarakat bahwa peralatan mesin pompa ada yang hilang.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan prasarana air minum, pemerintah sudah seharusnya menempatkan masyarakat pada posisi yang harus diperhatikan dengan melibatkannya mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan pasca pembangunan. Pada tahun 2008 Pemerintah meluncurkan program DAK Infrastruktur subbidang air minum pedesaan dengan prioritas desa-desa yang tingkat kesulitan tinggi mendapatkan air termasuk diantaranya adalah desa Wurun dan desa Tarinsing.

Akan tetapi sistem penyediaan air minum pedesaan menghadapi banyak kendala dalam pengelolaan. Seperti halnya di desa Wuran sampai dengan saat sekarang bahwa bangunan SPAM yang telah dibangun tidak beroperasi. Sehingga bangunan SPAM yang ada di desa Wuran tidak terawat, bahkan mesin penyedot air, informasi dari masyarakat telah hilang. Sampai bangunan SPAM tersebut selesai terbangun, bahwa badan pengelola SPAM di desa Wuran tidak terbentuk. Lain halnya di desa Tarinsing bahwa bangunan SPAM tersebut beroperasi sampai dengan saat ini. Pasca pembangunan SPAM tersebut, masyarakat desa Tarinsing lewat musyawarah Desa membentuk badan pengelola atau pengurus yang akan bertugas dalam mengelola dan memelihara bangunan SPAM yang telah selesai terbangun.

Maka dalam hal ini perlu kajian yang mendasar tentang masalah utama penyebab tidak jalannya pengelolaan sistem penyediaan air minum tersebut dengan lokasi penelitian desa Wuran dan desa Tarinsing. Dari gambaran tersebut maka diharapkan hasil penelitian ini dapat menjawab permasalahan sebagai rumusan *Research Question* yang telah ditetapkan yaitu *Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di desa Wuran dan Tarinsing Kabupaten Barito Timur.*

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di desa Wuran dan Tarinsing Kabupaten Barito Timur.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat pada kedua desa lokasi penelitian.
2. Mengidentifikasi bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM).

3. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis sistem penyediaan air minum (SPAM).
4. Mengidentifikasi manajemen pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM).
5. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di desa Wuram dan Tarinsing.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Bagi pemerintah adalah sebagai masukan bagi Pemerintah Barito Timur dalam mengambil keputusan, perencanaan dan menyempurnakan pelaksanaan program sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan khususnya DAK Infrastruktur subbidang air minum pedesaan di Kabupaten Barito Timur pada tahun-tahun berikutnya.
2. Bagi masyarakat adalah sebagai bahan masukan pemahaman, penyadaran begitu pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Substansial.

Secara substansial ruang lingkup penelitian adalah kajian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang ditinjau dari segi karakteristik masyarakat, bentuk peran serta masyarakat, aspek teknis SPAM dan manajemen pengelolaan SPAM.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah studi penelitian ini adalah dua desa yang mendapatkan program sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sumber dana APBN-DAK Infrastruktur subbidang air minum pedesaan di wilayah Kabupaten Barito Timur pada

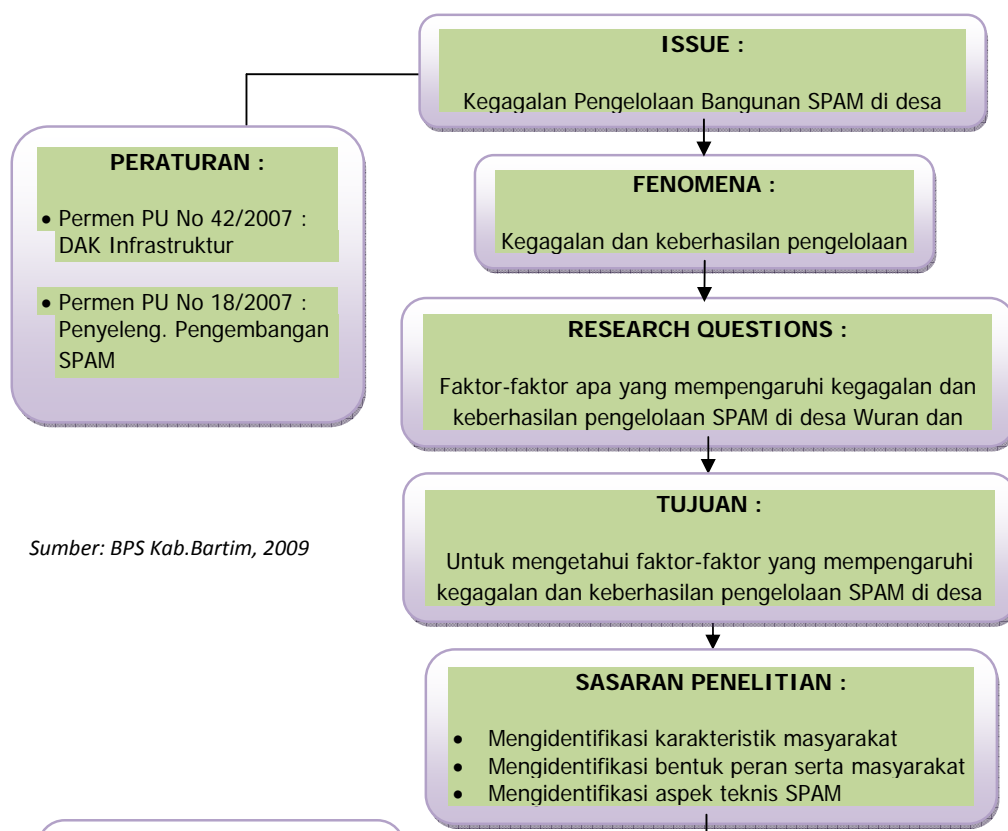
tahun anggaran 2008. Dimana dua desa tersebut mendapatkan program pembangunan jaringan air minum pedesaan dengan jenis pekerjaan yang hampir sama dengan menggunakan genset, pompa *sentrifugal*, jaringan pipa dan hidran umum. Akan tetapi berbeda dalam panjang pipa jaringan, jumlah hidran umum dan jarak perumahan dengan sumber air baku. Desa yang akan diteliti tersebut adalah desa Wuram Kecamatan Karusen Janang dan desa Tarinsing Kecamatan Paku.

Desa Tarinsing merupakan bagian dari Kecamatan Paku sekaligus sebagai desa pemekaran dari desa Tampa yang terdiri dari 3 RT. Jarak desa Tarinsing dengan pusat kota Kecamatan Paku adalah sekitar 7 km dengan kondisi jalan tanah keras dan sebagian telah dipasang *telport*.

Desa Wuram merupakan bagian dari kecamatan Karusen Janang dan mempunyai jarak dengan pusat kota Kecamatan Karusen Janang sekitar 10 km. Akan tetapi penelitian di desa Wuram ini hanya fokus pada kampung Wuram yaitu antara RT 1 dan RT 2 yang mendapatkan/berdampak langsung proyek pembangunan SPAM tersebut. Jadi RT 3-5 (Trans 100) dan RT 6-9 (Trans 200) tidak diikutkan sebagai lokasi penelitian ini, karena lokasi bangunan SPAM ini hanya diperuntukkan untuk kawasan permukiman masyarakat kampung wuram RT 1 dan 2 kampung Wuram. Kondisi jalan menuju desa Wuram adalah sebagian telah diaspal sisanya dengan sirtu. Peta lokasi kedua kecamatan terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau alur pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa kegagalan dan keberhasilan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di desa Wurun dan desa Tarinsing Kabupaten Barito Timur.



Sumber: BPS Kab.Bartim, 2009

1.7 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode *deskriptif kuantitatif*. Metode *deskriptif kuantitatif* adalah penelitian dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi pada desa Wurun dan desa Tarinsing tentang pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan pendekatan kuantitatif deduktif, yaitu pendekatan dengan mengkaji variabel penelitian yang berpengaruh. Sifat pendekatan ini terukur dan digunakan untuk menggambarkan pengelolaan SPAM yang ada di desa Wurun dan Tarinsing Kabupaten Barito Timur. Berkaitan dengan tema yang akan diteliti di atas maka dalam penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan SPAM dikaitkan dengan karakteristik masyarakat, bentuk peran serta masyarakat, aspek teknis bangunan SPAM, dan manajemen pengelolaan SPAM yang ada di kedua desa tersebut.

Dengan data dan informasi yang didapat, maka dilakukan analisis untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan SPAM dikaitkan dengan karakteristik masyarakat, bentuk peran serta masyarakat, aspek teknis bangunan SPAM, dan manajemen pengelolaan SPAM. Dari hasil analisis, kemudian dibuatkan rumusan tentang kondisi pengelolaan SPAM mencakup permasalahan, potensi, peluang, serta tantangan yang ada maupun kecenderungan yang akan datang.

Sumber data utama yang dipakai sebagai data yang akan dianalisis adalah kebijakan pemerintah tentang penyediaan infrastruktur subbidang air minum dana DAK, kondisi bangunan SPAM, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan manajemen pengelolaan SPAM. Hasil data tersebut dianalisis dengan cara komparatif, yaitu dengan cara membandingkan kenyataan di lapangan pada kedua desa tersebut dalam setiap tahapan, mulai dari segi karakteristik masyarakat, bentuk peran serta masyarakat, aspek teknis bangunan SPAM, dan manajemen pengelolaan SPAM.

Apabila ditinjau dari adanya variabel, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena variabel yang diteliti adalah sudah dan sedang terjadi, sedangkan pendekatan lebih condong ke kuantitatif karena akan banyak menggunakan data berupa angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data serta hasilnya dalam bentuk tabel dan diagram.

1.8 Kebutuhan Data

Kebutuhan data dalam suatu penelitian sebagai bahan analisis menurut Warpani (1984:4) perlu mempertimbangkan jenis data yang dibutuhkan dan sumber data yang diperoleh.

Secara umum data dikelompokkan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diselidiki secara langsung dan dapat dihitung dengan menggunakan cara sederhana, sedangkan data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diselidiki secara langsung dan hanya diukur dengan cara tidak langsung dan hanya diukur dengan cara tidak langsung pula seperti tingkat inteligensi, kejujuran dan sebagainya.

Sumber data menurut Warpani (1984:4) secara umum ada dua sumber informasi yaitu sumber lapangan dan sumber dokumentasi. Sumber data lapangan antara lain adalah para pejabat pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Sedangkan sumber dokumentasi antara lain data statistik, dokumen PU (DPA, laporan kegiatan, buku harian program kegiatan).

Sumber data ini dapat digolongkan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain.

Sumber data dalam penelitian ini, mengenai penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum pedesaan di Kabupaten Barito Timur dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun kelompok terhadap responden terpilih. Dalam pelaksanaan di lapangan, data primer ini biasanya diperoleh melalui penyebaran *kuesioner*, wawancara dan *observasi*. Penyebaran *kuesioner* disini merupakan metode pengumpulan data dengan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara tertulis.

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari masyarakat penerima program sistem penyediaan air minum pedesaan yaitu masyarakat desa Wurau dan desa Tarinsing. Data ini dikumpulkan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada lingkungannya pasca pembangunan. Alat yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut adalah

dengan penyebaran kuesioner dan wawancara dengan responden yang terpilih. Pertanyaan di dalam kedua alat tersebut mencakup pendapat, pengetahuan dan pandangan terhadap pelaksanaan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di lingkungannya.

b. Data Sekunder

Didalam pencarian data sebagai kelengkapan sebelum dilakukan penelitian adalah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin melalui berbagai sumber yang relevan. Jenis data tersebut sering disebut dengan data sekunder, yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel ataupun diagram-diagram. Data sekunder biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut (Sugiarto, 2001:19). Data sekunder ini biasanya diperoleh dengan menyalin atau mengutip data yang sudah jadi.

Data sekunder yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini adalah profil desa, data kependudukan, data pelaksanaan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan data bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada pedesaan yang menjadi objek penelitian. Data ini diperoleh dari instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur yaitu Badan Perencanaan Daerah, Badan Pusat Statistik, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kecamatan, Kantor Kepala Desa dan instansi lainnya yang sekiranya berkaitan dengan penelitian ini.

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Warpani (1984:5) beberapa macam teknik pengumpulan data dengan kelemahan dan keunggulannya masing-masing, oleh karena itu untuk kepentingan penelitian tidak dapat dikemukakan satu teknik yang paling ampuh. Penggunaan suatu macam teknik banyak tergantung pada tipe permasalahan yang sedang diteliti, fasilitas, dan biaya yang tersedia, situasi dan kondisi setempat dan ketelitian yang diharapkan.

Teknik dan metode pengumpulan data dari suatu penelitian, secara umum dibagi menjadi dua (Nazir, 2003) yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada objek penelitian di lapangan, baik melalui pengamatan (*observasi*) langsung maupun wawancara (*interview*) serta penyebaran angket (*kuesioner*), sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan peneliti dengan cara tidak langsung ke objek penelitian tetapi melalui terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data primer dengan pengamatan langsung (*observasi*) sebagai cara pengumpulan data menurut Nazir, 2003 mempunyai beberapa keuntungan seperti terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku dan sebagainya sewaktu kejadian tersebut berlaku, dapat segera dicatat dan tidak tergantung dari data ingatan seseorang. Keuntungan kedua adalah dapat memperoleh data dari subjek yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal. Selain beberapa keuntungan diatas, akan tetapi ada juga kerugiannya yaitu kadangkala diperlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh data terhadap suatu kejadian.

Pengumpulan data primer dengan wawancara (*interview*) adalah merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi dalam wawancara (waktu, tempat, sikap masyarakat), faktor pewawancara (karakteristik sosial, ketrampilan mewawancara, motivasi), faktor isi wawancara (peka untuk dipertanyakan, sukar untuk ditanyakan, tingkat minat) dan faktor responden (karakteristik sosial, kemampuan menangkap pertanyaan, kemauan menjawab pertanyaan).

Pengumpulan data dengan pertanyaan (*kuesioner*), dalam *kuesioner* harus mempunyai pusat perhatian, yaitu masalah yang ingin dipecahkan, tiap pertanyaan harus merupakan bagian dari hipotesa yang ingin diuji (Nazir, 2003) dan secara umum isi pertanyaan kuesioner berupa pertanyaan fakta, pendapat, persepsi diri.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengenai penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sistem penyediaan air minum pedesaan di Kabupaten Barito Timur, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan wawancara tokoh masyarakat, badan pengelola dan kuesioner kepada masyarakat. Pengumpulan data sekunder melalui instansi yang terkait yaitu Desa, Kecamatan, BPS dan Dinas Pekerjaan Umum.

1.10 Metoda dan Teknik Analisis

1.10.1 Metoda Analisis

Metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan data dari hasil kuisioner yang telah disebarakan ke responden pada dua wilayah pedesaan.

Menurut Schubeler (1996:32) peran serta dalam pembangunan prasarana lebih merupakan proses bukan produk. Dengan demikian untuk mengukur bentuk peran serta dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan dapat dilihat pada proses kegiatannya.

Bentuk peran serta masyarakat diperoleh dengan metode kuantitatif pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan dengan sub variabel pikiran, tenaga, barang/ material dan dana dengan masing-masing indikator penilaiannya. Demikian pula dengan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan pasca pembangunan diperoleh dengan metoda kuantitatif melalui penjumlahan hasil (distribusi frekuensi) sub variabel pikiran, tenaga, material/ bahan dan dana dengan masing-masing indikator penilaiannya.

1.10.2 Teknik Analisis

Pada tahap ini dijelaskan tentang teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai upaya pencapaian tujuan penelitian. Teknik analisis yang dipakai adalah Analisis Kuantitatif.

1. Metode Analisis Kuantitatif

Dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengidentifikasi data karakteristik masyarakat, bentuk peran serta masyarakat, analisis aspek teknis dan manajemen pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) ditambah dengan hasil survei langsung ke lapangan sekaligus wawancara dengan badan pengelola dan tokoh-tokoh masyarakat pada masing-masing desa lokasi studi. Kemudian hasil identifikasi dan pengumpulan data terhadap variabel-variabel di atas kemudian dianalisis dengan prosedur statistik menggunakan alat *SPSS* distribusi frekuensi dan khusus untuk karakteristik ditambah alat *SPSS* dengan *crosstabs*.

2. Statistik Diskriptif

Adalah metode ilmiah untuk menyusun, meringkas, menyajikan dan menganalisis data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang benar dan dapat dibuat keputusan yang masuk akal berdasarkan data tersebut. Jika suatu kesimpulan sudah dihimpun, pada statistik diskriptif dapat menghasilkan suatu kesimpulan dalam beberapa hal. Pertama dapat dibuat diagram batang, misalnya diagram batang yang menunjukkan data persentase dan frekuensi. Metode statistik deskriptif, kita dapat mengetahui karakteristik data menyangkut karakteristik mean, modus, median serta lainnya.

Data yang terkumpul di lapangan merupakan data mentah, untuk dapat digunakan atau mempunyai arti data tersebut harus diolah terlebih dahulu, Sehingga dalam penelitian ini, alat yang akan digunakan dalam menganalisis data adalah *SPSS* dengan distribusi frekuensi dan *crosstabs* kemudian hasilnya digambarkan dalam diagram batang.

a. Analisis Data Karakteristik Masyarakat

Analisis aspek data karakteristik masyarakat dengan variabelnya yaitu pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, umur, jumlah penghuni/KK, kepemilikan luas tanah dan kepemilikan luas bangunan yang diperoleh dari hasil kuisisioner kemudian dianalisis. Setelah data yang dikumpulkan selesai diolah, kemudian dianalisis dengan *SPSS* distribusi frekuensi dan *crosstabs* kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk laporan. Dalam penyajian data, yaitu untuk data kuantitatif menggunakan angka-angka yang digambarkan dalam diagram batang.

b. Analisis Bentuk Peran Serta Masyarakat

Analisis aspek bentuk peran serta masyarakat mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap operasional dengan variabelnya yaitu pikiran, tenaga, material/bahan dan dana serta bentuk sumber pembiayaan yang diperoleh dari hasil kuisisioner kemudian dianalisis. Setelah data yang dikumpulkan selesai diolah, kemudian dianalisis dengan *SPSS* distribusi frekuensi kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk laporan. Dalam penyajian data, yaitu untuk data kuantitatif menggunakan angka-angka yang digambarkan dalam diagram batang.

c. Analisis Aspek Teknis SPAM

Analisis aspek teknis sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan variabelnya yaitu manfaat dan lokasi sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kuisisioner dan bangunan SPAM (jaringan distribusi, genset, pompa sentrifugal, hidran umum) dilakukan

dengan observasi langsung pada dua desa lokasi penelitian. Setelah data yang dikumpulkan selesai diolah, kemudian dianalisis dengan *SPSS* distribusi frekuensi kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk laporan. Dalam penyajian data, terdapat dua cara yaitu untuk data kuantitatif menggunakan angka-angka yang digambarkan dengan diagram batang dan untuk data kualitatif hasil survei dan wawancara ditampilkan dalam bentuk deskripsi atau kata-kata.

d. Analisis Manajemen Pengelolaan SPAM Pedesaan

Analisis manajemen pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan dengan mengambil variabelnya badan pengelola, organisasi eksisting yang ada di masyarakat, koperasi air minum, kelompok pengguna air yang dilakukan pada masing-masing pedesaan kemudian ditampilkan dalam bentuk deskripsi. Kemudian tingkat kehadiran rapat pengelolaan SPAM dan kemampuan iuran bulanan didapatkan dengan penyebaran kuesioner pada masing-masing desa. Setelah data yang dikumpulkan selesai diolah, kemudian dianalisis dengan *SPSS* distribusi frekuensi kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk laporan. Dalam penyajian data, terdapat dua cara yaitu untuk data kuantitatif menggunakan angka-angka yang digambarkan dengan diagram batang dan untuk data kualitatif hasil survei dan wawancara ditampilkan dalam bentuk deskripsi atau kata-kata.

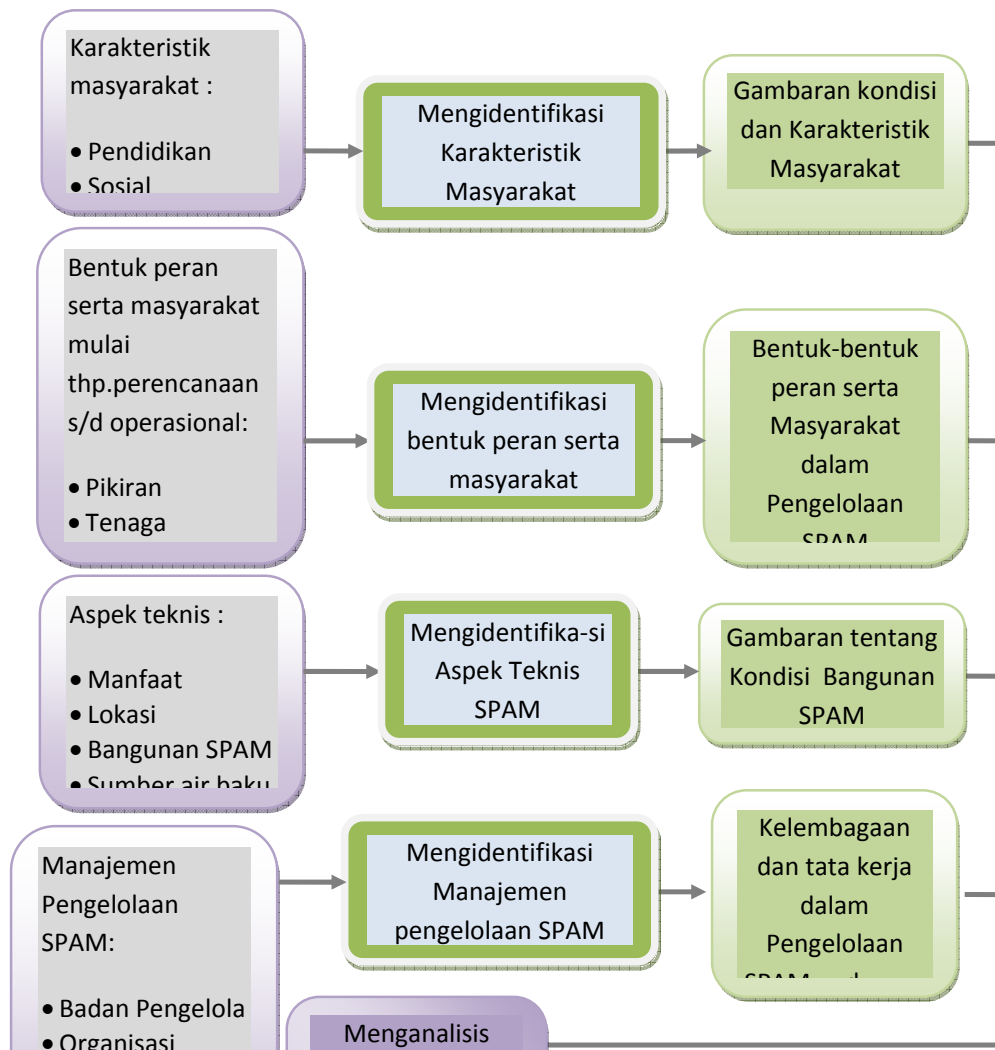
1.10.3 Kerangka Analisis

Kerangka analisis adalah merupakan proses dari pengumpulan data baik secara kuesioner, observasi lapangan, dan wawancara. Untuk data hasil kuesioner dianalisis dengan alat *SPSS* distribusi frekuensi kemudian digambarkan dalam bentuk diagram batang. Untuk hasil wawancara dengan masyarakat dan observasi lapangan digunakan untuk penguatan data kuesioner yang diperoleh.

Kemudian hasil distribusi frekuensi dan *cosstabs* dianalisis dengan kuantitatif deskriptif sehingga diperoleh hasil/keluaran berupa faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di desa Wuram dan Tarinsing Kabupaten Barito Timur..

Hasil dari faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan kemudian diinterpretasikan yang berupa temuan pada desa Wuram dan desa Tarinsing untuk selanjutnya dibuat kesimpulan dan rekomendasi.

Untuk lebih jelasnya kerangka analisis penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini :



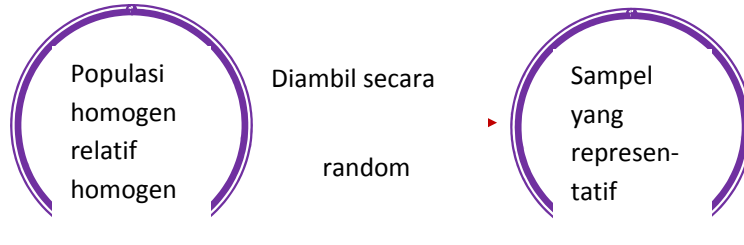
1.11 Teknik Sampling

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun, 1995:152) sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari ukuran tentang sesuatu, hal ini berkenaan dengan data bukan pada orangnya atau bendanya (Nasir, 1999:327)

Berdasarkan observasi lapangan pada kedua lokasi yang menjadi objek penelitian dan dengan mengasumsikan bahwa populasi dari kedua desa tersebut berdistribusi normal, maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan *simple random sampling*.

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Simple random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi

dilaksanakan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut seperti terlihat pada Gambar 1.4 (Sugiono, 2009:82).



GAMBAR 1.4

Populasi yang menjadi sasaran penelitian ini adalah kampung (RT) yang mendapatkan program sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan pada masing-masing desa yaitu desa Wuram terdiri dari RT 1 dan RT 2 kemudian desa Tarinsing RT 1 dan RT 2. Hal ini dikarenakan ketidakterkaitan program sistem penyediaan air minum (SPAM) yang di bangun dengan wilayah RT lainnya walaupun dalam satu wilayah desa.

Apabila kondisi yang dihadapi tepat, maka akan diperoleh keuntungan penggunaan *simple random sampling* yaitu *mean* (rata-rata) sampel yang diperoleh akan menjadi penduga tidak bias dari *mean* (rata-rata) populasinya (Sugiarto, 2001:61)

Mengenai jumlah warga yang akan dijadikan sampel, untuk penelitian deskriptif kuantitatif ini dapat dipakai ukuran minimum dari Gay (dalam Sevilla, 1993:163) dengan batas ketelitian 10%.

Banyaknya sampel yang diambil dapat ditentukan dengan menggunakan rumus (Riduwan, 2009:65).

$$n = \frac{N}{1 + d \cdot N}$$

- Dimana :
- n = Jumlah sampel yang diambil
 - N = Jumlah populasi yang telah terlayani persampahan
 - d = Kesalahan yang bias ditolerir

Berdasarkan jumlah KK pada masing-masing desa yang terdiri dari :

Desa Wuran RT 1,2 = 83 KK

Desa Tarinsing RT 1,2,3 = 44 KK

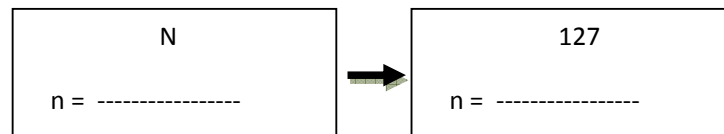
Diketahui :

N = Jumlah populasi dua desa.

= 127 KK

d = 10%

Berdasarkan rumus diatas , maka diperoleh jumlah sampel :



= 56 Responden

Dari jumlah 56 responden tersebut, maka jumlah masing-masing pemukiman penduduk dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut ini:

TABEL I.1
PERHITUNGAN JUMLAH SAMPEL PENELITIAN

Nama Desa	Jumlah Populasi (N)	Proporsional (P=N/ΣN)	Jumlah Sampel n = P*50
Tarinsing	44	35	20
Wuran	83	65	36
Jumlah	127	100	56

Berdasarkan Tabel I.1 perhitungan diatas, maka dari jumlah 56 responden secara proporsional jumlah responden desa Wuran 36 responden dan desa Tarinsing 20 responden. Dalam pelaksanaan penelitian dilapangan dengan pembagian kuesioner

pada masing-masing responden di setiap populasi yang ingin diselidiki hanya akan diberikan kepada responden yang benar-benar bersedia atas kemauan sendiri. Hal ini dilakukan supaya kuesioner tersebut lebih akurat dan objektif.

1.12 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN LITERATUR PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PEDESAAN.

Bab ini mencakup uraian tentang tinjauan teoritis dari berbagai literatur yang bertujuan untuk memahami sistem teori karakteristik masyarakat, bentuk peran serta masyarakat, aspek teknik SPAM, dan manajemen pengelolaan sistem penyediaan air minum pedesaan.

BAB III: GAMBARAN UMUM KAWASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PEDESAAN DI DESA WURAN DAN TARINSING.

Bab ini menggambarkan kondisi umum lokasi studi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk analisis.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN PENGELOLAAN SPAM.

Bab ini berisikan identifikasi dan menganalisis pengelolaan sistem penyediaan air minum di desa Wuram dan Tarinsing.

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN

AIR MINUM PEDESAAN

2.1. Karakteristik Masyarakat

2.1.1. Stratifikasi Sosial Masyarakat Pedesaan

Pengertian lain tentang desa dikemukakan oleh Hayami dan Kikuchi (1987) bahwa desa sebagai unit dasar kehidupan kelompok terkecil di Asia, dalam konteks ini “desa” dimaknai sebagai suatu “desa alamiah” atau dukuh tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Pemaknaan terhadap desa dalam konteks ini ditekankan pada aspek ketergantungan sosial dan ekonomi di masyarakat yang direpresentasikan oleh konsep-konsep penting pada masyarakat desa, yaitu cakupan yang bersifat kecil dan ketergantungan dalam bidang sosial dan ekonomi (ikatan-ikatan komunal).

Pengkajian masyarakat pedesaan memberikan ciri atau karakteristik yang cenderung sama tentang desa. Pada aspek politik, masyarakat desa cenderung berorientasi “ketokohan”, artinya peran-peran politik desa pada umumnya ditanggungjawabkan atau dipercayakan pada orang-orang yang ditokohkan dalam masyarakat. Secara ekonomi, mata pencaharian masyarakat desa berorientasi pada pertanian artinya sebagian besar masyarakat desa adalah petani. Sedangkan dalam konteks religi-kultural masyarakat desa memiliki ciri nilai komunal yang masih kuat dengan adanya guyub rukun, gotong royong dan nilai agama atau religi yang masih kuat dengan adanya ulama sebagai pemuka agama.

Sastramihardja (1999) menyatakan bahwa desa merupakan suatu sistem sosial yang melakukan fungsi internal yaitu mengarah pada pengintegrasian komponen-komponennya sehingga keseluruhannya merupakan satu sistem yang bulat dan mantap. Disamping itu, fungsi eksternal dari sistem sosial antara lain proses-proses sosial dan

tindakan-tindakan sistem tersebut akan menyesuaikan diri atau menanggulangi suatu situasi yang dihadapinya. Sistem sosial tersebut mempunyai elemen-elemen yaitu tujuan, kepercayaan, perasaan, norma, status peranan, kekuasaan, derajat atau lapisan sosial, fasilitas dan wilayah.

Menurut Geertz (1963) masyarakat desa di Indonesia identik dengan masyarakat agraris dengan mata pencaharian sektor pertanian, baik petani padi sawah (Jawa) maupun ladang berpindah (luar Jawa). Selain itu, sejumlah karakteristik masyarakat desa yang terkait dengan etika dan budaya mereka, yang bersifat umum yang selama ini masih sering ditemui yaitu sederhana, mudah curigai, menjunjung tinggi kekeluargaan, lugas, tertutup dalam hal keuangan, perasaan minder terhadap orang kota, menghargai orang lain, jika diberi janji akan selalu diingat, suka gotong royong, demokratis dan religius. Kedudukan seorang dilihat dari berapa luasan tanah yang dimiliki.

Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan. (Calhoun dalam Soekanto, 1990) adalah sebagai berikut: 1) Ukuran kekayaan, barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya rumah, kerbau, sawah dan tanah, 2) Ukuran kekuasaan, barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atas. Contohnya pak Kades, pak Carik, tokoh masyarakat, 3) Ukuran kehormatan, orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa, dan 4) Ukuran pengetahuan, pengetahuan sebagai ukuran, dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Barang siapa yang berilmu maka dianggap sebagai orang pintar.

Menurut Koentjaraningrat (1984), bahwa suatu sifat yang positif dalam mentalitas kita adalah konsep yang merupakan salah satu unsur dalam nilai gotong royong. Gotong royong merupakan cerminan bahwa manusia itu tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh sistem sosial dari komunitas yang saling terikat.

Ada beberapa cara pembangunan masyarakat desa menurut A. Suryadi (1983), yaitu dengan mempengaruhi pikiran, sikap dan tingkah laku orang-orang supaya lebih baik. Ukuran suatu masyarakat dapat dikategorikan baik, ialah apabila orang-orang tinggal didalamnya, karena didalamnya tersedia kondisi-kondisi yang dapat menuntun

orang-orang kepada kehidupan yang membahagiakan, dan bila kita menerima ini maka kriteria untuk suksesnya suatu kerja pembangunan masyarakat desa ialah membuat lebih banyak orang lebih puas dengan kehidupan yang dilakukannya. Jika unsur kepuasan yang menjadi penilaian terhadap masyarakat desa, maka dalam kerja pembangunan harus memprioritaskan kebutuhan yang berlaku umum. Dijelaskan bahwa agar kerja badan pembangunan masyarakat desa berakhir dengan kemajuan riil, maka hendaknya ia berakhir dengan timbulnya taraf kepuasan umum yang menyeluruh didalam masyarakat.

2.1.2. Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Strategi pembangunan berkembang dari masa ke masa secara dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi mulai ditinggalkan karena tidak dapat menjawab masalah sosial seperti kemiskinan, kenakalan, kesenjangan, dan keterbelakangan. Paradigma pembanguan kemudian bergeser ke arah pendekatan masyarakat yang sebelumnya sebagai objek menjadi subjek pembangunan. Paradigma baru ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal.

Pengertian partisipasi masyarakat atau peran masyarakat dalam pembangunan telah banyak dikemukakan oleh berapa ahli maupun berbagai lembaga. Partisipasi adalah proses keterlibatan mental dan pikiran, emosi seseorang di dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan terhadap usaha yang bersangkutan. (Keith Davis, dalam Elmi Kurnianto W, 2007:34).

Partisipasi menurut PBB dalam Slamet (1983), adalah sebagai bentuk keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda: a) dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, b) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela, dan c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek. Dari sini nampak bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi baik pada tahap perencanaan, persiapan maupun pelaksanaan serta manfaat yang akan diperolehnya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat

dilakukan pada semua tahapan dalam proses pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Slamet, 1992). Dengan demikian partisipasi akan ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Lebih lanjut Hoofsteede (dalam Khairuddin, 1992:124-125) menyatakan bahwa peran serta berarti ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Terkandung makna dalam peran serta terdapat proses tindakan pada suatu kegiatan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dengan kata lain keadaan tertentu lebih dahulu, baru kemudian ada tindakan untuk mengambil bagian.

Partisipasi secara *harfiah* mengandung arti ikut serta yang berasal dari kata asing "*take a part*" atau ambil bagian. Secara lebih umum lagi kata partisipasi dapat berarti ikut sertanya suatu kesatuan untuk ambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar. Sejalan dengan hal tersebut istilah partisipasi masyarakat juga sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan (Wibisana, 1989:41).

Pengertian diatas mengandung maksud bahwa partisipasi merupakan proses keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan anggota masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut sudah dapat dianggap sebagai suatu peran serta masyarakat dalam berpartisipasi.

Dalam partisipasi masyarakat dikenal adanya tiga tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diantaranya yaitu: a) Partisipasi dalam membuat keputusan (membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang bisa dilaksanakan, dapat atau layak dioperasionalkan), b) Partisipasi dalam implementasi (kontribusi sumber daya, administrasi, dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya, dan informasi), dan c) Dalam kegiatan yang memberikan keuntungan (material, sosial dan personel). Dalam kegiatan evaluasi

termasuk keterlibatan dalam proses yang berjalan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan (Cohen dan Uphoff, dalam Komarudin, 1997:320).

Participatory Planning dipandang sebagai suatu proses sosial yang dinegosiasikan, artinya fokus dari perencanaan partisipatif terutama tidak menghasilkan suatu rencana tetapi lebih menciptakan ruang-ruang dialog antar berbagai aktor dengan berbagai harapan, persepsi, dan interpretasi berkenaan dengan persoalan-persoalan dan isu-isu yang diungkapkan dan dirundingkan. Perencanaan partisipatif juga menawarkan kesempatan unik bagi teknisi dan anggota komunitas untuk berinteraksi dan menghubungkan pengetahuan mereka masing-masing (De Roux dalam Nieras, 2002).

Menurut Abe (2005:91), suatu perencanaan yang berbasis prakarsa masyarakat adalah perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrit masyarakat dan dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan akan membawa dampak penting yaitu: 1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi dan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat; 2) memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik; dan 3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Hakekat manusia sebagai zoon politikon, dimana karena naluri psikologisnya manusia cenderung ingin berperan serta dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya (Salusu, 1996:232). Secara lebih mendalam (Sastroputro, 1985 dalam Elmi Kurnianto W, 2007:35) partisipasi mengandung tiga ide pokok yaitu: 1) Partisipasi sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata keterlibatan fisik secara jasmaniah, 2) Kesiediaan memberikan sumbangan dalam suatu usaha mencapai tujuan kelompok. Hal ini menunjukkan adanya faktor rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok/komunitas, dan 3) Adanya unsur tanggung jawab yang merupakan aspek yang menonjol dari rasa keanggotaan. Dengan diakuinya sebagai anggota maka akan menimbulkan "*sense of belongingness*".

Dalam pandangan Koentjaraningrat (1994:80), partisipasi merupakan suatu keinginan manusia agar dipandang sebagai milik dari suatu kelompok dan tidak menyendiri serta berinteraksi dengan lingkungan, oleh karenanya

masyarakat dalam berpartisipasi didasarkan atas keyakinan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tersebut akan bermanfaat bagi dirinya. Partisipasi juga dapat diartikan keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan (Alastraire dalam Elmi Kurnianto W, 2007:35). Oleh sebab itu partisipasi masyarakat harus digerakkan dan dibentuk untuk dapat berfungsi sebagai output pembangunan, sehingga dapat diketahui peningkatan kondisi dan taraf hidup masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk mandiri (Ndraha, 1990 dalam Elmi Kurnianto W, 2007:35).

Peran serta masyarakat dari sudut pandang pemerintah adalah melakukan sesuatu dengan biaya semurah mungkin, sehingga sumber dana yang terbatas dapat dipakai untuk kepentingan orang banyak. Alasan-alasan efektifitas dan efisiensi adanya peran serta masyarakat yang nyata dapat disimpulkan sebagai berikut (Rukmana, 1993:214) yaitu: 1) Peran serta masyarakat memberikan kontribusi pada upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang terbatas, 2) Peran serta masyarakat membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. Hal ini akan dapat menghasilkan rancangan rencana, program dan kebijakan yang lebih realistis. Selain itu memperbesar kemungkinan masyarakat bersedia dan mampu menyumbang sumber daya mereka seperti uang maupun tenaga, dan 3) Peran serta masyarakat merupakan salah satu komponen yang harus diikutsertakan dalam proses pembangunan. Peran masyarakat menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang di bangun. Hal ini akan merangsang masyarakat dalam pemeliharaan yang baik bahkan akan menimbulkan suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus sebagai produsen pelayanan prasarana dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk masyarakat (Schubeler, 1996:32)

Berdasarkan hal tersebut maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana khususnya prasarana air minum pedesaan adalah sesuatu keharusan agar pengelolaannya dapat berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan berbasis

masyarakat bukan hanya secara administrasi sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, akan tetapi yang lebih substantif yaitu apakah kegiatan tersebut dapat bertahan lama setelah selesai proyek (kebanyakan selesai proyek selesai pula kegiatan). Kegiatan dapat bertahan lama apabila pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan sistem nilai masyarakat. Tugas pemerintah/lembaga adalah mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan kemandirian. Pemberdayaan dikatakan sangat berhasil apabila kegiatan tersebut dapat berkembang dan dicontoh oleh masyarakat lainnya.

2.1.3. Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Konteks Keberlanjutan

Pembangunan yang berbasis masyarakat yang menempatkan posisi masyarakat sebagai aktor/manajer pembangunan dan hanya sedikit melibatkan intervensi pihak lain seperti LSM maupun pemerintah (<http://en.wikipedia.org>). Sumbangan pembangunan berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan diantaranya: 1) Meningkatkan kapasitas lokal, program pelatihan/transfer teknologi, 2) Program pemeliharaan fasilitas umum termasuk pemeliharaan prasarana jaringan air minum pedesaan, dan 3) Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai program-program apa yang dibutuhkan dan bersifat krusial bagi masyarakat lokal.

Karakteristik prasarana merupakan kondisi dan kinerja prasarana untuk dapat mendukung aktifitas masyarakat. Prasarana yang secara teknis sederhana misalnya pasca pembangunan jaringan perpipaan air minum pedesaan yang dapat dikelola dan dibiayai oleh komunitas masyarakat sendiri. Masyarakat akan berperan serta untuk memelihara dan mengelola prasarana yang telah dibangun bila mereka mendapat mamfaat langsung dari prasarana tersebut atau berhubungan dengan kinerja prasarana. (Ndraha, 1990:105)

Prasarana lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan memberikan pengaruh positif pada manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat merangsang tumbuhnya rasa ikut memiliki yang pada akhirnya akan tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan

hasil-hasil pembangunan berupa perbaikan/ pemeliharaan (Yudhohusodo dkk, 1991:148)

Menurut Chougill, 1996 memberikan pendekatan berupa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan prasarana, yang disarikan dari kajian teoritis dan pengalaman beberapa negara. Dalam perdekataannya adanya keterkaitan antara peran atau intervensi pemerintah, khususnya pemerintah lokal dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan prasarana. Hal ini menguatkan konsep keberlanjutan yang tidak bisa melepaskan pendekatan partisipasi masyarakat di dalamnya dengan bantuan pemerintah dan pihak ketiga (*fasilitator*).

Adapun prinsip-prinsip yang diutarakan oleh Chougill ada sepuluh yaitu : 1) Harus disadari bahwa dalam pengelolaan prasarana terdapat dua sektor yakni formal dan non formal, 2) Bahwa dalam pengelolaan prasarana memerlukan teknologi yang mampu dioperasionalkan oleh pengelolanya sendiri (masyarakat) dan menggunakan prinsip *cost recovery*, 3) Status tanah menjadi masalah yang harus bisa diselesaikan dengan supaya tidak memberikan dampak yang merugikan terhadap sistem perkotaan, 4) Prasarana informal harus didesain dan dibangun dengan bantuan teknis dari luar sehingga dapat disatukan dalam sistem perkotaan, yang harus disadari memerlukan waktu yang lama, 5) Pengelolaan prasarana dan sarana harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pembangunan, operasional serta pemeliharaan. Keterlibatan pemerintah dan pihak ketiga (*fasilitator*) hanya sebagai *supporter* bukan lagi sebagai pemilik dan manager dari suatu kegiatan pembangunan, 6) Teknologi yang dipilih harus mampu dioperasionalkan dan dipelihara sendiri oleh masyarakat, 7) Prasarana harus mampu melayani pengguna dengan tingkatan pendapatan yang rendah (miskin), 8) Prasarana yang dibangun harus diterima secara sosial oleh masyarakat lokal/setempat, 9) Peningkatan peran pemerintah sebagai *enabler* dan *fasilitator* dalam pembangunan prasarana diperlukan untuk mencapai cakupan layanan prasarana yang lebih luas, dan 10) Organisasi non pemerintah (LSM) dapat lebih berperan/terlibat dalam membantu pemberdayaan masyarakat sehingga implementasi pembangunan berbasis partisipasi lebih diterima sebagai pendekatan pembangunan terkini.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, khususnya pembangunan prasarana dasar dengan pendekatan partisipatif ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor

yang utama tentu saja adalah faktor komponen masyarakat sendiri, faktor lain yang berpengaruh adalah keterlibatan pihak ketiga sebagai *fasilitator* (pendamping). Untuk itu diperlukan peran *fasilitator* dalam upaya pemberdayaan sehingga masyarakat mampu merumuskan masalah, membuat rencana, serta mengorganisasikan komunitasnya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan dengan mengintegrasikan segenap sumber daya yang dimilikinya. Selain faktor tersebut mekanisme pelaksanaan program juga sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari program pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif.

Sesuai dengan pengertian pengelolaan oleh masyarakat sebagai bagian siklus pembangunan partisipatif, maka masyarakat harus mampu memberikan pengaruh yang kuat serta mengontrol dalam mekanisme pelaksanaan pembangunan. Untuk itu adanya pilihan teknologi dan tingkat layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat menjadi prasyarat utama dalam keberlanjutannya. Hal ini bisa diterjemahkan juga sebagai faktor karakteristik program/proyek yang dilaksanakan.

Prasarana yang bersifat sederhana dalam hal teknis perencanaan dan penanganannya serta dalam skala kecil dapat dikembangkan oleh organisasi masyarakat lokal (Lanti dalam Sigh, et.al, 1997:100). Karakteristik prasarana menentukan kondisi dan kinerja prasarana untuk mendukung aktifitas kehidupan masyarakat. Masyarakat pada akhirnya akan berperan serta dalam memelihara dan mengelola prasarana yang telah dibangun bila masyarakat tadi mendapat manfaat langsung dari prasarana dimaksud, yang mana dalam hal ini berhubungan dengan kinerjanya (Ndara, 1990:105)

Untuk mengetahui sejauh mana peran partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan diperlukan suatu tolok ukur/tingkatan efektifitas dari partisipasi itu sendiri. Efektifitas menurut Drucker, 1974 (dalam Elmi Kurniarto W, 2007:33) yaitu suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran empiris suatu sistem dengan keluaran (*output*) yang diharapkan. Dengan mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka akan diketahui sejauh mana peran masyarakat dalam melakukan kontrol dan seberapa besar pengaruh intervensi pemerintah dalam pendekatan pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Loekman Soetrisno, 1995:26 Kanisius Menuju Masyarakat Partisipatif, bahwa kecenderungan pembangunan nasional yang menjadikan salah satu prasyarat utama yaitu dengan partisipasi masyarakat. Kemauan pemerintah dalam memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu langkah maju, akan tetapi dalam aplikasi dilapangan masih cukup banyak ditemukan permasalahan maupun hambatan yaitu:

1. Hambatan pertama, belum dipahaminya makna sebenarnya dari konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Defenisi partisipasi yang berlaku di kalangan pihak perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Kenyataannya para perencana dan pelaksana menggunakan konsep hierarkis dalam menyeleksi proyek pembangunan di pedesaan, sehingga proyek-proyek pedesaan yang berasal dari pemerintah diistilahkan sebagai proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat, sedangkan proyek yang diusulkan masyarakat desa dianggap sebagai keinginan. Karena merupakan suatu kebutuhan maka proyek pemerintah tersebut harus dilaksanakan, sedangkan proyek yang diusulkan oleh masyarakat hanya berupa keinginan maka proyek itu pun memperoleh prioritas yang rendah.
2. Hambatan kedua, reaksi balik yang datang dari masyarakat sebagai akibat dari diperlakukannya pembangunan sebagai ideologi baru di negara kita. Sebagai ideologi maka pembangunan harus diamankan dan dijaga dengan ketat. Persepsi seperti ini mendukung asumsi bahwa subsistem adalah suatu *subordinate* dari *suprasistem* dan membuat subsistem menjadi bagian yang benar-benar pasif. Pengamanan yang ketat terhadap pembangunan menimbulkan reaksi balik dari masyarakat yang merugikan usaha membangkitkan kemauan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dari kedua hambatan diatas, maka diharapkan kesimpulan yaitu: 1) Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan, 2) Untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi rakyat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan dalam persepsi pemerintah terhadap pembangunan. Pembangunan haruslah dianggap sebagai suatu kewajiban moral dari seluruh bangsa ini, bukan suatu ideologi baru yang harus diamankan, dan 3) Untuk membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan diperlukan sikap toleransi dari

aparap pemerintah terhadap kritik, pikiran alternatif yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari dinamika pembangunan itu sendiri, karena kritik dan pikiran alternatif itu sendiri merupakan suatu bentuk partisipasi rakyat dalam pembangunan.

2.1.4 Wujud Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap operasional hasil pembangunan tersebut (Slamet 1993 dalam Elmy Kurnianto W, 2007:47). Sedangkan wujud atau bentuk partisipasi masyarakat, menurut Keith Davis (dalam Sastropoetro, 1988:18) dapat berkontribusi dalam bentuk: 1) Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa, 2) Sumbangan ponan dalam bentuk barang atau uang, 3) Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari tetapi donornya dari pihak ketiga, 4) Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari serta dibiayai sendiri, 5) Sumbangan dalam bentuk tenaga kerja, 6) Aksi massa, 7) Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga, dan 8) Membangun proyek masyarakat yang sifatnya otonomi.

Adapun jenis-jenis peran serta masyarakat menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1988:16) meliputi: a) Pikiran (*psycological participation*), b) Tenaga (*physical participation*), c) Pikiran dan tenaga (*psycological and physical participation*), keahlian (*participation with skill*), e) Barang (*material participation*), dan f) Uang (*money participation*).

Dalam konteks pengelolaan prasarana, partisipasi masyarakat lebih mengutamakan berupa proses dan bukan hasil akhir, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, peran serta dapat dilakukan oleh pihak lain dan lebih mementingkan aspek kesediaan atau kerelaan masyarakat itu sendiri (Schumbeler, 1996:32). Perwujudan atau bentuk partisipasi dalam pengelolaan prasarana dalam berbagai pandangan dapat dikategorikan dalam dua bentuk kontribusi yaitu : 1) Bentuk sumbangan berupa material, uang, tenaga dan pikiran, 2) Bentuk kegiatan yaitu partisipasi yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing dan peran serta yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat atau diserahkan pada pihak lain. Selain itu bentuk peran dapat dilihat dari intensitas dan frekuensi kegiatan serta derajat kesukarelaan untuk melakukan kegiatan partisipatif secara bersama.

Bentuk partisipasi lain yang lebih lengkap dikemukakan oleh Bryan dan White dalam Ndraha (1983:17) dimana disamping ada partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan juga terdapat partisipasi pemanfaatan suatu proyek.

Selanjutnya dikatakan Bryan dan White dalam Ndara (1983:23) partisipasi dapat berbentuk: 1) partisipasi buah pikiran; 2) partisipasi harta dan uang; 3) partisipasi tenaga atau gotong-royong; 4) partisipasi sosial; dan 5) partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten.

2.1.5 Faktor Internal yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Didalam pembangunan prasarana dasar permukiman tingkat keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat setempat. Secara teoritis semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman maka akan semakin cepat pula pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan prasarana dasarnya. Dengan demikian semakin tinggi potensi/kekuatan internal yang dimiliki masyarakat maka akan semakin mempercepat proses pelaksanaan pembangunannya. Kemampuan individu dengan sendirinya akan sangat berpengaruh terhadap bentuk-bentuk keterlibatannya dalam pembangunan prasarana dasar. Faktor-faktor internal yang akan mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan mata pencaharian (Slamet 1993:97).

a. Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem lapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Menurut Soedarno (1992), mengatakan bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya kelompok pria akan lebih banyak ikut dalam berpartisipasi.

b. Usia

Faktor usia memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Penemuan menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia dengan keanggotaan seseorang untuk ikut dalam suatu kelompok atau organisasi. Selain itu beberapa fakta menunjukkan bahwa usia sangat berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berperan serta (Slamet, 1994:142).

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi kemampuan penduduk dalam program penataan lingkungan permukiman. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan dapat ikut berperan pada tahap perencanaan sampai tahap pengembangan, sementara penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah akan dapat berperan pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan. Dengan pendidikan yang semakin tinggi, seseorang akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, cepat tanggap dan inovatif.

d. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Baross (dalam Suparlan, 1993:122) menyatakan bahwa banyak hal tampak bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk termiskin melakukan kebanyakan pekerjaan dan tidak berkontribusi uang, sementara buruh yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.

e. Jenis Pekerjaan

Pekerjaan sangat berkaitan dengan tingkat penghasilan masyarakat. Jenis pekerjaan akan sangat berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu (Slamet, 1994:115-116). Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya. Budihardjo (1991:113) menyatakan bahwa banyak warga yang telah disibukkan oleh kegiatan sehari-hari kurang tertarik untuk mengikuti pertemuan, diskusi atau seminar.

2.2 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

2.2.1 Kebijakan dan Strategi Nasional tentang SPAM

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan peraturan lainnya serta skenario pengembangan SPAM, sasaran dari kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) melalui perpipaan dan non-perpipaan terlindungi, antara lain sebagai berikut: 1) Twujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui sistem perpipaan yang semula 18% pada tahun 2004 menjadi 32% pada tahun 2009 dan selanjutnya meningkat

menjadi 60% pada tahun 2015, 2) Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat kehilangan air direncanakan hingga pada angka 20% dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam dunia usaha, 3) Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum dengan sistem non-perpipaan terlindungi pada tahun 2004 sebesar 37,47% menjadi 33% pada tahun 2009 dan 20% pada tahun 2015, sehingga persentase penggunaan SPAM melalui sistem non-perpipaan tidak terlindungi semakin menurun dari tahun ke tahun, 4) Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik SPAM. Pemerintah dapat memberikan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebesar 60 L/o/h yang di butuhkan secara bertahap, bantuan pemerintah diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin, dan 5) Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan.

2.2.2 Pengertian SPAM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pasal 1 menyebutkan pengertian :

1. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum
2. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
4. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
5. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) da- lam

kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

6. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.

2.2.3 Pengelolaan SPAM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bab V menyebutkan pengertian:

1. Pengelolaan SPAM dilaksanakan apabila prasarana dan sarana SPAM yang telah terbangun siap untuk dioperasikan dengan membentuk organisasi penyelenggara SPAM.
2. Pengelolaan SPAM meliputi: a) Kegiatan pengoperasian dan pemanfaatan dan b) Kegiatan administrasi dan kelembagaan.

2.2.4 Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bab VI menyebutkan pengertian: 1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM adalah tanggung jawab penyelenggara, 2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM dilaksanakan setelah prasarana dan sarana air minum siap beroperasi, dan 3) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM meliputi pemeliharaan terhadap unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

2.2.5 DAK Infrastruktur Subbidang Air Minum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknik Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Prioritas nasional subbidang air minum dan sanitasi memberi akses pelayanan sistem penyediaan air minum (SPAM) kepada masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan kawasan kumuh perkotaan termasuk daerah pesisir dan permukiman nelayan. Kriteria teknis untuk prasarana air minum dengan mempertimbangkan: 1) Desa dan kelurahan rawan air minum, 2) Jumlah penduduk desa/kelurahan berpenghasilan rendah (20% dari total

penduduk), 3) Luas kawasan kumuh perkotaan (2 Ha), 4) Kinerja pelaporan DAK subbidang air minum Kabupaten/Kota, dan 5) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Cakupan kegiatan diutamakan untuk kegiatan optimalisasi dan pembangunan baru sistem penyediaan air minum bagi masyarakat yang rawan air minum dan kekeringan. Skala pelayanan SPAM minimal skala komunal (namun bukan individu) dan daerah pelayanan berada diluar jaringan (sistem) PDAM. Teknologi unit SPAM diutamakan menggunakan teknologi sederhana sehingga mampu digunakan oleh masyarakat. Khusus untuk kawasan di lokasi tersebut memungkinkan dilayani PDAM maka pengembangan air minum sederhana tersebut harus menggunakan sumber pipa dari PDAM jika masih ada sisa kapasitas yang didukung pernyataan dari pihak PDAM.

I. Perencanaan dan Pemograman:

1. Penyusunan daftar fasilitas SPAM :

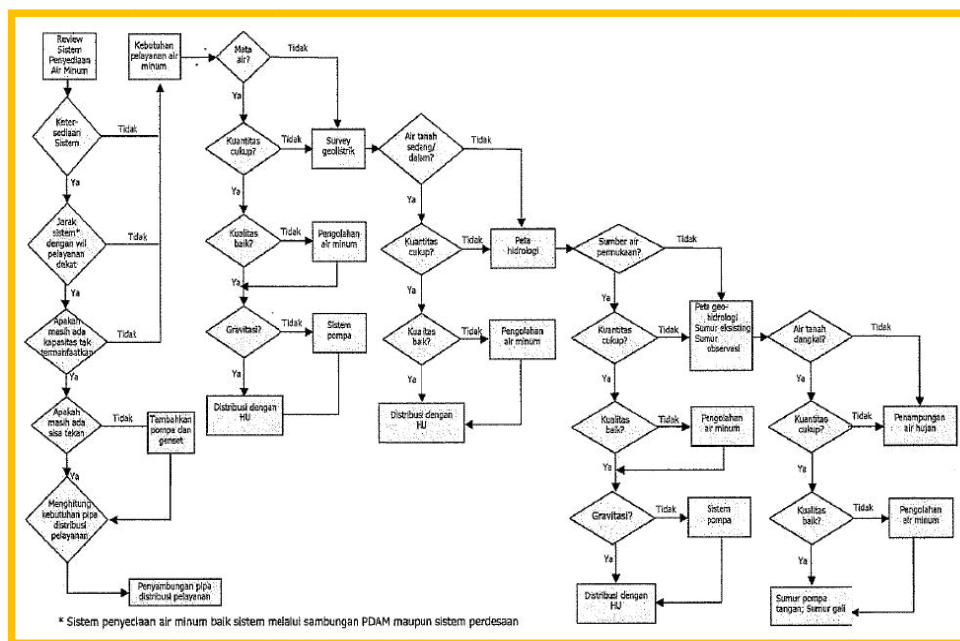
- a. Identifikasi jenis SPAM berdasarkan sumber air baku: 1) Mata air seperti Perlindungan Mata Air (PMA), 2) Air tanah, 3) Air permukaan, paket instalasi pengolahan air (IPA), pompa hidran, saringan pipa resapan, dan 4) Air hujan.
- b. Identifikasi berupa kelengkapan SPAM: 1) Unit distribusi perpipaan, 2) Perpompaan untuk sistem dengan topografi dimana wilayah pelayanan lebih tinggi dari unit produksi, dan 3) Hidran umum dan sambungan rumah murah.

2. Penyusunan usulan program prioritas

Identifikasi daerah yang belum memiliki fasilitas SPAM dengan membuat program pembangunan fasilitas SPAM baru dengan kriterianya daerah rawan air, daerah rawan penyakit, rawan sanitasi, daerah miskin, aksesibilitas, daerah terpencil, dan jarak dengan sumber air.

3. Penentuan Program

Penentuan program (pembangunan baru) didasarkan pada pertimbangan bahwa teknologi yang diterapkan harus sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang ada di lokasi. Proses seleksi program pengembangan air minum sesuai diagram alir pada Gambar II.2



Sumber : Departemen PU, 2007

GAMBAR 2.1

**PROSES SELEKSI KEGIATAN DAN PEMILIHAN
INFRASTRUKTUR AIR MINUM SEDERHANA**

II. Perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi

Penentuan kebutuhan air pada suatu wilayah pelayanan ditentukan oleh dua parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air. Pemeriksaan kualitas air baku harus mengacu pada Kepmenkes RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 menyebutkan bahwa kualitas air ditinjau dengan parameter bau, rasa, kekeruhan, dan warna. Metoda pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan swakelola dan kontraktual dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Manajemen Pengelolaan

2.3.1 Lesson learn Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan

Program keberlanjutan pengelolaan sistem penyediaan air minum sangat erat kaitannya dalam keberadaan kelembagaan yang ada di masyarakat (sumber pokja AMPL edisi I, 2008). Aspek-aspek yang sangat penting dalam kelembagaan tersebut adalah:

1. Pembentukan badan pengelola, badan ini dibentuk ketika kelembagaan eksisting ada tidak mempunyai kapasitas dalam pengelolaan. Pembentukan badan pengelolaan ini merupakan bagian penting dari proses masyarakat dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum pedesaan. Badan pengelola inilah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum pedesaan ini. Seperti halnya di desa Singasari Kabupaten Banyumas dimana kebutuhan akan badan pengelola dipicu oleh konflik masyarakat setempat terkait pembagian air.
2. Pemanfaatan badan/kelompok masyarakat eksisting, pemanfaatan badan yang ada di masyarakat dikarenakan adanya kompetensi badan yang ada dalam pengelolaan. Ataupun pembentukan badan pengelola di bawah lembaga eksisting yang ada di masyarakat. Contohnya adanya pokja AMPL Kabupaten Pekalongan dalam pengelolaan DAK AMPL. Pokja ini bekerja dikoordinasikan oleh Bappeda, keterlibatan pokja ini mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan. Keterlibatan pokja AMPL dalam pelaksanaan DAK AMPL dikarenakan sumber dana adalah dari APBN pemerintah pusat yang hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan fisik saja, sehingga dana operasional pokja AMPL ini dianggarkan lewat dana APBD Kabupaten Pekalongan.
3. Penguatan kapasitas badan pengelola, merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan pada setiap program dan kegiatan sistem penyediaan air minum pedesaan. Manajemen badan pengelola perlu pembinaan antara lain siapa melakukan apa, kapan dan bagaimana. Lain halnya dengan program yang diinisiasi oleh pihak luar, maka badan pengelola program/kegiatan akan mendapat pendampingan baik berupa pelatihan teknis, administrasi, maupun supervisi sejak perencanaan sampai dengan pasca konstruksi, bahkan ada pada beberapa daerah pendampingan berlangsung secara berkala setelah tahap pembangunan.
4. Regenerasi, ini merupakan isu penting dalam kelembagaan badan pengelola karena pada dasarnya semua lembaga hanyalah sebagai wadah dan alat saja. Tokoh-tokoh yang berada pada badan pengelola ini yang mempunyai peran terlalu kuat akan berdampak negatif dalam keberlanjutan pengelolaan program. Beberapa lembaga mencoba mengatasi dengan penetapan struktur organisasi dan pembagian kerja yang jelas, sehingga kewenangan tidak terkonsentrasi pada satu orang. Disamping itu, sebagai bagian dari proses regenerasi maka sebagian pengurus direkrut dari pemuda

desa. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Cibodas Kabupaten Bandung yang telah terbukti mengelola sarana dengan baik selama 18 tahun.

5. Kemitraan, merupakan aspek penting dikarenakan oleh tiga hal yaitu: a) Suatu badan dapat mengelola secara efektif dan efisien jika beban yang ditanggung sesuai dengan kapasitasnya, b) Program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan memerlukan adanya keterpaduan pelaksanaan antar lembaga yang terlibat, dan c) Kebutuhan dana dalam pelaksanaan suatu program.

2.3.2 Manajemen Pengelolaan SPAM DAK Infrastruktur

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42 Tahun 2007 petunjuk teknis DAK infrastruktur subbidang air minum menyebutkan bahwa untuk menjaga keberlanjutan program SPAM sederhana pasca pembangunan, maka perlu dibentuk lembaga di tingkat masyarakat sebagai penyelenggara SPAM. Lembaga ini selain berupa legislatif juga sebagai lembaga pengelola dan pemelihara SPAM tersebut. Untuk dapat menciptakan mekanisme pengelolaan yang bertumpu pada masyarakat, khususnya sektor air minum, penyelenggaraan pengelolaan prasarana air minum terbangun dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat Setempat-Air Minum (OMS-AM), koperasi air minum, dan kelompok pengguna dan pemanfaat (KP2) air minum diuraikan berikut ini :

1. Kelembagaan

Organisasi Masyarakat Setempat-Air Minum (OMS-AM) adalah organisasi masyarakat sebagai lembaga legislatif dari suatu wilayah pelayanan air minum dan merupakan nama generik dari lembaga di tingkat masyarakat, yang merupakan forum demokrasi dan wadah pengambilan proses keputusan tertinggi yang mencerminkan aspirasi masyarakat pengguna air minum.

Koperasi Air Minum :

Koperasi Air Minum merupakan bentuk lain dari OMS-AM, namun bentuk perkoperasian ini diatur dengan UU No.25 tahun 1995. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air minum (KP2-AM)

Adalah merupakan badan pelaksana dan pengelola air minum yang anggotanya ditunjuk oleh OMS-AM atau Koperasi Air Minum, yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan air minum.

2. Prinsip Dasar dan Aspek Pengelolaan berbasis masyarakat

Dalam upaya pemanfaatan prasarana dan sarana air mium yang berkelanjutan diciptakan mekanisme pengelolaan berbasis masyarakat, yaitu pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, perlu dipahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan, aspek pengelo- laannya, aspek hukum dan lainnya.

3. Penetapan Besaran luran Pengguna Air

Lembaga pengelola mengadakan rembug warga untuk menentukan besarnya harga air minum per m³ atau per jerigen yang harus dibayar oleh masyarakat untuk keperluan antara lain : a) Membayar harga air minum, b) Insentif kepada petugas pengelola sesuai kesepakatan, c) Insentif kepada pemilik tanah (bila diperlukan), d) Biaya operasi dan pemeliharaan prasarana, dan e) Kontribusi desa (bila diperlukan). Besarnya harga air minum tersebut harus lebih murah dari harga air yang harus dibayar sebelum dilaksanakannya pengembangan SPAM tersebut.

Didalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan disebutkan bahwa pengertian dari pengelolaan adalah meliputi kegiatan operasi dan pemeliharaan. Operasi berarti pemanfaatan atau mendayagunakan prasarana dan sarana dasar di lingkungan permukiman yang dibangun untuk menghasilkan pelayanan berupa jasa atau barang. Sedangkan pemeliharaan mengandung pengertian usaha mempertahankan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang dibangun agar dapat tetap berfungsi pada tingkatan pelayanan yang sesuai dengan tujuan dan rencana pembangunan prasarana dan sarana lingkungan permukiman tersebut.

Didalam pengelolaan prasarana lingkungan permukiman ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan agar pengoperasian prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang telah berfungsi tersebut berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1) Dari hasil pembangunan prasarana dan sarana lingkungan permukiman tersebut, perlu dilakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan besar agar

didapatkan manfaat yang optimal, 2) Untuk melakukan pemeliharaan ini diperlukan koordinasi dan keterpaduan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman antar instansi terkait, 3) Perlu dibentuk badan atau lembaga pengelola prasarana dan sarana di lingkungan permukiman, dan 4) Lembaga pengelola, mengkoordinasikan, atau memadukan kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan didalam perencanaan.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa peningkatan dan pengelolaan prasarana dapat diartikan sebagai suatu upaya atau usaha ke arah yang lebih baik di dalam pengaturan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang ada disuatu lingkungan permukiman.

2.4 Rangkuman Kajian Literatur

Pelaksanaan pembangunan hanya dapat berhasil dengan baik apabila mendapat dukungan masyarakat. Dukungan dan partisipasi masyarakat dapat dibangkitkan bila masyarakat menyakini bahwa pembangunan ini sejalan dengan aspirasinya. Untuk itu rasa memiliki dan keterlibatan (*sense of belonging*) harus benar-benar ditumbuhkan di masyarakat (Sujamto, 1997:118). Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya gotong-royong merupakan modal utama untuk kelangsungan pembangunan nasional.

Untuk tujuan penelitian ini maka sasaran penelitian harus terpenuhi pula sehingga diagram akan digambarkan sistematis dalam pencapaian tujuan yaitu sebagai berikut (Gambar 2.2) :



Sumber : Hasil Olahan, 2009

GAMBAR 2.2

PROSES PENCAPAIAN TUJUAN PENELITIAN

Konteks masyarakat dalam dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan ini terdapat empat variabel yaitu data karakteristik masyarakat pedesaan, bentuk peran serta masyarakat, aspek teknis sistem penyediaan air minum (SPAM) dan manajemen pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan. Variabel dan indikator pengelolaan SPAM dapat dilihat dalam Tabel II.1 berikut ini.

TABEL II.1
VARIABEL DAN INDIKATOR
PENGELOLAAN SPAM PEDESAAN

VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR
Karakteristik Masyarakat	Aspek geografis	Data geografi, topografi, luas wilayah
	Penduduk	Jumlah penghuni/KK
	Kondisi Perekonomian	Mata pencaharian, penghasilan, pengeluaran
	Kondisi sosial	Status kepemilikan tanah dan bangunan
	Pendidikan	Tingkat pendidikan masyarakat
Bentuk Peran Serta Masyarakat	Pikiran	Keikutsertaan dalam rapat-rapat
	Tenaga	Pembangunan SPAM, Kerja bakti
	Barang/material	Sumbangan material
	Dana	Sumbangan dalam bentuk dana
Aspek Teknis SPAM	Sumber air baku	Jarak ke permukiman
	Lokasi	Lokasi bangunan SPAM
	Manfaat	Manfaat SPAM
	Cakupan pelayanan	Persentasi pelayanan
	Bangunan SPAM	Rumah mesin, Jaringan pipa, Genset, pompa sentrifugal dan hidran umum
Manajemen Pengelolaan SPAM	Badan pengelola	Badan pengelola SPAM pedesaan
	Koperasi air minum	Pengelolaan berada pada koperasi
	Kelompok Pengguna dan pemanfaat air minum (KP2-AM)	Forum masyarakat pengguna dan pemanfaat air

	Lembaga eksisting	Lembaga yang ada di masyarakat
	Biaya operasional dan pemeliharaan	Biaya pengeluaran operasional dan pemeliharaan SPAM
	Iuran	Jumlah besaran iuran masyarakat Kemampuan membayar masyarakat

Sumber : Hasil analisis, 2009

BAB III

GAMBARAN UMUM

KAWASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PEDESAAN DI DESA WURAN DAN TARINSING

3.1 Kondisi Fisik Wilayah

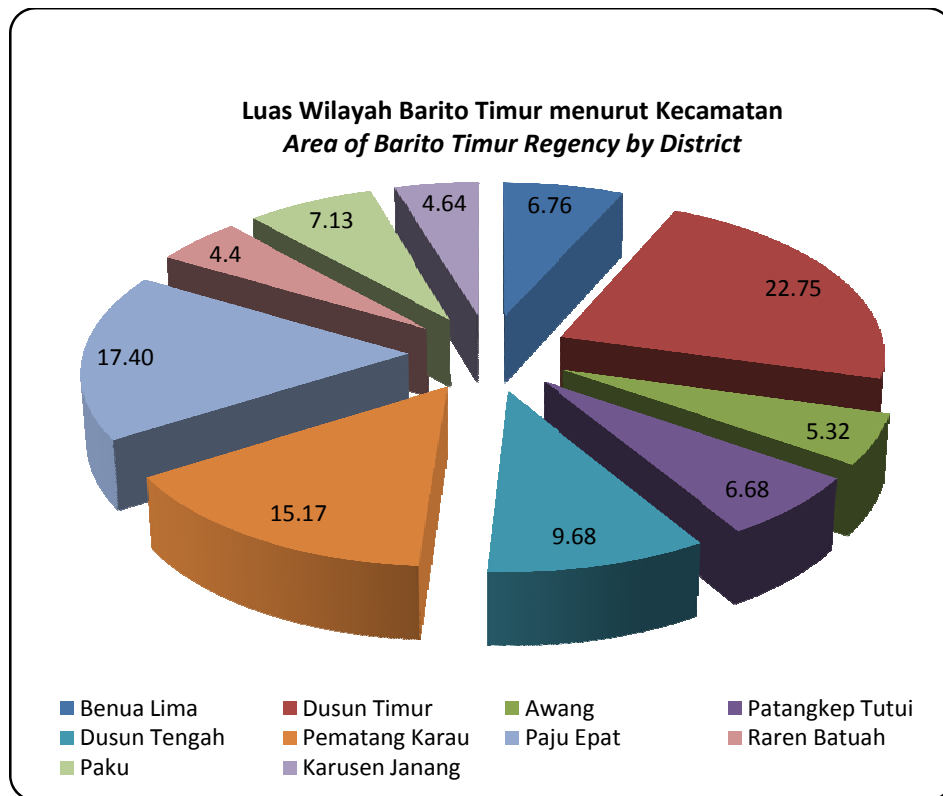
Kabupaten Barito Timur dengan ibukota Tamiang Layang dengan luas wilayah kurang lebih 3.834 km² yang meliputi 10 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Dusun Timur, Dusun Tengah, Patangkep Tutui, Awang, Pematang Karau, Benua Lima, Paju Epat, Raren Batuah, Paku, dan Karusen Janang dengan 102 desa dan 3 kelurahan.

Wilayah Kabupaten Barito Timur mempunyai kedudukan yang cukup strategis dalam pengembangan perwilayahan Propinsi Kalimantan Tengah khususnya wilayah timur (Kawasan Barito) yaitu merupakan akses keluar/pintu masuk ke dan dari Kalimantan Selatan, dilalui jalur-jalur yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah seperti ke Buntok, Muara Teweh, dan Purug Cahu. Disamping itu, Kabupaten Barito Timur mempunyai kemudahan akses transportasi Sungai Barito dengan adanya pelabuhan Telang Baru yang melayani angkutan batubara.

Desa Wuram merupakan bagian dari kecamatan Karusen Janang yang mempunyai jumlah penduduk 250 jiwa dan pada umum masyarakat hidup dari pertanian/perkebunan karet rakyat. Desa Tarinsing merupakan bagian dari kecamatan Paku yang baru pemekaran dari kecamatan induk kecamatan Dusun Tengah, jumlah penduduk 132 jiwa serta mata pencaharian masyarakat pada umumnya sebagai petani kebun karet.

3.2 Kondisi Geografi

Kabupaten Barito Timur terletak pada posisi terletak antara 1°2' Lintang Utara dan 2°5' Lintang Selatan, 114° dan 115° Bujur Timur dengan luas wilayah 3.834 km². Diapit oleh Kabupaten tetangga yaitu di sebelah Utara dengan sebagian wilayah Kabupaten Barito Selatan, di sebelah Timur dengan sebagian Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, di Selatan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Propinsi Kalimantan Selatan dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Barito Selatan. Secara umum wilayah Barito Timur memiliki bentangan wilayah bervariasi, dataran, berbukit dan juga ada yang dilalui aliran sungai. Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Timur merupakan dataran rendah, ketinggiannya berkisar antara 50 s/d 100 meter dari permukaan air laut. Kecuali sebagian wilayah Kecamatan Awang dan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan.



Sumber: BPS Kab.Bartim, 2009

GAMBAR 3.1
LUAS WILAYAH BARITO TIMUR MENURUT KECAMATAN

3.3 Kebijakan Pengembangan Kawasan

Untuk mewujudkan moto/semboyan Kabupaten Barito Timur yaitu "Gumi Jari Janang Kalalawah" maka program dan kegiatan indikatif pembangunan daerah Kota Tamiang Layang yang dilaksanakan adalah mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pembangunan yang tidak memperhatikan daya lingkungan dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Dampak kerusakan lingkungan yang lain adalah pencemaran udara, air dan tanah. Pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan, terutama dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang melalui penyebaran informasi, penyebaran *leaflet* mekanisme perijinan, dan pemberian penjelasan kepada masyarakat. Dokumen rencana tata ruang yang lebih detail dalam bentuk RTRK/RTBL belum mencakup seluruh kawasan, masih terbatas pada kawasan kota, sehingga beberapa kawasan strategis lainnya perlu disusun RTRK/RTBL.

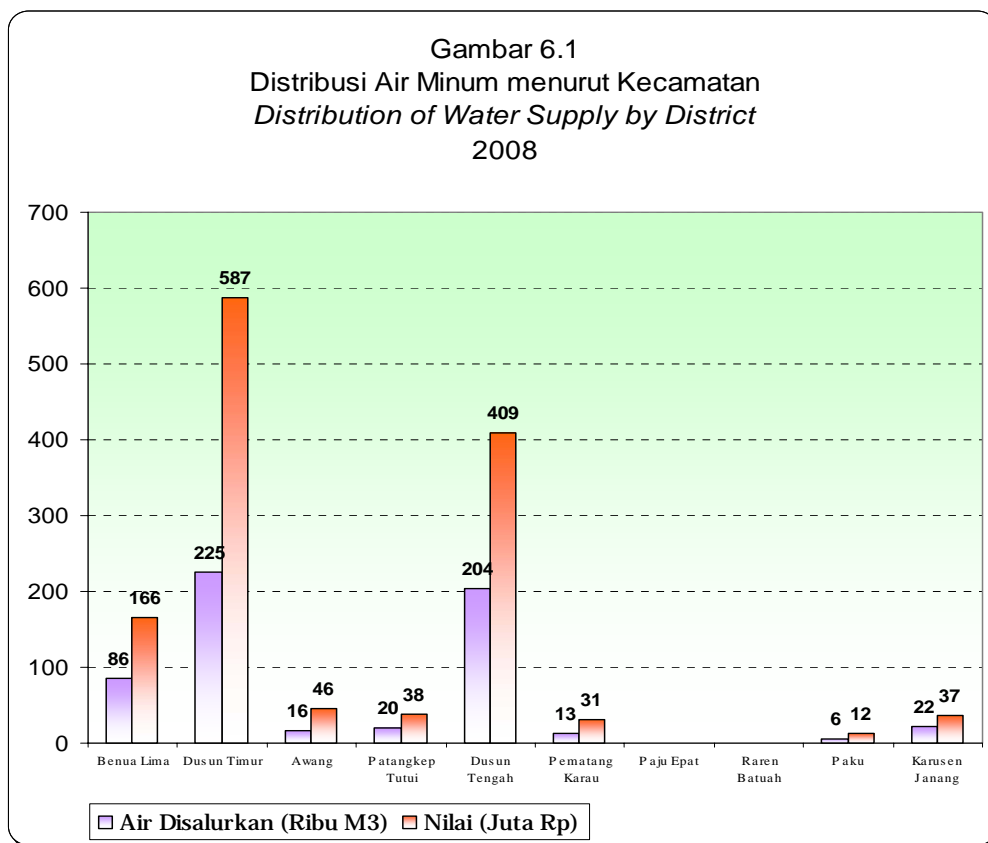
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan penataan ruang telah dikembangkan sistem informasi tata ruang (UDMIS) yang masih membutuhkan usaha-usaha peningkatan kualitas. Rencana RTRW dan RDTR tiap-tiap Bagian Wilayah Kota Tamiang Layang dengan periode Tahun 2000 sampai Tahun 2010, sehingga pada Tahun 2005 – 2010 perlu dilaksanakan kegiatan review terhadap RTRW dan RDTR dalam rangka mempersiapkan dokumen RTRW dan RDTR untuk periode Tahun 2010 – 2020.

Berdasarkan perkembangan persebaran penduduk Kota Tamiang Layang dimungkinkan terjadi upaya-upaya pemanfaatan lahan yang dulunya menjadi area konservasi. Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah memberikan arahan pengembangan kawasan permukiman kedalam beberapa kawasan.

PETA BARTIM

3.4 Distribusi Air Minum Kabupaten Barito Timur

Distribusi pemakaian air minum di Kabupaten Barito Timur per kecamatan seperti terlihat pada Gambar III.3. Tinggi - rendahnya pemakaian air minum (air bersih) masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Adanya peningkatan pemakaian banyaknya air minum yang disalurkan kepada masyarakat adalah menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat di Barito Timur. Untuk tahun 2008 pada Kecamatan Karusen Janang untuk tingkat pelayanan distribusi air minum sekitar 22.000 m³ dan Kecamatan Paku hanya sekitar 8.000 m³.



Sumber BPS Kab.Bartim, 2009

GAMBAR 3.3

DISTRIBUSI AIR MINUM KAB. BARITO TIMUR

3.5 Ruang Lingkup Wilayah Studi Penelitian

3.5.1 Desa Wuran

Kecamatan Karusen Janang merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Dusun Tengan yang terdiri dari 7 buah desa. Salah satu desanya yang merupakan lokasi penelitian adalah Desa Wuran dengan jumlah penduduk sebesar 1.982 jiwa dengan 289 KK. Data kependudukan dan luas wilayah Kecamatan Karusen Jarang seperti pada Tabel III.1.

TABEL III.1
DATA PENDUDUK LUAS WILAYAH
KEC. KARUSEN JANANG

No.	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	4.669
2	Jumlah rumah tangga	1.196
3	Jumlah Laki-laki	2.354
4	Jumlah Perempuan	2.315
5	Luas wilayah	178 km ²
6	Kepadatan	26,23 /km ²

Sumber : BPS, 2009

Jarak antara desa Wuran dengan ibukota kecamatan sekitar 9 km dengan kondisi jalan sebagian beraspal, sirtu dan *telport*. Desa Wuran terdiri dari 9 RT dengan total 362 KK, kemudian terbagi lagi dalam 3 kelompok wilayah/kampung yang jaraknya agak berjauhan yaitu kampung Wuran RT 1,2 terdiri 83 KK, RT 3-5 Trans 100 dan RT 6-9 Trans 200. Akan tetapi yang menjadi objek wilayah studi penelitian ini adalah kampung Wuran yang mendapatkan program sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan yaitu RT 1-2 dengan 83 KK. Peta Wilayah desa Wuran seperti terlihat pada Gambar 3.4

PETA WURAN

3.5.2 Desa Tarinsing

Kecamatan Paku merupakan pemekaran dari Kecamatan Dusun Tengah yang terdiri dari 12 buah desa. Salah satu desanya adalah Desa Tarinsing dengan jumlah penduduk sebesar 162 jiwa dengan 42 KK. Kemudian desa Tarinsing merupakan pemekaran dari desa Tampa. Data kependudukan dan luas wilayah Kecamatan Paku seperti pada Tabel III.2.

TABEL III.2
DATA PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH
KECAMATAN PAKU

No.	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	7.387
2	Jumlah rumah tangga	1.982
3	Jumlah Laki-laki	3.814
4	Jumlah Perempuan	3.573
5	Luas wilayah	272 km ²
6	Kepadatan	27,16 / km ²

Sumber : BPS, 2009

Jarak antara desa Tarinsing dengan ibukota kecamatan sekitar 7 km dengan kondisi jalan sebagian sirtu, tanah dan lapisan burtu. Peta wilayah desa Tarinsing seperti pada Gambar 3.5. Desa Tarinsing terdiri dari 3 RT dengan total 44 KK, kemudian terbagi lagi dalam 2 kelompok wilayah/kampung yang berdekatan yaitu RT 1,2 terdiri 27 KK dan RT 3 terdiri dari 17 KK yang agak berjauhan dan rumah penduduk menyebar. Akan tetapi yang menjadi objek wilayah studi penelitian ini adalah kampung yang mendapatkan program SPAM pedesaan yaitu RT 1-2 dengan 24 KK.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN PENGELOLAAN SPAM

4.1 Identifikasi Data Karakteristik Masyarakat

Kawasan pedesaan yang menjadi lokasi studi merupakan kawasan permukiman yang akan diidentifikasi tentang karakteristik masing-masing penghuni di desa Wurun dan Tarinsing. Dengan adanya identifikasi karakteristik ini, akan tergambar pola karakteristik yang ada di masyarakat kedua desa tersebut baik potensi yang ada terhadap kelangsungan pengelolaan SPAM.

Karakteristik masyarakat dalam analisis ini meliputi pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, jumlah anggota keluarga/KK, umur, luas tanah dan luas bangunan. Analisis karakteristik masyarakat pada desa Tarinsing dan desa Wurun ini menggunakan SPSS distribusi frekuensi kemudian digambarkan dalam diagram batang kemudian hubungan antara karakteristik dianalisis dengan alat *crosstabs* untuk mengetahui hubungan keterikatan signifikansi.

4.1.1 Tingkat Pendidikan

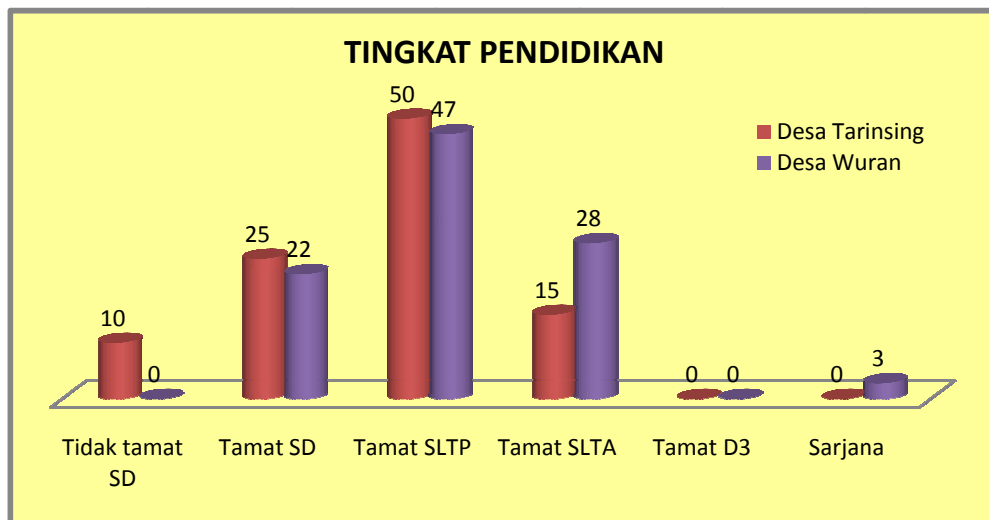
Tingkat pendidikan berpengaruh pada tingkat sosial ekonomi masyarakat maupun dalam hal memberikan penilaian dan pendapat tentang pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan. Berdasarkan hasil kuesioner pada Gambar 4.1 didapatkan pada desa Tarinsing bahwa tingkat pendidikan masyarakat terbesar adalah

tamat SLTP sebanyak 50%, tamat SD sebanyak 25%, tamat SLTA sebanyak 15%, tidak tamat SD sebanyak 10% kemudian tamat D3, dan sarjana 0%.

Kemudian desa Wuran bahwa tingkat pendidikan masyarakat terbesar adalah tamat SLTP sebanyak 47%, tamat SLTA sebanyak 28%, tamat SD sebanyak 22%, sarjana sebanyak 3% kemudian tidak tamat SD, dan tamat D3 sebanyak 0%.

Dari kondisi dua desa tersebut diatas bahwa pada desa Tarinsing tingkat pendidikan tertinggi adalah tamat SLTA, dan kebanyakan masyarakat berpendidikan tamat SLTP kemudian desa Wuran pendidikan tertinggi adalah sarjana dan kebanyakan masyarakat berpendidikan tamat SLTP.

Perbandingan pendidikan pada kedua desa, dari hasil diagram menggambarkan bahwa tidak tamat SD sampai dengan tamat SLTP di desa Tarinsing lebih tinggi dibanding desa Wuran, akan tetapi antara pendidikan tamat SLTP sampai ke tingkat sarjana, bahwa desa Wuran lebih tinggi dari desa Tarinsing.



Sumber : Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.1
TINGKAT PENDIDIKAN DESA TARINSING DAN WURAN

Dengan karakteristik pendidikan seperti diatas dimana tingkat pendidikan desa Wuran lebih tinggi dari desa Tarinsing seharusnya menggambarkan semakin tinggi tingkat pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kepedulian masyarakat kebutuhan-kebutuhan masyarakat termasuk kepedulian akan pengelolaan SPAM pedesaan. Tingkat pendidikan juga dalam kaitannya dengan pemanfaatan air untuk kebutuhan rumah

tangga sangat berpengaruh terhadap variasi dan jumlah air yang dimanfaatkan, selain itu juga tidak lepas dalam pemahaman masyarakat dalam mengkonsumsi air secara tepat dan efisien.

Tingkat pendidikan antara SMU sampai dengan Sarjana merupakan salah satu karakteristik golongan menengah (Hasil penelitian Pusat Penelitian Sosial Budaya Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang dalam Agustiningrum, 2004:42). Hal ini menyebabkan tuntutan dalam kualitas ketersediaan prasarana air minum akan sangat penting sejalan dengan tingkat pengetahuan mereka yang cukup tinggi.

4.1.2 Pekerjaan

Jenis pekerjaan masyarakat pada umumnya homogen pada Gambar 4.2 dengan rincian pada desa Tarinsing sebagai tani sebanyak 75%, wiraswasta sebanyak 15%, buruh sebanyak 10% kemudian PNS sebanyak 0%. Kemudian pada desa Wurun sebagai tani sebanyak 78%, wiraswasta sebanyak 22%, serta buruh dan PNS masing-masing sebanyak 0%.

Perbandingan pekerjaan dari hasil Gambar 4.2 tergambar bahwa pekerjaan sebagai buruh di desa Tarinsing lebih tinggi dibanding desa Wurun, akan tetapi untuk pekerjaan wiraswasta dan tani lebih mendominasi adalah desa Wurun. Adanya perbedaan pekerjaan buruh pada kedua desa, ini menggambarkan bahwa pada desa Tarinsing ada sebagian masyarakat hanya bekerja sebagai buruh tani atau sebagai tenaga upahan, akan tetapi di desa Wurun pekerjaan tani sebagai pemilik lahan pertanian.



Sumber : Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.2

PEKERJAAN

Akan tetapi gambaran pekerjaan dua desa tersebut diatas bahwa mata pencaharian utama masyarakat desa Tarinsing dan desa Wuran adalah homogen yang mayoritas sebagai petani karet di atas 75%. Pekerjaan utama masyarakat kedua desa seperti terlihat pada Gambar 4.3.

Pola pertanian karet masyarakat tersebut masih warisan turun temurun nenek moyang, pada umumnya jenis karet yang ditanam masyarakat adalah karet hutan, areal kebun karet ini tetap ditumbuhi oleh semak belukar, tidak seperti jenis pohon karet unggul yang harus dipupuk dan dibersihkan. Keunggulan jenis karet ini mempunyai umur masa produksi yang agak panjang dan tingkat perawatan yang rendah jika dibandingkan dengan karet unggul yang mempunyai umur masa produksi lebih rendah tetapi membutuhkan perawatan yang lebih tinggi. Pola kerja masyarakat menakik (*mantat*) karet pada umumnya adalah sekitar jam 4.00 subuh sampai dengan jam 10.00 pagi. Antara jam 10.00 pagi sampai malam, kebanyakan waktu masyarakat petani mengerjakan pekerjaan rumah. Secara umum masyarakat lokal (putra daerah) hanya mempunyai keahlian sebagai petani karet, dan untuk jenis pertanian lainnya seperti sayuran, palawija dikerjakan oleh masyarakat seperti pendatang (transmigrasi).

--	--	--



Sumber : Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.3

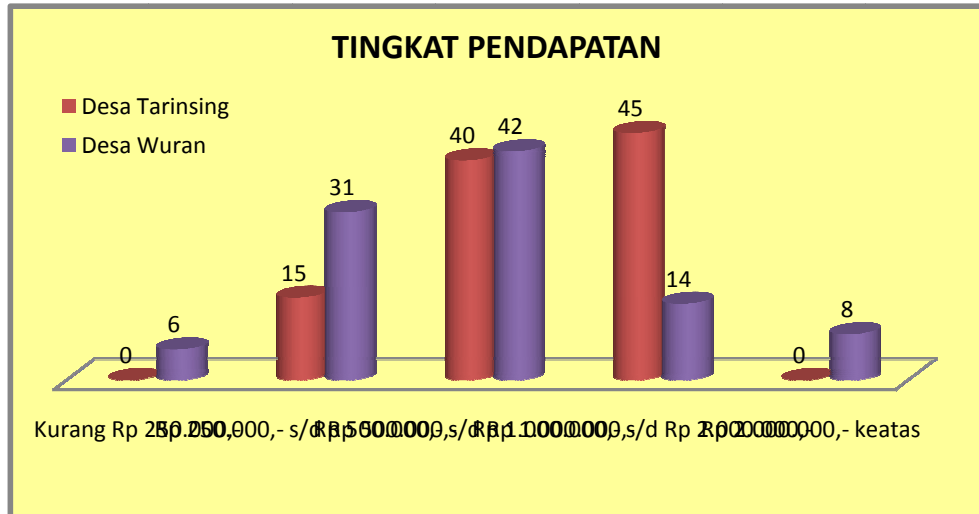
PEKERJAAN PETANI KARET

Dengan gambaran pekerjaan kedua desa tersebut, bahwa pekerjaan utamanya adalah sama-sama sebagai petani karet, hal ini mengartikan bahwa dengan tipe pekerjaan utamanya sama sebagai petani karet, akan tetapi SPAM di desa Tarinsing beroperasi dan SPAM di desa Wuran tidak beroperasi. Hal ini menandakan bahwa tipe pekerjaan yang sama antara kedua desa tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan pengelolaan SPAM.

4.1.3 Tingkat Pendapatan

Berdasarkan hasil kuesioner pada Gambar 4.4 didapatkan pada desa Tarinsing bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki pendapatan sebesar Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- sebanyak 45%, pendapatan Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- sebanyak 40%, pendapatan Rp 250.000,- s/d Rp 500.000,- sebanyak 15% serta pendapatan kurang dari Rp 250.000,- dan pendapatan lebih dari Rp 2.000.000,- sebanyak 0%.

Kemudian pada desa Wuran bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki pendapatan sebesar Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- sebanyak 42%, pendapatan Rp 250.000,- s/d Rp 500.000,- sebanyak 31%, pendapatan Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- sebanyak 14%, pendapatan Rp 2.000.000,- ke atas sebanyak 8% serta pendapatan kurang dari Rp 250.000,- sebanyak 6%.



Sumber : Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.4
TINGKAT PENDAPATAN

Pada umumnya masyarakat pedesaan mempunyai penghasilan tidak tetap karena kebanyakan bekerja sebagai petani dengan pendapatan terbanyak pada desa Tarinsing sebesar Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- dan desa Wuran sebesar Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,-.

Perbandingan tingkat pendapatan pada kedua desa Gambar 4.4, bahwa pendapatan antara di bawah Rp 250.000 sampai dengan Rp 500 rb s/d Rp 1 jt di desa Wuran lebih tinggi dibandingkan desa Tarinsing, akan tetapi pendapatan antara Rp 500 rb s/d Rp 1 jt sampai dengan Rp 2 jt keatas bahwa di desa Tarinsing lebih tinggi.

Dengan karakteristik pendapatan seperti diatas dengan tingkat pendapatan desa Tarinsing lebih tinggi jika dibandingkan dengan desa Wuran akan berdampak terhadap kemampuan membayar iuran, keaktifan membayar pengelolaan SPAM pada masing-masing desa. Dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat maka seharusnya tingkat kemampuan membayar dan keaktifan membayar iuran pengelolaan SPAM akan semakin tinggi.

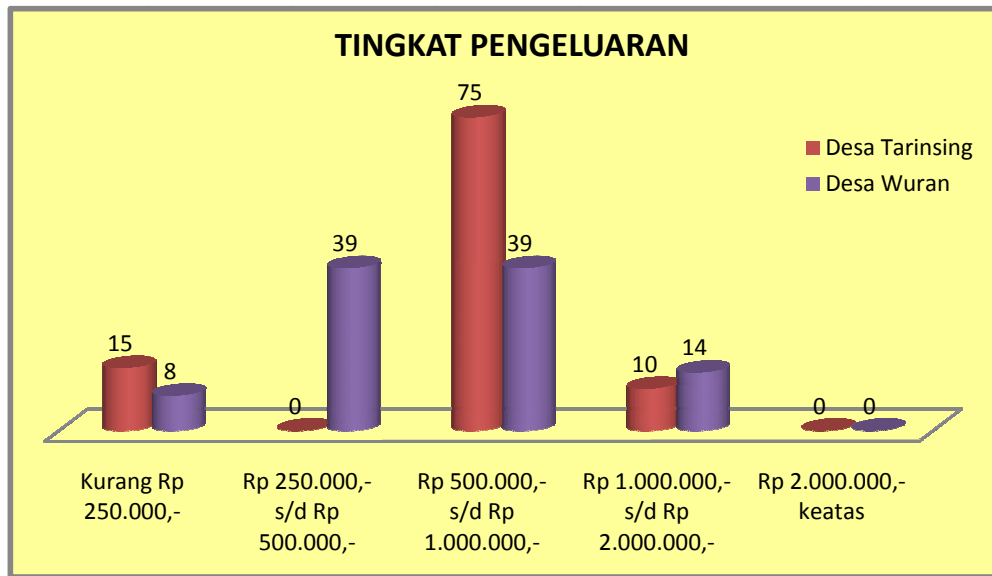
4.1.4 Tingkat Pengeluaran

Berdasarkan hasil kuesioner Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat pengeluaran pada desa Tarinsing sebesar Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- sebanyak 75%, kurang dari Rp 250.000,- sebanyak 15%,

pendapatan Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- sebanyak 10%, pendapatan Rp 250.000,- s/d Rp 500.000,- dan pendapatan Rp 2.000.000,- ke atas sebanyak 0%.

Kemudian pada desa Wuram sebesar Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- sebanyak 39%, pendapatan Rp 250.000,- s/d Rp 500.000, sebanyak 39%, pendapatan Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- sebanyak 14%, kurang dari Rp 250.000,- sebanyak 8%, dan pendapatan Rp 2.000.000,- ke atas sebanyak 0%.

Perbandingan tingkat pengeluaran pada kedua tersebut sangat berbeda pada setiap tingkatan pengeluaran, dimana pengeluaran kurang Rp 250 rb desa Tarinsing lebih tinggi, pengeluaran Rp 250 rb s/d Rp 500 rb desa Wuram lebih tinggi, pengeluaran Rp 500 rb s/d Rp 1 jt desa Tarinsing lebih tinggi, pengeluaran Rp 1 jt s/d Rp 2 jt desa Wuram lebih tinggi dan pengeluaran Rp 2 jt keatas pada kedua desa tidak ada sama sekali. Dengan karakteristik pengeluaran seperti diatas, bahwa pengeluaran kedua desa tersebut sangat bervariasi. Kemudian sebagian besar masyarakat kedua desa memiliki pengeluaran sekitar Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- sehingga masyarakat kedua desa tersebut termasuk pada golongan menengah ke bawah.



Sumber : Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.5
TINGKAT PENGELUARAN

Jika dibandingkan tingkat pendapatan dengan tingkat pengeluaran pada desa Tarinsing bahwa pendapatan tertinggi sebesar Rp 1 jt s/d Rp 2 jt tetapi tingkat

pengeluarannya sekitar Rp 500 rb s/d Rp 1 jt. Hal ini mengartikan bahwa tingkat pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran sehingga ada nilai selisih sebagai tabungan masyarakat Tarinsing. Dengan adanya nilai selisih pendapatan dengan pengeluaran desa Tarinsing, hal ini akan berdampak terhadap kemampuan membayar iuran dan keaktifan membayar iuran pengelolaan SPAM.

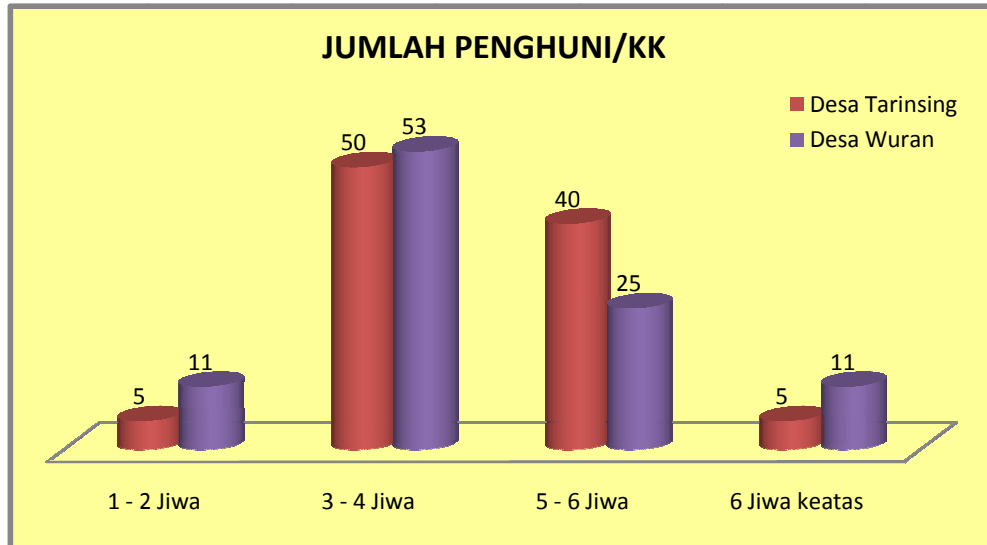
Jika dibandingkan tingkat pendapatan dengan tingkat pengeluaran pada desa Wuran bahwa pendapatan tertinggi sebesar Rp 500 rb s/d Rp 1 jt tetapi tingkat pengeluarannya sekitar Rp 500 rb s/d Rp 1 jt. Hal ini mengartikan bahwa tingkat pendapatan adalah sama dengan pengeluaran sehingga tidak ada nilai selisih sebagai tabungan masyarakat Wuran. Dengan tidak adanya nilai selisih pendapatan dengan pengeluaran desa Wuran, hal ini akan berdampak terhadap kemampuan membayar iuran dan keaktifan membayar iuran pengelolaan SPAM.

4.1.5 Jumlah Penghuni per KK

Jumlah penghuni rumah pada masing-masing KK juga cukup beragam. Ada yang merupakan keluarga kecil, keluarga sedang dan keluarga besar. Berdasarkan hasil kuesioner Gambar 4.6 dapat diketahui pada desa Tarinsing bahwa sebagian besar penghuni 3-4 jiwa sebanyak 50%, jumlah penghuni 5-6 jiwa sebanyak 40%, selanjutnya jumlah penghuni 1-2 jiwa dan 6 jiwa ke atas masing-masing sebanyak 5%.

Kemudian pada desa Wuran bahwa sebagian besar penghuni 3-4 orang sebanyak 53%, jumlah penghuni 5-6 jiwa sebanyak 25%, selanjutnya jumlah penghuni 1-2 jiwa dan 6 jiwa ke atas masing-masing sebanyak 11%.

Jumlah penghuni/ KK dengan 5-6 jiwa lebih banyak di desa Tarinsing dibandingkan dengan desa Wuran, akan tetapi 3-4 jiwa pada kedua desa hampir sama yaitu sebesar 50% dengan 53%. Hal ini menggambarkan pada kedua desa rata-rata mempunyai penghuni/ KK sekitar 3-4 jiwa



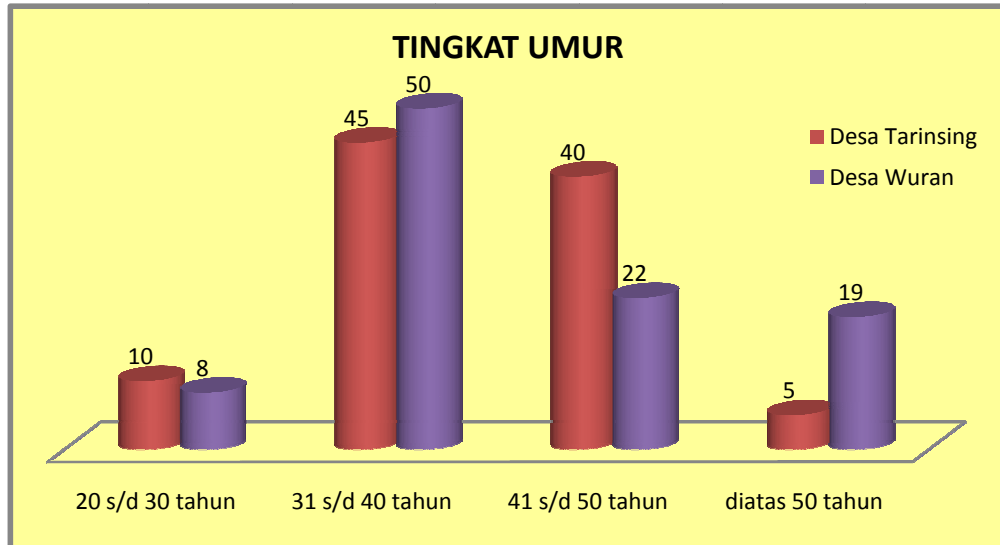
Sumber : Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.6
JUMLAH PENGHUNI/ KK

Dengan jumlah penghuni/ KK ini akan sangat berpengaruh terhadap akan kebutuhan pemakaian air. Perbandingan penduduk desa Wuran dan Tarinsing yang rata-rata per KK hanya antara 3 s/d 4 jiwa, ini hanya akan mempengaruhi ketersediaan air minum dilingkungan tempat tinggal tetapi tidak akan ada pengaruh terhadap kelanjutan pengelolaan bangunan SPAM. Jumlah kebutuhan air per KK tidak sama, tergantung dari jumlah orang per KK. Dengan semakin sedikitnya jumlah penghuni dalam keluarga maka kebutuhan akan air minum juga akan semakin sedikit maupun sebaliknya.

4.1.6 Umur

Berdasarkan hasil kuesioner Gambar 4.7 dapat diketahui pada desa Tarinsing bahwa umur kepala keluarga pada umumnya berkisar antara 31 s/d 40 tahun sebanyak 45%, umur 41 s/d 50 tahun sebanyak 40%, umur 20 s/d 30 tahun sebanyak 10% dan diatas 50 tahun sebanyak 5%.



Sumber : Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.7
TINGKAT UMUR

Kemudian pada desa Wuran bahwa umur kepala keluarga pada umumnya berkisar antara 31 s/d 40 tahun sebanyak 50%, umur 41 s/d 50 tahun sebanyak 22%, diatas 50 tahun sebanyak 19%, dan umur 20 s/d 30 tahun sebanyak 8%.

Jika dibandingkan umur kepala keluarga pada dua desa tersebut bahwa lansia atau diatas 50 tahun lebih banyak terdapat di desa Wuran, umur lebih muda lebih banyak terdapat di desa Tarinsing, umur 41 s/d 50 tahun desa Tarinsing lebih tinggi. Umur rata-rata kedua desa tersebut kebanyakan antara 31 tahun s/d 40 tahun.

Perbedaan pada kedua desa mengenai umur diatas 50 tahun dimana desa Wuran lebih tinggi, hal ini ada kaitannya bahwa desa Wuran adalah desa induk atau telah lama menjadi desa defenitif akan tetapi desa Tarinsing baru 1 tahun menjadi desa defenitif atau merupakan desa pemekaran dari desa Tampa, sehingga warganya lebih muda dibandingkan desa Wuran. Umur 50 tahun keatas lebih tinggi di desa Wuran yang akan mengakibatkan jumlah tokoh masyarakat yang dituakan/ditokohnya lebih banyak, yang akan berdampak makin banyak tokoh yang dituakan/ditokohkan maka akan lebih mudah untuk mempengaruhi masyarakat lainnya dalam pengelolaan bangunan SPAM.

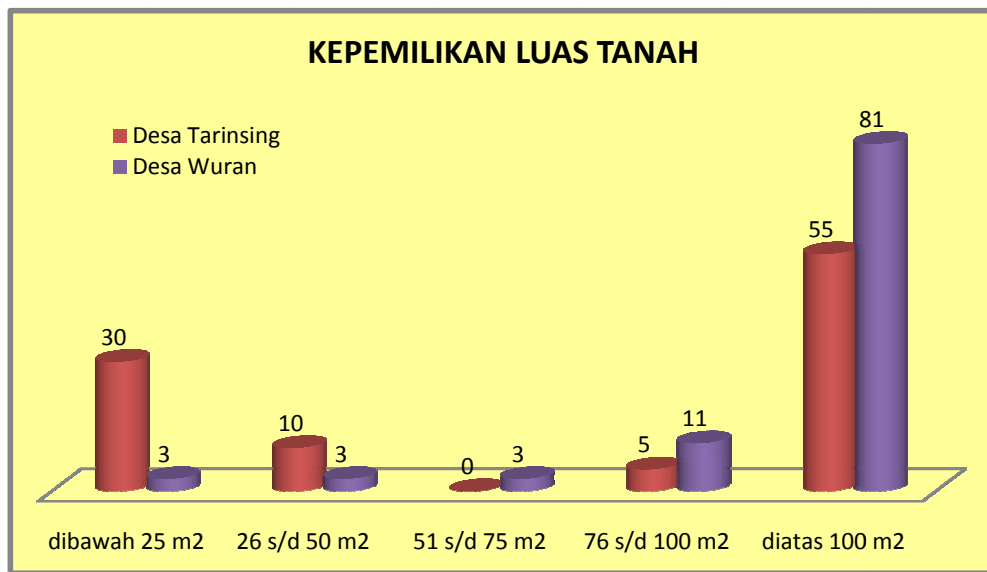
4.1.7 Kepemilikan Luas Tanah

Berdasarkan hasil kuesioner Gambar 4.8 dapat diketahui pada desa Tarinsing bahwa kepemilikan luas tanah pada umumnya di atas 100 m² sebanyak 55%, di bawah

25 m² sebanyak 30%, luas 26 m² s/d 50 m² sebanyak 10%, luas 76 m² s/d 100 m² sebanyak 5% dan 51 m² s/d 75 m² sebanyak 0%.

Kemudian pada desa Wuran bahwa kepemilikan luas tanah pada umumnya di atas 100 m² sebanyak 81%, luas 76 m² s/d 100 m² sebanyak 11%, di bawah 25 m², luas 26 m² s/d 50 m² dan 51 m² s/d 75 m² masing-masing sebanyak 3%.

Perbandingan kepemilikan luas tanah dibawah 25 m² dan 26 m² s/d 50 m² di desa Tarinsing lebih tinggi, akan tetapi dengan luas 52 s/d 75 m² sampai dengan diatas 100 m² di desa Wuran lebih tinggi hal ini . Hal ini mengartikan bahwa kepemilikan luas tanah terbanyak adalah di desa Wuran serta menggambarkan masyarakat desa Wuran lebih kaya dibandingkan desa Tarinsing. Kalau dibandingkan tingkat kemiskinan/kekayaan antar kedua desa bahwa desa Wuran lebih kaya, maka seharusnya tingkat keaktifan dan kemampuan membayar iuran pengelolaan SPAM lebih tinggi di desa Wuran. Kepemilikan luas tanah pada kedua desa kebanyakan diatas 100 m² mengingat luas lahan yang masih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya.



Sumber : Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.8
KEPEMILIKAN LUAS TANAH

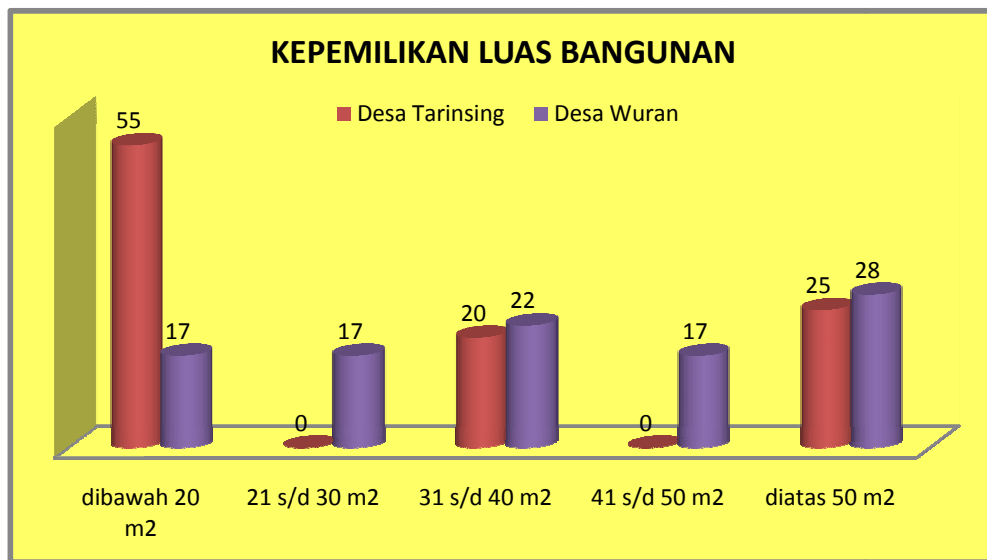
4.1.8 Kepemilikan Luas Bangunan

Berdasarkan hasil kuesioner Gambar 4.9 dapat diketahui pada desa Tarinsing bahwa kepemilikan luas bangunan pada umumnya luas di bawah 20 m² sebanyak 55%, luas di atas 50 m² sebanyak 25%, luas 31 m² s/d 40 m² sebanyak 20%, luas 21 m² s/d 30 m² dan 41 m² s/d 50 m² sebanyak 0%.

Kemudian pada desa Wuran bahwa kepemilikan luas bangunan pada umumnya di atas 50 m² sebanyak 28%, luas 31 m² s/d 40 m² sebanyak 22%, di bawah 20 m², luas 21 m² s/d 30 m² dan 41 m² s/d 50 m² masing-masing sebanyak 17%.

Perbandingan kepemilikan luas bangunan dibawah 20 m² lebih banyak di desa Tarinsing akan tetapi kepemilikan luas bangunan 21 s/d 30 m², 31 s/d 40 m², 41 s/d 50 m² dan diatas 50 m² lebih banyak di desa Wuran. Hal ini mengartikan bahwa kepemilikan luas bangunan terbanyak adalah di desa Wuran serta menggambarkan masyarakat desa Wuran lebih kaya dibandingkan desa Tarinsing. Kalau dibandingkan tingkat kemiskinan/kekayaan antar kedua desa bahwa desa Wuran lebih kaya, maka akan berdampak terhadap tingkat keaktifan dan kemampuan membayar iuran pengelolaan SPAM akan lebih tinggi di desa Wuran.

Apabila dikaitkan hubungan antara kepemilikan luas tanah dan luas bangunan pada desa Tarinsing adalah sejalan yaitu makin sedikit luas tanah yang dimiliki maka makin sedikit luas bangunan yang di miliki. Desa Wuran memiliki luas tanah dan luas bangunan lebih luas dibandingkan desa Tarinsing.



Sumber : Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.9

KEPEMILIKAN LUAS BANGUNAN

4.1.9 Keterkaitan antar Faktor-Faktor Karakteristik Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) dari karakteristik masyarakat, adanya saling hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi secara signifikan sesama karakteristik masyarakat. Untuk mengetahui adanya hubungan yang signifikan tersebut dianalisa dengan menggunakan alat SPSS analisis *crosstabs*.

Tabel Rekapitulasi hasil *Chi-Square Test* pada desa Tarinsing dengan desa Wuram dan hubungan yang signifikan seperti pada tulisan Tabel IV.1 berikut ini:

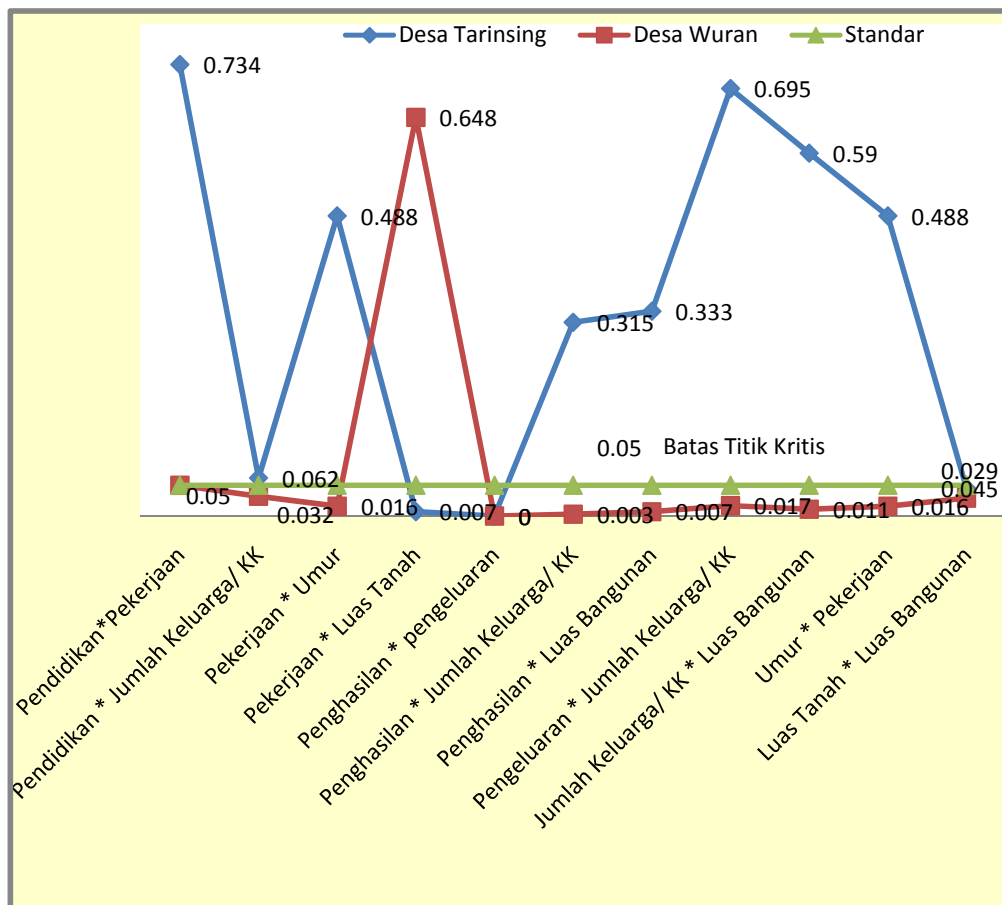
TABEL IV.1
REKAPITULASI HASIL CHI-SQUARE TEST

No	Hubungan antar	Nilai Chi-Square Test					
		Desa Tarinsing			Desa Wuram		
		Value	df	Asymp.Sig	Value	df	Asymp.Sig
I	Pendidikan dengan :						
	Pekerjaan	3,578	6	0,734	7,820	3	0,050
	Penghasilan	7,046	6	0,317	18,220	12	0,109
	Pengeluaran	11,311	6	0,079	16,192	9	0,063
	Jumlah Keluarga/KK	16,217	9	0,062	18,253	9	0,032
	Umur	8,963	9	0,441	16,287	9	0,061
	Luas Tanah	8,485	9	0,486	12,186	12	0,431
	Luas Bangunan	7,873	6	0,248	10,261	12	0,593
II	Pekerjaan dengan :						
	Pendidikan	3,578	6	0,734	7,820	3	0,050
	Penghasilan	5,222	4	0,265	2,969	4	0,563
	Pengeluaran	2,222	4	0,695	2,608	3	0,456
	Jumlah Keluarga/KK	3,133	6	0,792	1,345	3	0,718
	Umur	5,444	6	0,488	10,286	3	0,016
	<i>Luas Tanah</i>	17,697	6	0,007	2,483	4	0,648
	Luas Bangunan	4,979	4	0,289	3,359	4	0,500
III	Penghasilan dengan :						
	Pendidikan	7,046	6	0,317	18,220	12	0,109

	Pekerjaan	5,222	4	0,265	2,969	4	0,563
	<i>Pengeluaran</i>	22,370	4	0,000	67,942	12	0,000
	Jumlah Keluarga/KK	7,063	6	0,315	30,310	12	0,003
	Umur	7,303	6	0,294	16,686	12	0,162
	Luas Tanah	5,976	6	0,426	9,679	16	0,883
	Luas Bangunan	4,580	4	0,333	33,396	16	0,007
IV	Pengeluaran dengan						
	Pendidikan	11,311	6	0,079	16,192	9	0,063
	Pekerjaan	2,222	4	0,695	2,608	3	0,456
	<i>Penghasilan</i>	22,370	4	0,000	67,942	12	0,000
	Jumlah Keluarga/KK	3,867	6	0,695	20,135	9	0,017
	Umur	2,528	6	0,865	8,664	9	0,469
	Luas Tanah	4,000	6	0,677	6,593	12	0,883
	Luas Bangunan	4,979	4	0,289	15,594	12	0,211
V	Jumlah Keluarga/ KK:						
	Pendidikan	16,217	9	0,062	18,253	9	0,032
	Pekerjaan	3,133	6	0,792	1,345	3	0,718
	Penghasilan	7,063	6	0,315	30,310	12	0,003
	Pengeluaran	3,867	6	0,695	20,135	9	0,017
	Umur	10,063	9	0,345	15,820	9	0,071
	Luas Tanah	11,795	9	0,225	11,368	12	0,498
	Luas Bangunan	4,645	6	0,590	25,930	12	0,011
VI	Umur						
	Pendidikan	8,963	9	0,441	16,287	9	0,061
	Pekerjaan	5,444	6	0,488	10,286	3	0,016
	Penghasilan	7,303	6	0,294	16,686	12	0,162
	Pengeluaran	2,528	6	0,865	8,664	9	0,469
	Jumlah Keluarga/ KK	10,063	9	0,345	15,820	9	0,071
	Luas Tanah	10,859	9	0,286	12,589	12	0,400
	Luas Bangunan	6,322	6	0,388	14,950	12	0,244
VII	Luas Tanah dengan :						
	Pendidikan	8,485	9	0,486	12,186	12	0,431

	Pekerjaan	17,697	6	0,007	2,483	4	0,648
	Penghasilan	5,976	6	0,426	9,679	16	0,883
	Pengeluaran	4,000	6	0,677	6,593	12	0,883
	Jumlah Keluarga/ KK	11,795	9	0,225	11,368	12	0,498
	Umur	10,859	9	0,286	12,589	12	0,400
	<i>Luas Bangunan</i>	12,872	6	0,045	28,345	16	0,029
VIII	Luas Bangunan :						
	Pendidikan	7,873	6	0,248	10,261	12	0,593
	Pekerjaan	4,979	4	0,289	3,359	4	0,500
	Penghasilan	4,580	4	0,333	33,396	16	0,007
	Pengeluaran	4,979	4	0,289	15,594	12	0,211
	Jumlah Keluarga/ KK	4,645	6	0,590	25,930	12	0,011
	Umur	6,322	6	0,388	14,950	12	0,244
	Luas Tanah	12,872	6	0,045	28,345	16	0,029

Sumber: Hasil Olahan, 2010



Sumber: Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.10
NILAI SIGNIFIKAN

4.1.9.1 Hubungan Pendidikan dengan Pekerjaan

Selanjutnya hasil analisis lihat Tabel IV.2 pada desa Wuram, dengan hasil harga *chi-square* lebih kecil dari harga titik kritis tabel secara teoritis. Harga titik kritis tabel didapatkan dengan terlebih dahulu mencari harga *dk* atau *df* dengan menggunakan rumus $dk = (4-1)(2-1)$, maka didapatkan harga *dk* adalah 3. Selanjutnya melalui tabel nilai *chi-kuadrat* dengan taraf signifikansi 5% didapatkan harga titik kritis tabel = 7,815. Melalui analisis *chi-kuadrat* diperoleh harga *chi-square* sebesar 7.820 ($7.820 = 7.815$) dan probabilitas $0,050 = 0,05$ dengan demikian ternyata hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mempunyai hubungan yang berarti atau sangat nyata.

TABEL IV.2
CHI-SQUARE TEST PENDIDIKAN DENGAN PEKERJAAN

Crosstab

			Pekerjaan		Total
			Wiraswasta	Tani	
Pendidikan Terakhir	Tamat SD	Count	0	8	8
		Expected Count	1,8	6,2	8,0
	Tamat SLTP	Count	3	14	17
		Expected Count	3,8	13,2	17,0
	Tamat SLTA	Count	4	6	10
		Expected Count	2,2	7,8	10,0
	Sarjana	Count	1	0	1
		Expected Count	,2	,8	1,0
	Total	Count	8	28	36
		Expected Count	8,0	28,0	36,0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7,820 ^a	3	,050
Likelihood Ratio	8,835	3	,032
Linear-by-Linear Association	7,416	1	,006
N of Valid Cases	36		

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,22.

4.1.9.2 Hubungan Pendidikan dengan Jumlah Keluarga/ KK

Selanjutnya hasil analisis lihat Tabel IV.3 pada desa Wuram, dengan hasil harga chi-square lebih kecil dari harga titik kritis tabel secara teoritis. Harga titik kritis tabel didapatkan dengan terlebih dahulu mencari harga dk atau df dengan menggunakan rumus $dk = (4-1)(4-1)$, maka didapatkan harga dk adalah 9. Selanjutnya melalui tabel nilai chi-kuadrat dengan taraf signifikansi 5% didapatkan harga titik kritis tabel = 16.919. Melalui analisis chi-kuadrat diperoleh harga chi-square sebesar 18.253 ($18.253 > 16.919$) dan probabilitas $0,032 < 0,05$ dengan demikian ternyata hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mempunyai hubungan yang berarti atau sangat nyata.

TABEL IV.3
CHI-SQUARE TEST PENDIDIKAN DENGAN JUMLAH KELUARGA/KK

Crosstab

		Jumlah Anggota Keluarga				Total
		1 s/d 2	3 s/d 4	5 s/d 6	dias 6	
Pendidikan Tamat SD Terakhir	Count	3	3	2	0	8
	Expected Count	,9	4,2	2,0	,9	8,0
Tamat SLTF	Count	0	10	4	3	17
	Expected Count	1,9	9,0	4,3	1,9	17,0
Tamat SLTA	Count	0	6	3	1	10
	Expected Count	1,1	5,3	2,5	1,1	10,0
Sarjana	Count	1	0	0	0	1
	Expected Count	,1	,5	,3	,1	1,0
Total	Count	4	19	9	4	36
	Expected Count	4,0	19,0	9,0	4,0	36,0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	18,253 ^a	9	,032
Likelihood Ratio	16,524	9	,057
Linear-by-Linear Association	,078	1	,780
N of Valid Cases	36		

a. 14 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11.

4.1.9.3 Hubungan Pekerjaan dengan Umur

Selanjutnya hasil analisis lihat Tabel IV.4 pada desa Wuram, dengan hasil harga chi-square lebih kecil dari harga titik kritis tabel secara teoritis. Harga titik kritis tabel didapatkan dengan terlebih dahulu mencari harga dk atau df dengan menggunakan rumus $dk = (4-1)(2-1)$, maka didapatkan harga dk adalah 3. Selanjutnya melalui tabel nilai chi-kuadrat dengan taraf signifikansi 5% didapatkan harga titik kritis tabel = 7.815. Melalui analisis chi-kuadrat diperoleh harga chi-square sebesar 10.286 ($10.286 > 7.815$) dan probabilitas $0,016 < 0,05$ dengan demikian ternyata hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mempunyai hubungan yang berarti atau sangat nyata.

TABEL IV.4
CHI-SQUARE TEST PEKERJAAN DENGAN UMUR

Crosstab

		Umur				Total
		20 s/d 30 tahun	31 s/d 40 tahun	41 s/d 50 tahun	diatas 50 tahun	
Pekerjaan Wiraswasta	Count	0	8	0	0	8
	Expected Count	,7	4,0	1,8	1,6	8,0
Tani	Count	3	10	8	7	28
	Expected Count	2,3	14,0	6,2	5,4	28,0
Total	Count	3	18	8	7	36
	Expected Count	3,0	18,0	8,0	7,0	36,0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,286 ^a	3	,016
Likelihood Ratio	13,408	3	,004
Linear-by-Linear Association	3,461	1	,063
N of Valid Cases	36		

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,67.

4.1.9.4 Hubungan Pekerjaan dengan Luas Tanah

Selanjutnya hasil analisis lihat Tabel IV.5 pada desa Tarinsing, dengan hasil harga chi-square lebih kecil dari harga titik kritis tabel secara teoritis. Harga titik kritis tabel didapatkan dengan terlebih dahulu mencari harga dk atau df dengan menggunakan rumus $dk = (4-1)(3-1)$, maka didapatkan harga dk adalah 6. Selanjutnya melalui tabel nilai chi-kuadrat dengan taraf signifikansi 1% didapatkan harga titik kritis tabel = 16.812. Melalui analisis chi-kuadrat diperoleh harga chi-square sebesar 17.697 ($17.697 > 16.812$) dan probabilitas $0,007 < 0,01$ dengan demikian ternyata hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mempunyai hubungan yang berarti atau sangat nyata.

TABEL IV.5
CHI-SQUARE TEST PEKERJAAN DENGAN LUAS TANAH

Crosstab

		Luas Tanah				Total
		dibawah 25 m2	26 s/d 50 m2	76 s/d 100 m2	diatas 100 m2	
Pekerjaan Karyawan swas	Count	0	0	1	1	2
	Expected Cou	,6	,2	,1	1,1	2,0
Wiraswasta	Count	3	0	0	0	3
	Expected Cou	,9	,3	,2	1,7	3,0
Tani	Count	3	2	0	10	15
	Expected Cou	4,5	1,5	,8	8,3	15,0
Total	Count	6	2	1	11	20
	Expected Cou	6,0	2,0	1,0	11,0	20,0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	17,697 ^a	6	,007
Likelihood Ratio	14,204	6	,027
Linear-by-Linear Association	,329	1	,566
N of Valid Cases	20		

a. 11 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10.

4.1.9.5 Hubungan Penghasilan dengan Pengeluaran

Selanjutnya hasil analisis lihat Tabel IV.6 pada desa Tarinsing, dengan hasil harga chi-square lebih kecil dari harga titik kritis tabel secara teoritis. Harga titik kritis tabel didapatkan dengan terlebih dahulu mencari harga dk atau df dengan menggunakan rumus $dk = (3-1)(3-1)$, maka didapatkan harga dk adalah 4. Selanjutnya melalui tabel nilai chi-kuadrat dengan taraf signifikansi 1% didapatkan harga titik kritis tabel = 13.277. Melalui analisis chi-kuadrat diperoleh harga chi-square sebesar 22.370 ($22.370 > 13.277$) dan probabilitas $0,000 < 0,01$ dengan demikian ternyata hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mempunyai hubungan yang berarti atau sangat nyata.

TABEL IV.6
CHI-SQUARE TEST PENGHASILAN DENGAN PENGELUARAN
DESA TARINSING

Crosstab

		Pengeluaran			Total
		Kurang Rp 250.000,-	Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,-	
Penghasilan Rp 250.000,- s/d Rp 500.000,-	Count	3	0	0	3
	Expected Count	,5	2,3	,3	3,0
Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,-	Count	0	8	0	8
	Expected Count	1,2	6,0	,8	8,0
Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,-	Count	0	7	2	9
	Expected Count	1,4	6,8	,9	9,0
Total	Count	3	15	2	20
	Expected Count	3,0	15,0	2,0	20,0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	22,370 ^a	4	,000
Likelihood Ratio	19,689	4	,001
Linear-by-Linear Association	11,944	1	,001
N of Valid Cases	20		

a. 7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30.

Selanjutnya hasil analisis lihat Tabel IV.7 pada desa Wuram, dengan hasil harga chi-square lebih kecil dari harga titik kritis tabel secara teoritis. Harga titik kritis tabel didapatkan dengan terlebih dahulu mencari harga dk atau df dengan menggunakan rumus $dk = (4-1)(5-1)$, maka didapatkan harga dk adalah 12. Selanjutnya melalui tabel nilai chi-kuadrat dengan taraf signifikansi 1% didapatkan harga titik kritis tabel = 26.217. Melalui analisis chi-kuadrat diperoleh harga chi-square sebesar 67.942 ($67.942 > 26.217$) dan probabilitas $0,000 < 0,01$ dengan demikian ternyata hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mempunyai hubungan yang berarti atau sangat nyata.

TABEL IV.7
CHI-SQUARE TEST PENGHASILAN DENGAN PENGELUARAN
DESA WURAM

Crosstab

		Pengeluaran				Total
		Kurang Rp 250.000,-	Rp 250.000,- s/d Rp 500.000,-	Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,-	
Penghasilan kurang Rp 250.000,-	Count	2	0	0	0	2
	Expected Count	,2	,8	,8	,3	2,0
Rp 250.000,- s/d Rp 500.000,-	Count	1	10	0	0	11
	Expected Count	,9	4,3	4,3	1,5	11,0
Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,-	Count	0	4	11	0	15
	Expected Count	1,3	5,8	5,8	2,1	15,0
Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,-	Count	0	0	3	2	5
	Expected Count	,4	1,9	1,9	,7	5,0
Diatas Rp 2.000.000,-	Count	0	0	0	3	3
	Expected Count	,3	1,2	1,2	,4	3,0
Total	Count	3	14	14	5	36
	Expected Count	3,0	14,0	14,0	5,0	36,0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	67,942 ^a	12	,000
Likelihood Ratio	56,711	12	,000
Linear-by-Linear Association	27,580	1	,000
N of Valid Cases	36		

a. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17.

4.1.9.6 Hubungan Penghasilan dengan Jumlah Keluarga/ KK

Selanjutnya hasil analisis lihat Tabel IV.8 pada desa Wuram, dengan hasil harga chi-square lebih kecil dari harga titik kritis tabel secara teoritis. Harga titik kritis tabel didapatkan dengan terlebih dahulu mencari harga dk atau df dengan menggunakan rumus $dk = (4-1)(5-1)$, maka didapatkan harga dk adalah 12. Selanjutnya melalui tabel nilai chi-kuadrat dengan taraf signifikansi 1% didapatkan harga titik kritis tabel = 26.217. Melalui analisis chi-kuadrat diperoleh harga chi-square sebesar 30.310 ($30.310 > 26.217$) dan probabilitas $0,003 < 0,01$ dengan demikian ternyata hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mempunyai hubungan yang berarti atau sangat nyata.

TABEL IV.8
CHI-SQUARE TEST PENGHASILAN DENGAN JUMLAH KELUARGA/KK

Crosstab

		Jumlah Anggota Keluarga				Total
		1 s/d 2	3 s/d 4	5 s/d 6	dias 6	
Penghasilan kurang Rp 250.00	Count	0	0	0	2	2
	Expected Cou	,2	1,1	,5	,2	2,0
Rp 250.000,- s/d I	Count	0	5	5	1	11
	Expected Cou	1,2	5,8	2,8	1,2	11,0
Rp 500.000,- s/d I	Count	3	10	1	1	15
	Expected Cou	1,7	7,9	3,8	1,7	15,0
Rp 1.000.000,- s/c	Count	0	4	1	0	5
	Expected Cou	,6	2,6	1,3	,6	5,0
Diatas Rp 2.000.0	Count	1	0	2	0	3
	Expected Cou	,3	1,6	,8	,3	3,0
Total	Count	4	19	9	4	36
	Expected Cou	4,0	19,0	9,0	4,0	36,0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	30,310 ^a	12	,003
Likelihood Ratio	26,408	12	,009
Linear-by-Linear Association	4,513	1	,034
N of Valid Cases	36		

a. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,22.

4.1.9.7 Hubungan Penghasilan dengan Luas Bangunan

Selanjutnya hasil analisis lihat Tabel IV.9 pada desa Wuran, dengan hasil harga chi-square lebih kecil dari harga titik kritis tabel secara teoritis. Harga titik kritis tabel didapatkan dengan terlebih dahulu mencari harga dk atau df dengan menggunakan rumus $dk = (5-1)(5-1)$, maka didapatkan harga dk adalah 16. Selanjutnya melalui tabel nilai chi-kuadrat dengan taraf signifikansi 1% didapatkan harga titik kritis tabel = 32.000. Melalui analisis chi-kuadrat diperoleh harga chi-square sebesar 33.396 ($33.396 > 32.000$) dan probabilitas $0,007 < 0,01$ dengan demikian ternyata hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mempunyai hubungan yang berarti atau sangat nyata.

TABEL IV.9
CHI-SQUARE TEST PENGHASILAN DENGAN LUAS BANGUNAN

Crosstab

	Luas Bangunan					Total
	dibawah 20 m ²	1 s/d 30 m ²	1 s/d 40 m ²	1 s/d 50 m ²	diatas 50 m ²	
Penghasil kurang Rp 250.000,-	Count	0	0	0	0	2
	Expected Count	,3	,3	,4	,3	2,0
Rp 250.000,- s.d. Rp 500.000,-	Count	5	4	0	1	11
	Expected Count	1,8	1,8	2,4	1,8	11,0
Rp 500.000,- s.d. Rp 1.000.000,-	Count	1	2	4	4	15
	Expected Count	2,5	2,5	3,3	2,5	15,0
Rp 1.000.000,- s.d. Rp 2.000.000,-	Count	0	0	4	0	5
	Expected Count	,8	,8	1,1	,8	5,0
Diatas Rp 2.000.000,-	Count	0	0	0	1	3
	Expected Count	,5	,5	,7	,5	3,0
Total	Count	6	6	8	6	36
	Expected Count	6,0	6,0	8,0	6,0	36,0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	33,396 ^a	16	,007
Likelihood Ratio	34,597	16	,005
Linear-by-Linear Association	3,348	1	,067
N of Valid Cases	36		

a. 25 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33.

4.1.9.8 Hubungan Pengeluaran dengan Jumlah Keluarga/ KK

Selanjutnya hasil analisis lihat Tabel IV.10 pada desa Wuram, dengan hasil harga chi-square lebih kecil dari harga titik kritis tabel secara teoritis. Harga titik kritis tabel didapatkan dengan terlebih dahulu mencari harga dk atau df dengan menggunakan rumus $dk = (4-1)(4-1)$, maka didapatkan harga dk adalah 9. Selanjutnya melalui tabel nilai chi-kuadrat dengan taraf signifikansi 5% didapatkan harga titik kritis tabel = 16.919. Melalui analisis chi-kuadrat diperoleh harga chi-square sebesar 20.135 ($20.135 > 16.919$) dan probabilitas $0,017 < 0,05$ dengan demikian ternyata hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mempunyai hubungan yang berarti atau sangat nyata.

TABEL IV.10
CHI-SQUARE TEST PENGELUARAN DENGAN JUMLAH KELUARGA/KK

Crosstab

		Jumlah Anggota Keluarga				Total
		1 s/d 2	3 s/d 4	5 s/d 6	dias 6	
Pengeluaran Kurang Rp 250.00	Count	0	1	0	2	3
	Expected Cou	,3	1,6	,8	,3	3,0
Rp 250.000,- s/d F 500.000	Count	0	8	5	1	14
	Expected Cou	1,6	7,4	3,5	1,6	14,0
Rp 500.000,- s/d F 1.000.000,-	Count	3	9	1	1	14
	Expected Cou	1,6	7,4	3,5	1,6	14,0
Rp 1.000.000,- s/c Rp 2.000.000,-	Count	1	1	3	0	5
	Expected Cou	,6	2,6	1,3	,6	5,0
Total	Count	4	19	9	4	36
	Expected Cou	4,0	19,0	9,0	4,0	36,0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	20,135 ^a	9	,017
Likelihood Ratio	18,792	9	,027
Linear-by-Linear Association	3,346	1	,067
N of Valid Cases	36		

a. 14 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33.

4.1.9.9 Hubungan Jumlah Keluarga/ KK dengan Luas Bangunan

Selanjutnya hasil analisis lihat Tabel IV.11 pada desa Wuram, dengan hasil harga chi-square lebih kecil dari harga titik kritis tabel secara teoritis. Harga titik kritis tabel didapatkan dengan terlebih dahulu mencari harga dk atau df dengan menggunakan rumus $dk = (4-1)(5-1)$, maka didapatkan harga dk adalah 12. Selanjutnya melalui tabel nilai chi-kuadrat dengan taraf signifikansi 5% didapatkan harga titik kritis tabel = 21.026. Melalui analisis chi-kuadrat diperoleh harga chi-square sebesar 25.930 ($25.930 > 21.026$) dan probabilitas $0,011 < 0,05$ dengan demikian ternyata hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mempunyai hubungan yang berarti atau sangat nyata.

TABEL IV.11
CHI-SQUARE TEST JUMLAH KELUARGA/KK DENGAN
LUAS BANGUNAN

Crosstab

		Luas Bangunan				Total		
		dibawah 20 m ²	21 s/d 30 m ²	31 s/d 40 m ²	41 s/d 50 m ²		diatas 50 m ²	
Jumlah Anggota Keluarga	1 s/d 2	Count	0	0	0	2	2	4
		Expected Count	,7	,7	,9	,7	1,1	4,0
3 s/d 4	Count	3	5	7	1	3	19	
	Expected Count	3,2	3,2	4,2	3,2	5,3	19,0	
5 s/d 6	Count	3	1	1	3	1	9	
	Expected Count	1,5	1,5	2,0	1,5	2,5	9,0	
diatas 6	Count	0	0	0	0	4	4	
	Expected Count	,7	,7	,9	,7	1,1	4,0	
Total	Count	6	6	8	6	10	36	
	Expected Count	6,0	6,0	8,0	6,0	10,0	36,0	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	25,930 ^a	12	,011
Likelihood Ratio	26,907	12	,008
Linear-by-Linear Association	,507	1	,477
N of Valid Cases	36		

a. 19 cells (95,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,67.

4.1.9.10 Hubungan Umur dengan Pekerjaan

Selanjutnya hasil analisis lihat Tabel IV.12 pada desa Wuram, dengan hasil harga chi-square lebih kecil dari harga titik kritis tabel secara teoritis. Harga titik kritis tabel didapatkan dengan terlebih dahulu mencari harga dk atau df dengan menggunakan rumus $dk = (4-1)(2-1)$, maka didapatkan harga dk adalah 3. Selanjutnya melalui tabel nilai chi-kuadrat dengan taraf signifikansi 5% didapatkan harga titik kritis tabel = 7.815. Melalui analisis chi-kuadrat diperoleh harga chi-square sebesar 10.286 ($10.286 > 7.815$) dan probabilitas $0,016 < 0,05$ dengan demikian ternyata hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mempunyai hubungan yang berarti atau sangat nyata.

TABEL IV.12
CHI-SQUARE TEST UMUR DENGAN PEKERJAAN

Crosstab

			Pekerjaan		Total
			Wiraswasta	Tani	
Umur	20 s/d 30 tahun	Count	0	3	3
		Expected Count	,7	2,3	3,0
	31 s/d 40 tahun	Count	8	10	18
		Expected Count	4,0	14,0	18,0
	41 s/d 50 tahun	Count	0	8	8
		Expected Count	1,8	6,2	8,0
	diatas 50 tahun	Count	0	7	7
		Expected Count	1,6	5,4	7,0
Total		Count	8	28	36
		Expected Count	8,0	28,0	36,0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10,286 ^a	3	,016
Likelihood Ratio	13,408	3	,004
Linear-by-Linear Association	3,461	1	,063
N of Valid Cases	36		

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,67.

4.1.9.11 Hubungan Luas Tanah dengan Luas Bangunan

Selanjutnya hasil analisis lihat Tabel IV.13 pada desa Tarinsing, dengan hasil harga chi-square lebih kecil dari harga titik kritis tabel secara teoritis. Harga titik kritis tabel didapatkan dengan terlebih dahulu mencari harga dk atau df dengan menggunakan rumus $dk = (4-1)(3-1)$, maka didapatkan harga dk adalah 6. Selanjutnya melalui tabel nilai chi-kuadrat dengan taraf signifikansi 5% didapatkan harga titik kritis tabel = 12.592. Melalui analisis chi-kuadrat diperoleh harga chi-square sebesar 12.872 ($12.872 > 12.592$) dan probabilitas $0,045 < 0,05$ dengan demikian ternyata hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mempunyai hubungan yang berarti atau sangat nyata

TABEL IV.13
CHI-SQUARE TEST LUAS TANAH DENGAN LUAS BANGUNAN
DESA TARINSING

Crosstab

			Luas Bangunan			Total
			dibawah 20 m2	31 s/d 40 m2	dias 50 m2	
Luas Tanah	dibawah 25 m2	Count	6	0	0	6
		Expected Count	3,3	1,2	1,5	6,0
	26 s/d 50 m2	Count	1	1	0	2
		Expected Count	1,1	,4	,5	2,0
	76 s/d 100 m2	Count	0	1	0	1
		Expected Count	,6	,2	,3	1,0
	dias 100 m2	Count	4	2	5	11
		Expected Count	6,1	2,2	2,8	11,0
Total		Count	11	4	5	20
		Expected Count	11,0	4,0	5,0	20,0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	12,872 ^a	6	,045
Likelihood Ratio	14,322	6	,026
Linear-by-Linear Association	6,261	1	,012
N of Valid Cases	20		

a. 11 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20.

Selanjutnya hasil analisis lihat Tabel IV.14 pada desa Wurun, dengan hasil harga chi-square lebih kecil dari harga titik kritis tabel secara teoritis. Harga titik kritis tabel didapatkan dengan terlebih dahulu mencari harga dk atau df dengan menggunakan rumus $dk = (5-1)(5-1)$, maka didapatkan harga dk adalah 16. Selanjutnya melalui tabel nilai chi-kuadrat dengan taraf signifikansi 5% didapatkan harga titik kritis tabel = 26.296. Melalui analisis chi-kuadrat diperoleh harga chi-square sebesar 28.345 ($28.345 > 26.296$) dan probabilitas $0,029 < 0,05$ dengan demikian ternyata hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mempunyai hubungan yang berarti atau sangat nyata.

TABEL IV.14
CHI-SQUARE TEST LUAS TANAH DENGAN LUAS BANGUNAN

DESA WURAN

Crosstab

		Luas Bangunan					Total
		dibawah 20 m ²	1 s/d 30 m ²	1 s/d 40 m ²	1 s/d 50 m ²	diatas 50 m ²	
Luas Tanah	dibawah 25 m ² Count	1	0	0	0	0	1
	Expected Count	,2	,2	,2	,2	,3	1,0
26 s/d 50 m ²	Count	0	0	1	0	0	1
	Expected Count	,2	,2	,2	,2	,3	1,0
51 s/d 75 m ²	Count	1	0	0	0	0	1
	Expected Count	,2	,2	,2	,2	,3	1,0
76 s/d 100 m ²	Count	3	0	0	1	0	4
	Expected Count	,7	,7	,9	,7	1,1	4,0
diatas 100 m ²	Count	1	6	7	5	10	29
	Expected Count	4,8	4,8	6,4	4,8	8,1	29,0
Total	Count	6	6	8	6	10	36
	Expected Count	6,0	6,0	8,0	6,0	10,0	36,0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	28,345 ^a	16	,029
Likelihood Ratio	25,275	16	,065
Linear-by-Linear Association	6,590	1	,010
N of Valid Cases	36		

a. 23 cells (92,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17.

4.1.10 Faktor-faktor yang Mempengaruhi dari Aspek Karakteristik Masyarakat

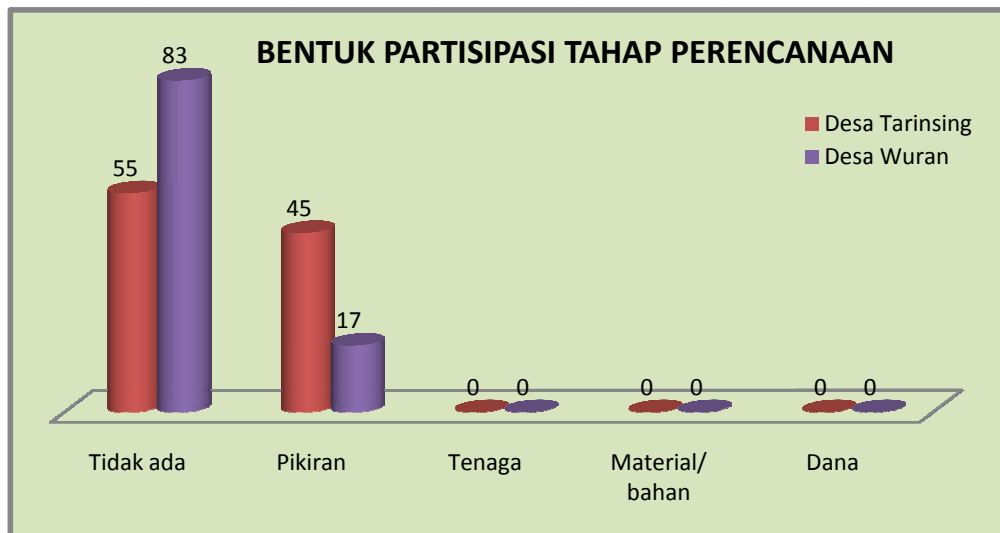
Berdasarkan hasil identifikasi karakteristik masyarakat di atas, maka dihasilkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan SPAM pada desa Wuran dan Tarinsing adalah sebagai berikut : 1) Tingkat pendidikan yang berbeda, dimana tingkat pendidikan desa Wuran lebih tinggi dari desa Tarinsing, ini menggambarkan semakin tinggi tingkat pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kepedulian masyarakat kebutuhan-kebutuhan masyarakat termasuk kepedulian akan pengelolaan SPAM pedesaan. 2) Tingkat pekerjaan kedua desa tersebut bahwa pekerjaan utamanya adalah sama-sama sebagai petani karet, hal ini mengartikan bahwa dengan tipe pekerjaan utamanya sama sebagai petani karet, akan tetapi SPAM di desa Tarinsing beroperasi dan SPAM di desa Wuran tidak beroperasi. Hal ini menandakan bahwa tipe pekerjaan yang sama antara kedua desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan SPAM. 3) Tingkat pendapatan yang berbeda, dengan tingkat pendapatan desa Tarinsing lebih tinggi jika dibandingkan dengan desa Wuran akan berdampak terhadap kemampuan membayar iuran, keaktifan membayar pengelolaan SPAM pada masing-masing desa. Dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat maka tingkat kemampuan membayar dan keaktifan membayar iuran pengelolaan SPAM akan semakin tinggi. 4) Perbandingan tingkat pendapatan dengan tingkat pengeluaran pada kedua desa berbeda yaitu di desa Tarinsing bahwa pendapatan tertinggi sebesar Rp 1 jt s/d Rp 2 jt tetapi tingkat pengeluarannya sekitar Rp 500 rb s/d Rp 1 jt kemudian desa Wuran pendapatan tertinggi sebesar Rp 500 rb s/d Rp 1 jt tetapi tingkat pengeluarannya sekitar Rp 500 rb s/d Rp 1 jt. Hal ini mengartikan bahwa nilai selisih pendapatan dikurangi pengeluaran hanya terdapat di desa Tarinsing. Dengan adanya nilai selisih pendapatan dengan pengeluaran, hal ini akan berdampak terhadap kemampuan

membayar iuran dan keaktifan membayar iuran pengelolaan SPAM di desa Tarinsing lebih tinggi dibandingkan desa Wuran. 5) Perbandingan penduduk desa Wuran dan Tarinsing yang rata-rata per KK sama hanya antara 3 s/d 4 jiwa, ini hanya akan berpengaruh terhadap kuantitas kebutuhan air minum tidak akan ada pengaruh terhadap kelanjutan pengelolaan bangunan SPAM. 6) Perbedaan umur pada kedua desa mengenai umur diatas 50 tahun dimana desa Wuran lebih tinggi, yang akan mengakibatkan jumlah tokoh masyarakat yang dituakan/ditokohnya lebih banyak, sehingga berdampak pada makin banyak tokoh yang dituakan/ditokohkan maka akan lebih mudah untuk mempengaruhi masyarakat lainnya dalam pengelolaan bangunan SPAM, dan 7) Perbandingan kepemilikan luas tanah yang berbeda pada kedua desa, dimana desa Wuran mempunyai kepemilikan luas tanah dan luas bangunan lebih banyak di bandingkan desa Tarinsing, ini menggambarkan masyarakat desa Wuran lebih kaya dibandingkan desa Tarinsing, maka akan berdampak terhadap tingkat keaktifan dan kemampuan membayar iuran pengelolaan SPAM lebih tinggi di desa Wuran.

4.2 Identifikasi Bentuk Peran Serta Masyarakat

4.2.1 Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Tahap Perencanaan

Analisis bentuk peran serta masyarakat dalam tahap perencanaan desa Tarinsing dan desa Wuran sebelum proses pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan dengan melakukan analisis terhadap bentuk peran serta masyarakat dalam bentuk tidak ada, pikiran, tenaga, barang/material, dan dana seperti tergambar dalam Gambar 4.11 sebagai berikut :



Sumber : Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.11
BENTUK PARTISIPASI TAHAP PERENCANAAN

Berdasarkan hasil kuesioner Gambar 4.11 dapat diketahui pada desa Tarinsing bahwa berpartisipasi dengan tidak ada sebanyak 55%, berpartisipasi dengan pemikiran sebanyak 45%, tenaga, material/bahan, dan dana masing-masing sebanyak 0%.

Kemudian pada desa Wuran bahwa berpartisipasi dengan tidak ada sebanyak 83%, berpartisipasi dengan pemikiran sebanyak 17%, tenaga, material/bahan, dan dana masing-masing sebanyak 0%.

Perbandingan pelibatan masyarakat pada kedua desa tersebut, bahwa tingkat ketidakterlibatan masyarakat lebih tinggi di desa Wuran dibanding desa tarinsing, berdasarkan hasil kuesioner kedua desa tersebut, bahwa pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan sangat erat kaitannya dalam penentuan lokasi bangunan SPAM.

Beberapa pendapat masyarakat tentang pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan SPAM di desa Wuran ini, yang ikut memperkuat hasil kuesioner diatas antara lain:

“Kami sebagai warga yang ada didesa Wuran, mulai dari perencanaan sampai dengan dibangunnya SPAM, tidak pernah diundang untuk sosialisasi. Kami sebagai warga sangat tidak setuju dibangunnya SPAM, yang berada jauh dari jangkauan masyarakat terutama dari keadaan, letak bangunan dan segi kualitas airnya. Segi keamanan juga tidak menjamin, terbukti dengan kondisi sekarang bahwa robin penyedot air telah hilang. Sampai sekarang tidak ada serah terima dari pihak pemborong kepada pihak desa Wuran. Kami dari pihak warga seharusnya diberikan pengarahannya, baik dari segi kebutuhan dan kewajiban sebagai pelanggan. Letak pembangunan SPAM seharusnya disepakati bersama dengan warga”

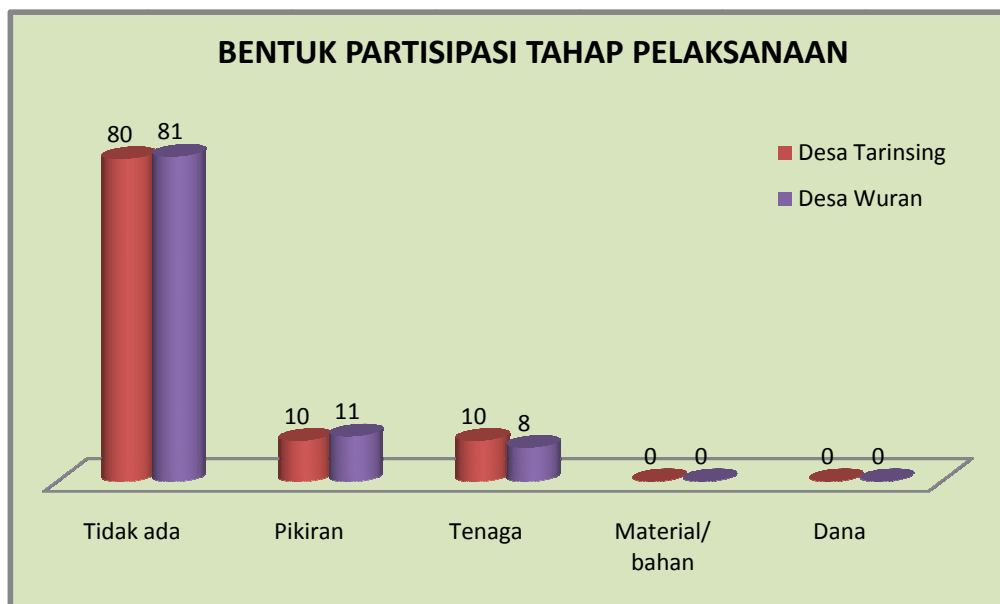
Berdasarkan hasil pembicaraan dengan tokoh masyarakat desa Wuran tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa masyarakat Wuran kurang dilibatkan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan terbangunnya SPAM, sehingga sangat berdampak kepada ketidaksetujuan masyarakat akan lokasi pembangunan SPAM yang ada saat ini, sangat jauh dari lokasi permukiman masyarakat sehingga rawan terhadap kehilangan/pemeliharaan aset bangunan SPAM tersebut.

4.2.2 Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan

Analisis bentuk peran serta masyarakat desa Tarinsing dan desa Wuran dalam tahap pelaksanaan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). Kemudian melakukan analisis terhadap bentuk peran serta masyarakat dalam bentuk tidak ada, pikiran, tenaga, barang/material, dan dana seperti tergambar dalam Gambar 4.12.

Berdasarkan hasil kuesioner Gambar 4.12 dapat diketahui pada desa Tarinsing bahwa berpartisipasi dengan tidak ada sebanyak 80%, berpartisipasi dengan pemikiran sebanyak 10%, tenaga sebanyak 10%, material/bahan, dan dana masing-masing sebanyak 0%.

Kemudian pada desa Wuran bahwa berpartisipasi dengan dengan tidak ada sebanyak 81%, berpartisipasi dengan pemikiran sebanyak 11%, tenaga sebanyak 8%, material/bahan dan dana masing-masing sebanyak 0%.



Sumber : Hasil Olahan, 2010

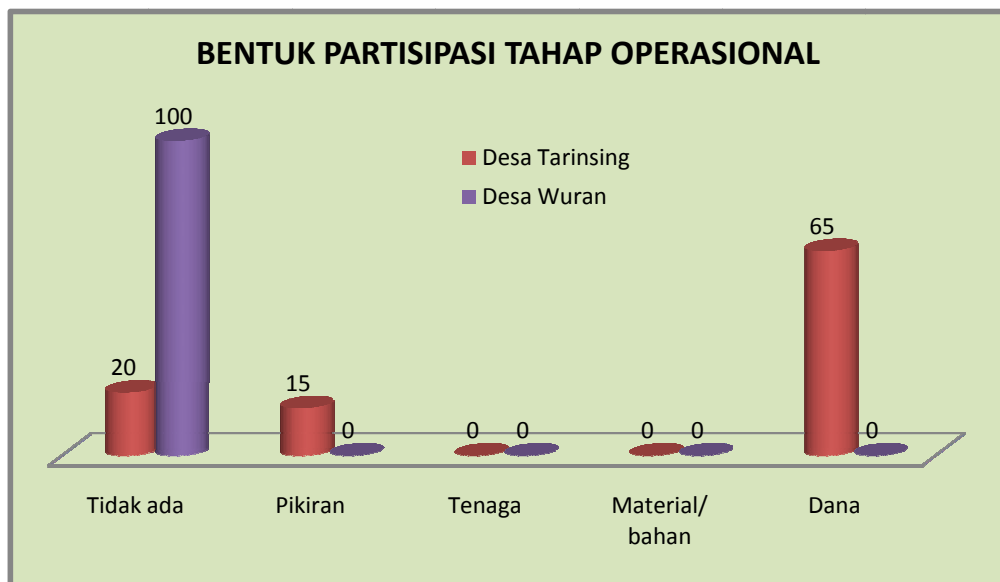
GAMBAR 4.12
BENTUK PARTISIPASI TAHAP PELAKSANAAN

Perbandingan pelibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan SPAM pada kedua desa hampir sama yaitu sama-sama tidak ada sekitar 80%, Hal ini menggambarkan bahwa pelibatan masyarakat pada kedua desa sangat sedikit sebagai tenaga kerja bangunan SPAM, dikarenakan pada umumnya profesi kedua desa tersebut

sebagai petani karet sehingga pihak pemborong membawa tenaga kerja dari luar yang lebih mengerti tentang bangunan SPAM.

4.2.3 Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Tahap Operasional

Analisis bentuk peran serta masyarakat desa Tarinsing dan desa Wuran dalam tahap operasional sistem penyediaan air minum (SPAM) pasca pembangunan. Kemudian melakukan analisis terhadap bentuk peran serta masyarakat dalam bentuk tidak ada, pikiran, tenaga, barang/material dan dana seperti tergambar dalam Gambar 4.13 sebagai berikut :



Sumber : Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.13
BENTUK PARTISIPASI TAHAP OPERASIONAL

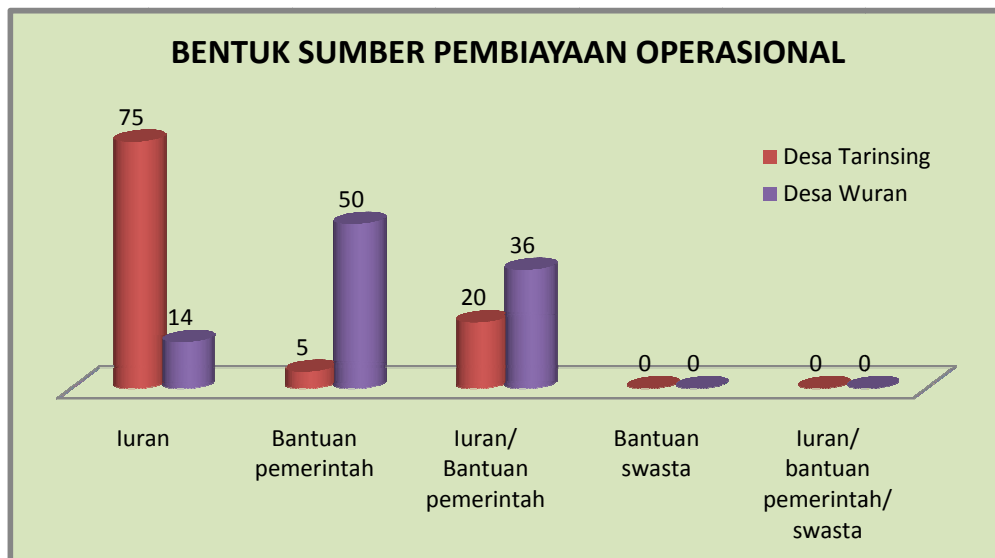
Berdasarkan hasil kuesioner Gambar 4.13 dapat diketahui pada desa Tarinsing bahwa berpartisipasi dengan dana sebanyak 65% berpartisipasi dengan tidak ada sebanyak 20%, berpartisipasi dengan pemikiran sebanyak 15%, tenaga, material/bahan dan dana masing-masing sebanyak 0%.

Kemudian pada desa Wuran bahwa berpartisipasi dengan dengan tidak ada sebanyak 100%, berpartisipasi dengan pemikiran, tenaga, material/bahan, dan dana masing-masing sebanyak 0%.

Perbandingan partisipasi masyarakat dalam tahap operasional bangunan SPAM pada kedua desa adalah berbeda, di desa Wuram menunjukkan tidak ada sebesar 100%, hal ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap operasional tidak ada sama sekali dikarenakan tidak beroperasionalnya bangunan SPAM pasca pembangunan. Tetapi dengan sebaliknya di desa Tarinsing partisipasi masyarakat dalam bentuk dana sebesar 65%, hal ini menggambarkan bahwa bangunan SPAM yang ada di desa Tarinsing beroperasi pasca pembangunan.

4.2.4 Bentuk Sumber Pembiayaan Operasional

Analisis bentuk peran serta masyarakat desa Tarinsing dan desa Wuram dalam sumber pembiayaan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM). Kemudian melakukan analisis terhadap bentuk peran serta masyarakat dalam bentuk iuran, bantuan pemerintah, iuran/bantuan pemerintah, bantuan swasta dan iuran/bantuan pemerintah/swasta seperti tergambar dalam Gambar 4.14 sebagai berikut :



Sumber : Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.14
BENTUK SUMBER PEMBIAYAAN OPERASIONAL

Berdasarkan hasil kuesioner Gambar 4.14 dapat diketahui pada desa Tarinsing bahwa bentuk sumber pembiayaan operasional sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan iuran sebanyak 75%, iuran/bantuan pemerintah sebanyak 20%, bantuan pemerintah sebanyak 5%, bantuan swasta, dan iuran/bantuan pemerintah/swasta masing-masing sebanyak 0%.

Kemudian pada desa Wuran bahwa bentuk sumber pembiayaan operasional sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan bantuan pemerintah sebanyak 50%, iuran/bantuan pemerintah sebanyak 36%, iuran sebanyak 14%, bantuan swasta, dan iuran/bantuan pemerintah/swasta masing-masing sebanyak 0%.

4.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi dari Bentuk Peran Serta Masyarakat.

Berdasarkan bentuk peran serta masyarakat yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada kedua desa tersebut adalah berbeda dalam setiap tahapan sistem penyediaan air minum (SPAM) yaitu :

1. Dalam tahap perencanaan untuk desa Tarinsing tergambar berpartisipasi dengan tidak ada sebanyak 55%, berpartisipasi dengan pemikiran sebanyak 45% ini mengartikan bahwa sebagian besar masyarakat desa tarinsing tidak ikut terlibat sekitar 55% dan sebagian masyarakat sekitar 45% dilibat dalam tahap perencanaan sistem penyediaan air minum. Dalam tahap perencanaan ini sebagai penentuan titik sumber mata air, lintasan jaringan pipa dan tempat hidran umum.

Akan tetapi untuk desa Wuran tergambar berpartisipasi dengan tidak ada sebanyak 83%, berpartisipasi dengan pemikiran sebanyak 17%, ini mengartikan bahwa sebagian besar masyarakat (83%) tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan yaitu dalam penentuan titik sumber air baku, lintasan jaringan pipa dan hidran umum. Hanya sekitar 17% masyarakat dilibatkan dalam tahap awal perencanaan.

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan untuk desa Tarinsing lebih tinggi dibandingkan dengan desa Wuran. Hal ini yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan adanya perbedaan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada kedua desa tersebut.

2. Dalam tahap pelaksanaan untuk desa Tarinsing bahwa berpartisipasi dengan tidak ada sebanyak 80%, ini mengartikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) tersebut, tidak melibatkan masyarakat setempat secara swakelola akan tetapi proses pelaksanaan dengan kontraktual/kontraktor. Hanya sebagian kecil masyarakat setempat dilibat dalam tahap pelaksanaan, ini menggambarkan ada masyarakat yang bekerja dengan kontraktor pelaksana. Akan tetapi untuk desa Wuran bahwa berpartisipasi dengan tidak ada sebanyak 81% ini mengartikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sistem penyediaan air

minum (SPAM) tersebut, tidak melibatkan masyarakat setempat secara swakelola akan tetapi proses pelaksanaan dengan kontraktual/ kontraktor. Hanya sebagian kecil masyarakat setempat dilibat dalam tahap pelaksanaan, ini menggambarkan ada masyarakat yang bekerja dengan kontraktor pelaksana.

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan untuk desa Tarinsing hampir sama dengan desa Wurun. Hal ini mengartikan bahwa hal tersebut bukan merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada kedua desa tersebut.

3. Dalam tahap operasional untuk desa Tarinsing bahwa berpartisipasi dengan dana sebanyak 65%, ini mengartikan bahwa sebagian besar masyarakat yang terlayani sistem penyediaan air minum (SPAM) ikut memberikan sumbangan dana dalam bentuk iuran bulanan.

Akan tetapi untuk desa Wurun bahwa berpartisipasi dengan dengan tidak ada sebanyak 100%, ini mengartikan bahwa semua masyarakat tidak memberikan sumbangan dana dalam bentuk iuran, hal ini dikarenakan tidak beroperasinya SPAM tersebut.

Adanya perbedaan pendapat dalam sumbangan dana pada kedua tersebut dikarenakan oleh beroperasinya SPAM Tarinsing tetapi sistem penyediaan air minum (SPAM) Wurun tidak beroperasi. Akan tetapi pendapat berpartisipasi dengan dana pada kedua desa tersebut adalah sekitar 65% ke atas, berarti beroperasionalnya SPAM sangat tergantung dengan sumber dana dalam bentuk iuran.

4. Dalam hal sumber pembiayaan untuk pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk desa Tarinsing bahwa bentuk sumber pembiayaan operasional sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan iuran sebanyak 75%, ini mengartikan bahwa sumber pembiayaan utama dalam operasional adalah iuran bulan dari masyarakat. Untuk pendapat swadana/bantuan pemerintah sebanyak 20%, mengartikan bahwa sebagian masyarakat mengharapkan bantuan pemerintah untuk membantu iuran masyarakat.

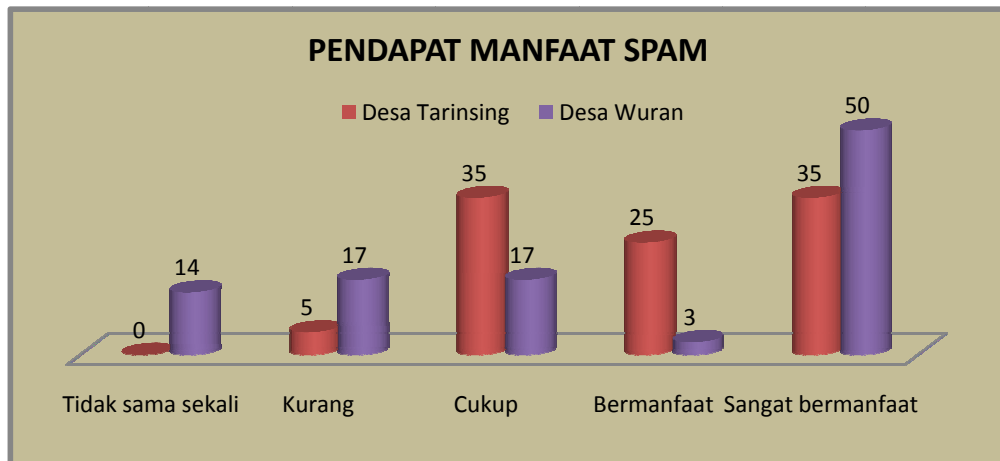
Akan tetapi untuk desa Wurun bahwa pendapat bantuan pemerintah sebanyak 50% sebagai sumber pembiayaan, ini mengartikan masyarakat Tarinsing sangat mengharapkan bantuan pemerintah dan pendapat dengan iuran hanya sebanyak 14% berarti tingkat kesadaran masyarakat relatif rendah dalam sumbangan iuran.

Berdasarkan kedua data desa tersebut bahwa masyarakat desa Tarinsing mempunyai tingkat swadaya lebih tinggi dibandingkan dengan desa Wuran. Bahwa iuran masyarakat merupakan sumber biaya utama operasional sistem penyediaan air minum (SPAM). Hal ini menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi operasionalnya SPAM pasca pembangunan.

4.3 Identifikasi Aspek Teknis SPAM

4.3.1 Pendapat Masyarakat Tentang Manfaat SPAM

Analisis pendapat masyarakat mengenai manfaat dibangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM) pada desa Tarinsing dari hasil kuesioner Gambar 4.15 dapat diketahui bahwa yang menyatakan cukup dan sangat bermanfaat sebanyak 35%, bermanfaat sebanyak 25%, kurang sebanyak 5% dan tidak sama sekali sebanyak 0%.



Sumber : Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.15
PENDAPAT MANFAAT SPAM

Kemudian desa Wuran yang menyatakan sangat bermanfaat sebanyak 50%, kurang dan cukup sebanyak 17%, tidak sama sekali sebanyak 14% dan bermanfaat sebanyak 5%.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut menggambarkan bahwa masyarakat desa Tarinsing berpendapat mengenai pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang ada sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan air minum akan tetapi masyarakat desa Wuran sangat mempunyai harapan besar untuk dimanfaatkan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang telah dibangun.

Beberapa pendapat masyarakat tentang proses pembangunan SPAM di desa Wuran ini, yang ikut memperkuat hasil kuesioner diatas antara lain:

“Saya jadi Kepala Desa baru terpilih pada bulan Oktober 2009 kemarin. sampai dengan saat ini tidak ada serah terima aset bangunan SPAM dari pejabat Kepala Desa Wuran (Sekdes Wuran) ke Kepala Desa Wuran yang baru. Akan tetapi waktu sebelum jadi kepala desa, saya telah mengetahui bahwa saudara BPD (Badan Perwakilan Desa) atas nama Tiurlan sebagai pelaksana/ mitra kerja dari kontraktor CV FANA JAYA selaku pelaksana pekerjaan SPAM di desa Wuran. Adapun lokasi pembangunan jaringan pipa ini adalah melewati tanah milik dari saudara Tiurlan selaku BPD. Sampai dengan selesainya bangunan tersebut, kunci-kunci peralatan bangunan SPAM, sampai sekarang masih pada saudara Tiurlan”

“Saya sebagai warga sangat setuju terhadap dibangunnya SPAM di desa kami. Akan tetapi kegagalan pengelolaan SPAM yang ada di kampung Wuran ini dikarenakan kurangnya keterbukaan antara pengurus dengan masyarakat. Maka kami memohon dari pihak instansi terkait untuk meninjau kembali didalam pelaksanaan sistem pengelolaan air minum. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih”

“Proyek SPAM yang ada didesa kami adalah gagal total, karena dikerjakan oleh pemborong siluman, semata-mata mencari keuntungan sendiri, tanpa ada koordinasi dengan masyarakat setempat. Maka oleh sebab itu kami mohon dari pihak pemerintah terkait dengan proyek SPAM ini, supaya membantu dalam hal perbaikan sehingga dapat difungsikan kembali bangunan SPAM. Dan atas perhatiannya kami terima kasih”

Berdasarkan hasil pembicaraan dengan kepala desa dan tokoh masyarakat desa Wuran tersebut diatas, maka sangat jelas adanya konflik kepentingan di dalam anggota masyarakat, dimana saudara Tiurlan selaku BPD, mitra kerja dari pemborong CV Fana Jaya sekaligus pemilik tanah yang dilewati oleh jaringan perpipaan. Adanya perbedaan kontribusi yang sangat berbeda dari sesama masyarakat dalam proses pembangunan SPAM, akan mengakibatkan kesulitan dalam pembentukan badan pengelola pasca pembangunan. Serta ketidakterbukaan pihak pemborong dan saudara Tiurlan selaku mitra kerja pemborong terhadap masyarakat Wuran mengenai pembangunan SPAM tersebut.

Hal ini akan mengakibatkan adanya saling curiga antar masyarakat Wuran mengenai proses pembangunan SPAM sampai dengan selesainya bangunan tersebut, hal ini menjadi penyebab utama kegagalan pengelolaan SPAM pasca pembangunan.

4.3.2 Pendapat Masyarakat Tentang Lokasi SPAM

Analisis pendapat masyarakat mengenai lokasi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada desa Tarinsing dari hasil kuesioner Gambar 4.16 dapat diketahui yang menyatakan sangat tepat sebanyak 50%, kurang tepat dan tepat sebanyak 25%, tidak tepat dan sedikit tepat masing-masing sebanyak 0%.

Kemudian desa Wuran yang menyatakan tidak tepat sebanyak 64%, kurang tepat sebanyak 28%, sangat tepat sebanyak 8% serta sedikit tepat dan tepat sebanyak 0%.



Sumber : Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.16

PENDAPAT LOKASI PEMBANGUNAN SPAM

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut menggambarkan bahwa masyarakat desa Tarinsing berpendapat mengenai lokasi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang ada sudah tepat akan tetapi pendapat masyarakat desa Wuran terhadap lokasi pembangunan yang ada sangat tidak tepat. Dalam hal ini pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dalam penentuan titik lokasi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) tidak mengajak masyarakat dalam penentuan tempat pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Beberapa pendapat masyarakat tentang lokasi pembangunan SPAM di desa Wuran ini, yang ikut memperkuat hasil kuesioner diatas antara lain:

Kami sebagai warga yang ada didesa Wuran, mulai dari perencanaan sampai dengan terbangunnya SPAM, tidak pernah diundang untuk sosialisasi. Kami sebagai warga sangat tidak setuju dibangunnya SPAM, yang berada jauh dari jangkauan masyarakat terutama dari keadaan, letak bangunan dan segi kualitas airnya. Segi keamanan juga tidak menjamin, terbukti dengan kondisi sekarang bahwa robin penyedot air telah hilang. Sampai sekarang tidak ada serah terima dari pihak pemborong kepada pihak desa Wuran. Kami dari pihak warga seharusnya diberikan pengarahan, baik dari segi kebutuhan dan kewajiban sebagai pelanggan. Letak pembangunan SPAM seharusnya disepakati bersama dengan warga.

Berdasarkan hasil pembicaraan dengan tokoh masyarakat desa Wuran tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa masyarakat Wuran kurang dilibatkan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan terbangunnya SPAM, sehingga sangat berdampak kepada ketidaksetujuan masyarakat akan lokasi pembangunan SPAM yang ada saat ini, sangat jauh dari lokasi permukiman masyarakat sehingga rawan terhadap kehilangan/pemeliharaan aset bangunan SPAM tersebut.

Akibat dari ketidaktepatan lokasi bangunan SPAM ini, akan mengakibatkan kurangnya kepedulian masyarakat akan bangunan SPAM yang ada sehingga menjadi salah satu penyebab kegagalan pengelolaan SPAM pasca pembangunan.

4.3.3 Kondisi Eksisting Bangunan SPAM

4.3.3.1 Sumber Air Baku.

Sumber air baku sistem penyediaan air minum (SPAM) pada desa Tarinsing adalah mata air dekat sungai kecil yang melintasi pedesaan, dengan kualitas air yang agak bersih dan bening. Pada umumnya masyarakat desa Tarinsing menggunakan air minum dari sumber mata air tersebut. Adapaun jarak sumber mata air dengan permukiman masyarakat sekitar 400 m. Sumber mata air ini dilindungi dengan bangunan pembatas yang terbuat dari kayu ulin sehingga kotoran yang ada di sungai tidak masuk ke mata air. Akan tetapi lokasi sumber air ini sekaligus tempat permandian umum masyarakat (lihat Gambar 4.17) kemudian arah hilir sungai ini dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat perendaman karet. Akan tetapi ketika mesin pompa rusak maka masyarakat langsung mengambil air ke sumber mata air dengan menggunakan ember.

DESA TARINSING	DESA WURAN

Sumber : Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.17

Sumber air baku sistem penyediaan air minum (SPAM) pada desa Wuram adalah air permukaan Sungai Paku yang besar yang melintasi pedesaan seperti terlihat pada Gambar 4.17, dengan kualitas air agak kecoklatan yang tidak layak untuk diminum. Adapun jarak sumber air dengan lokasi permukiman yang terdekat sejauh 75m. Sungai ini mengalir setiap saat baik saat musim hujan maupun musim kemarau dengan debit air yang besar. Bangunan yang ada di sekitar lokasi air baku adalah rumah genset, genset, pompa mesin dan mesin sedot alkon. Akan tetapi lokasi sumber air ini sekaligus dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat perendaman karet.

4.3.3.2 Rumah Mesin.

Rumah mesin adalah bangunan yang letaknya berada di sekitar sumber air baku yang dilengkapi dengan genset, pompa sentrifugal dan mesin penyedot seperti terlihat pada Gambar 4.18.

Pada desa Tarinsing bangunan rumah mesin yang dilengkapi dengan peralatannya masih terpelihara sampai dengan waktu penelitian serta peralatan mesin masih fungsional, akan tetapi pada saat penelitian adanya kerusakan shall pada genset yang kemudian segera pengelola memperbaiki dan membeli suku cadangnya.

Pada desa Wuram seperti terlihat pada Gambar 4.18, bahwa bangunan rumah mesin tidak terpelihara dengan baik, akibat tidak beroperasionalnya sistem penyediaan air minum (SPAM) yang ada pada desa tersebut sejak bangunan tersebut selesai dibangun.

SPAM DESA TARINSING	
SPAM DESA WURAN	

Sumber : Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.18

RUMAH MESIN

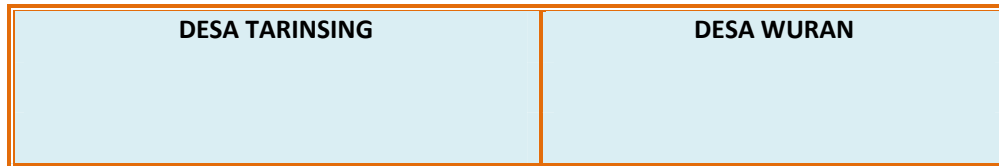
RUMAH MESIN

RUMAH MESIN

POMPA
BAK ENYARINGAN
SENTIFUGAL

4.3.3.3 Jaringan perpipaan.

Pembangunan jaringan pipa air minum disesuaikan dengan topografi dari kedua desa masing-masing (Lihat Gambar 4.19). Pada desa Tarinsing dengan pipa induk diameter 2 inch sebanyak 72 batang (432 m), diameter 1 ½ inch sebanyak 50 batang dan diameter ½ inch sebanyak 24 batang.



Sumber : Hasil Survei dan DPU, 2009

GAMBAR 4.19

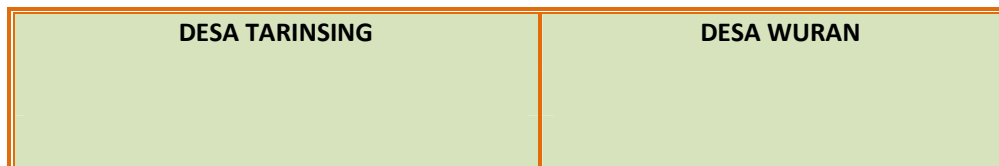
PEMASANGAN
PIPA

PEMASANGAN
PIPA

Pada desa Wurun dengan pipa induk diameter 2 inch sebanyak 250 batang (1500 m), diameter 1 ½ inch sebanyak 50 batang dan diameter ½ inch sebanyak 24 batang. Jaringan pipa tersebut melewati perkebunan karet masyarakat milik saudara Tiurlan (anggota BPD desa Wurun) sekaligus mitra kerja kontraktor CV FANA JAYA.

4.3.3.4 Hidran Umum (HU).

Hidran umum dipasang pada masing-masing desa, pada desa tarinsing dengan kapasitas 1200 liter per buah dengan jumlah 9 tong hidran umum seperti terlihat pada Gambar 4.20. Jumlah peserta yang terlayani sebanyak 24 KK atau rata-rata 3 KK per tong.



Sumber : Hasil Survei, 2009

GAMBAR 4.20

Pada desa Wurun dengan kapasitas 1200 liter per buah dengan jumlah 3 tong hidran umum yang menyebar pada titik lokasi permukiman. Lokasi permukiman pada

HIDRAN UMUM
HU/3KK

HIDRAN UMUM
SUMUR CSHW

desa Wuram ini adalah memanjang sekitar 1 km dan antar RT mempunyai jarak agak jauh sekitar 300 m. Sehingga hidran umum tersebut ditempatkan pada pusat konsentrasi perumahan. Akibat tidak berfungsinya sistem penyediaan air minum (SPAM) yang ada di desa Wuram, mengakibatkan bangunan hidran umum tersebut kurang terpelihara seperti terlihat pada gambar 4.19. Kemudian pada tahun anggaran 2009 pemerintah meluncurkan program baru yaitu penyediaan air bersih pedesaan lewat CWSHP Dinas Kesehatan dengan membuat sumur gali sebanyak 16 titik sumur di desa Wuram dengan model sumur gali seperti terlihat pada Gambar 4.20

4.3.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dari Aspek Teknis SPAM

1. Berdasarkan hasil kuesioner pendapat masyarakat mengenai manfaat dan lokasi SPAM.

Pendapat masyarakat mengenai manfaat dibangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan, masyarakat kedua desa tersebut berpendapat sangat bermanfaat dengan dibangunnya SPAM, dengan harapan bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum khususnya saat musim kemarau. Sebagian masyarakat desa Tarinsing berpendapat cukup dan sangat bermanfaat sebanyak 35%, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat desa Tarinsing cukup menikmati manfaat dari terbangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM) di desa tersebut. Tetapi pendapat masyarakat desa Wuram sebesar 50%, ini menggambarkan bahwa masyarakat tersebut sangat berharap dengan dibangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM) di desa tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum khususnya pada musim kemarau.

Akibat adanya perbedaan kontribusi yang sangat berbeda dari sesama masyarakat dan konflik kepentingan di dalam anggota masyarakat, baik saudara Tiurlan selaku BPD, mitra kerja dari pemborong CV Fana Jaya sekaligus pemilik tanah yang dilewati oleh jaringan perpipaan. Serta ketidakterbukaan pihak pemborong dan saudara Tiurlan selaku mitra kerja pemborong terhadap masyarakat Wuram mengenai pembangunan SPAM tersebut. Hal ini merupakan faktor penyebab utama kegagalan pengelolaan SPAM pasca pembangunan.

Kurang dilibatkannya masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan terbangunnya SPAM, sehingga sangat berdampak kepada ketidaksetujuan masyarakat akan lokasi pembangunan SPAM yang ada saat ini, sangat jauh dari lokasi permukiman masyarakat sehingga rawan terhadap kehilangan/pemeliharaan aset bangunan SPAM tersebut. Akibat dari ketidaktepatan lokasi bangunan SPAM ini, akan mengakibatkan kurangnya kepedulian masyarakat akan bangunan SPAM yang ada sehingga menjadi salah satu penyebab kegagalan pengelolaan SPAM pasca pembangunan.

2. Bangunan SPAM yang terdiri rumah mesin, genset, pompa sentrifugal, jaringan pipa dan hidran umum pada kedua desa adalah sama dan berbeda dalam hal panjang pipa dan jumlah hidran umum.

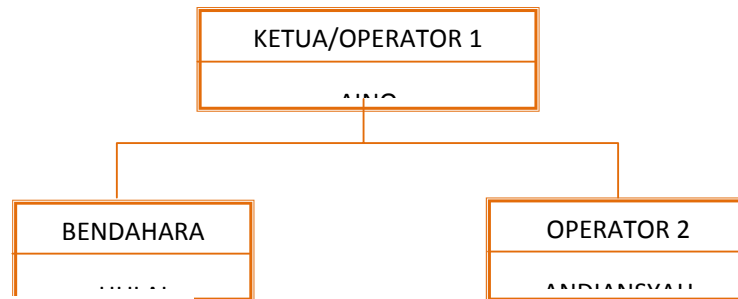
Bangunan SPAM akan beroperasi dan terpelihara dengan terbentuknya badan pengelola. Seperti halnya pada desa Tarinsing dengan dibentuknya badan pengelola sebagai penanggung jawab pengelolaan SPAM, akan tetapi di desa Wuran bahwa badan pengelola tidak terbentuk, akan berdampak kepada ketidakpedulian akan bangunan SPAM yang telah terbangun. Kemudian dengan masuknya proyek penanganan serupa seperti pengadaan sumur oleh CWSHP Dinas Kesehatan pada desa Wuran berakibat kurangnya kepedulian masyarakat mengenai operasional dan pemeliharaan bangunan SPAM yang telah terbangun.

4.4 Identifikasi Manajemen Pengelolaan SPAM

4.4.1 Organisasi eksisting di masyarakat

Berdasarkan hasil survei dan wawancara pada lokasi penelitian, organisasi yang ada adalah struktur organisasi pemerintahan desa pada umumnya. Pemerintahan Desa Tarinsing mengadakan musyawarah desa untuk memprakarsai dibentuknya badan pengelola sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terdiri dari anggota masyarakat, yang mempunyai tugas dalam pengelolaan SPAM pasca pembangunan. Melalui musyawarah desa terpilih saudara Aino sebagai ketua badan pengelola sistem penyediaan air minum (SPAM). Struktur organisasi badan pengelola SPAM desa Tarinsing seperti Gambar 4.21. Akan tetapi pada desa Wuran pasca pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) selesai, tidak terbentuk badan pengelola. Hal ini

disebabkan tidak adanya serah terima Dinas Pekerjaan Umum kepada Kepala Desa Wuran, kemudian di ikuti dengan adanya pergantian Kepala Desa Wuran. Kepala Desa yang baru merasa tidak adanya penyerahan aset tentang bangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dari pejabat lama. Akibat kurangnya koordinasi dari berbagai pihak yang terkait seperti pejabat lama kepala desa, BPD, kepala desa baru, kontraktor dan Dinas PU Kabupaten Barito Timur selaku pemilik proyek mengakibatkan bangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42 Tahun 2007 petunjuk teknis DAK infrastruktur subbidang air minum menyebutkan bahwa untuk menjaga keberlanjutan program SPAM sederhana pasca pembangunan, maka perlu dibentuk lembaga di tingkat masyarakat sebagai penyelenggara SPAM.



Sumber: Desa Tarinsing, 2009

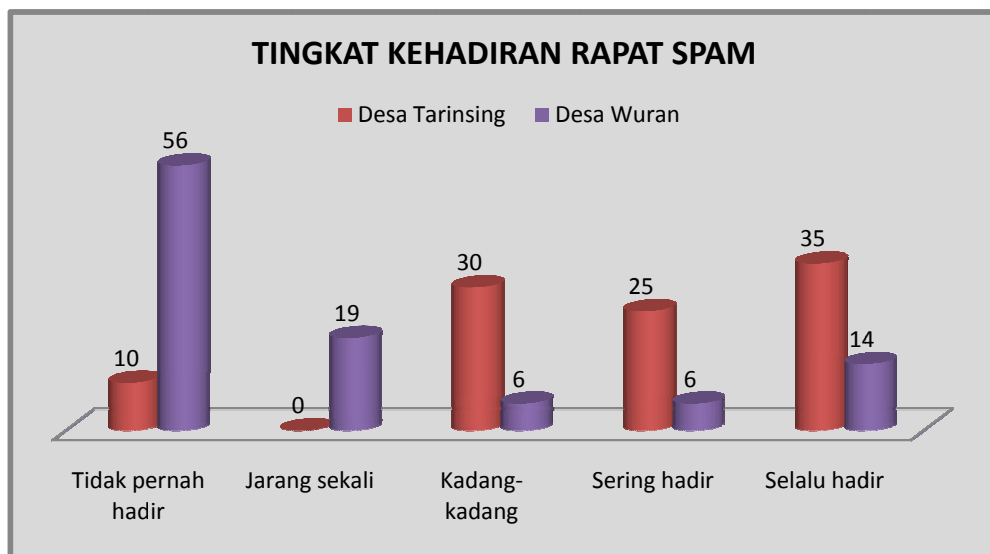
GAMBAR 4.21
BADAN PENGELOLA SPAM DESA TARINSING

4.4.2 Tingkat Kehadiran Rapat Pengelolaan SPAM

Berdasarkan hasil kuesioner Gambar 4.22 dapat diketahui pada desa Tarinsing bahwa tingkat kehadiran rapat pengelolaan SPAM yang menyatakan selalu hadir sebanyak 7 responden (35%), kadang-kadang sebanyak 6 responden (30%), sering hadir sebanyak 5 responden (25%), tidak pernah hadir sebanyak 2 responden (10%), dan jarang sekali tidak ada.

Kemudian desa Wuran yang menyatakan tidak pernah hadir sebanyak 20 responden (56%), jarang sekali sebanyak 7 responden (19%), selalu hadir sebanyak 5 responden (14%), kadang-kadang dan sering hadir masing-masing sebanyak 2 responden (6%).

Hasil perbandingan perasaan diundang rapat pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada kedua desa, bahwa desa Tarinsing mempunyai perasaan selalu berangkat dengan sukarela yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa Wurun. Akan tetapi kedua desa tersebut mempunyai perasaan selalu berangkat dengan sukarela yang sangat besar yaitu diatas 50% ke atas. Dari hasil grafik tergambar bahwa di desa Tarinsing tingkat kehadiran rapat SPAM lebih tinggi dibandingkan desa Wurun, ini merupakan modal sosial yang sangat baik di desa Tarinsing bagi keberlanjutan pengelolaan SPAM.



Sumber: Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.22
TINGKAT KEHADIRAN RAPAT SPAM

4.4.3 Iuran Operasional

Adanya iuran operasional berarti bangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dapat berfungsi dengan baik atau beroperasi, hal ini yang terjadi di desa Tarinsing dimana bangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) beroperasi dengan baik. Adapaun besaran iuran operasional adalah sebesar Rp 25.000 sebulan/KK, dengan metoda pembayaran yang dicicil 3 kali minggu I Rp 10.000, minggu II Rp 5.000, minggu III Rp 5.000 dan minggu IV Rp 5.000. Rincian pendapatan dan pengeluaran seperti pada pada Tabel IV.2 .

Dari hasil Tabel IV.15 tergambar adanya nilai selisih dari pendapatan dengan pengeluaran yang disebut dengan saldo. Sesuai dengan hasil musyawarah desa bahwa telah disepakati besaran iuran/ bulan sebesar Rp 25.000 dan nilai saldo akan digunakan untuk biaya pemeliharaan mesin, pipa dan kran. Dari jumlah warga desa yang ikut pelayanan air ini sebanyak 24 KK (55%) dari jumlah warga desa Tarinsing sebanyak 44 KK. Sebagian warga tidak ikut karena menunggu situasi hasil kerja badan pengelola dalam mengoperasikan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sebagian warga khususnya RT 3 dikarenakan wilayahnya agak berjauhan dan perumahannya menyebar sehingga keterbatasan dalam jaringan.

TABEL IV.15

NERACA

No.	KETERANGAN	LOKASI	
		Desa Tarinsing	Desa Wuran
		Nilai Rp	Nilai Rp
I	PENDAPATAN		
	IURAN 24 KK @ Rp 25.000	575.000	
	JUMLAH I	575.000	
II	PENGELUARAN :		
1	Belanja Jasa :		TIDAK
a	Ketua/Operator 1 @ Rp 150.000,-	75.000	OPERASIONAL
b	Operator 2 @ Rp 150.000,-	75.000	
c	Bendahara @ Rp 25.000,-	25.000	
2	Belanja Barang :		
a	BBM 22 liter @ Rp 6.000	132.000	
b	Oli 2 liter @ Rp 25.000	50.000	
	JUMLAH II (1+2)	357.000	
III	SALDO (I-II)	218.000	

Catatan :

- . Saldo Rp 218.000,- digunakan untuk biaya pemeliharaan mesin, pompa dan kran air.
- . Bendahara tidak ikut membayar iuran Rp 25.000,- kompensasi terhadap honor

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2010

4.4.4 Kemampuan Membayar Iuran Operasional

Dari hasil Gambar 4.23 bahwa tingkat kemampuan masyarakat membayar iuran operasional untuk desa Taringsing adalah untuk Rp 20.000 ke atas sebanyak 30%, Rp 5.000 s/d Rp 10.000 dan Rp 10.000 s/d Rp 20.000 masing-masing 25%, s/d Rp 5.000 sebanyak 15% dan gratis sebanyak 5%.

Kemudian untuk desa Wuram adalah untuk s/d Rp 5.000 sebanyak 36%, untuk Rp 5.000 s/d Rp 10.000 sebanyak 31%, gratis sebanyak 28%, Rp 20.000 ke atas sebanyak 6%, dan Rp 10.000 s/d Rp 20.000 sebanyak 0%.

Berdasarkan hasil kedua desa tersebut dapat digambarkan bahwa desa Taringsing mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa Wuram, hal ini berbeda dikarenakan di desa Wuram belum beroperasi SPAM sehingga mempengaruhi pendapat masyarakat.



Sumber: Hasil Olahan, 2010

GAMBAR 4.23
IURAN OPERASIONAL

4.4.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi dari Manajemen Pengelolaan SPAM

1. Badan Pengelola, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dilapangan bahwa untuk desa Tarinsing, adanya suatu badan pengelola SPAM yang mempunyai tugas mengoperasikan SPAM, memelihara bangunan SPAM serta memungut iuran bulanan. Struktur organisasi badan pengelola SPAM seperti pada GAMBAR 4.6 yang di ketuai oleh saudara Aino. Sesuai dengan Permen PU No. No.18/PRT/M/2007 tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM pada pasal 42 ayat 7 disebutkan Kelembagaan penyelenggara harus disiapkan dan dibentuk sebelum SPAM selesai dibangun agar SPAM dapat langsung beroperasi. Bekerjanya badan pengelola ini, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi beroperasionalnya bangunan SPAM. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42 Tahun 2007 petunjuk teknis DAK infrastruktur subbidang air minum menyebutkan bahwa untuk menjaga keberlanjutan program SPAM sederhana pasca pembangunan, maka perlu dibentuk lembaga di tingkat masyarakat sebagai penyelenggara SPAM.

Lain halnya untuk desa Wurun, sampai dengan bangunan SPAM selesai dibangun 100%, organisasi badan pengelola tersebut belum terbentuk. Hal ini menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi tidak beroperasionalnya sistem penyediaan air minum (SPAM) di desa Wurun.

Berdasarkan kondisi pada kedua desa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan badan pengelola merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan SPAM.

2. Tingkat kehadiran rapat pengelolaan SPAM, kemampuan membayar iuran dan besaran iuran operasional.

Tingkat kehadiran rapat SPAM desa Tarinsing lebih tinggi dibandingkan desa Wurun, ini merupakan modal sosial yang sangat baik di desa Tarinsing bagi kelanjutan pengelolaan SPAM. Pendapat masyarakat mengenai tingkat kehadiran rapat pengelolaan SPAM dan kemampuan membayar iuran yaitu tingkat kehadiran rapat untuk desa Tarinsing berpendapat selalu hadir sebanyak 35% dan sering hadir sebanyak 25%, hal ini mengartikan bahwa masyarakat desa Tarinsing mempunyai tingkat kehadiran rapat diatas 50%. Pendapat mengenai kemampuan membayar bervariasi dan yang paling

tertinggi untuk iuran Rp 20.000,- keatas hanya 30%, hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat desa Tarinsing belum mampu membayar iuran hasil musyawarah desa yaitu Rp 25.000/bulan.

Tetapi pendapat masyarakat desa Wurun tentang tingkat kehadiran rapat pengelolaan berpendapat tidak pernah hadir sebesar 56%, ini menggambarkan bahwa masyarakat tersebut kurang aktif untuk mengikuti rapat pengelolaan SPAM, dan pendapat mengenai kemampuan membayar iuran s/d Rp 5.000 sebanyak 36%, hal ini menggambarkan tingkat kemampuan membayar iuran bulan sangat rendah. Pendapat ini sangat dipengaruhi oleh belum beroperasionalnya bangunan SPAM yang di desa tersebut.

Adanya perbedaan pendapat antara kedua tersebut sangat dipengaruhi oleh beroperasional dan tidaknya bangunan SPAM. Gambaran neraca pada Tabel IV.15 adalah bahwa pendapatan hasil iuran, rincian pengeluaran dan saldo bulanan tergambar dengan rinci penggunaannya. Akan tetapi penggunaan anggaran tersebut atau pertanggungjawabannya perlu dilaksanakan *transparan* dan *akuntabel*, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola meningkat. Karena keterbukaan penggunaan anggaran erat kaitannya, dalam pembayaran iuran bulanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keaktifan mengikuti rapat pengelolaan, kemampuan membayar iuran dan pertanggungjawaban yang transparan mengenai anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan beroperasionalnya bangunan SPAM.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di desa Wuran dan Tarinsing Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pengelolaan SPAM pedesaan tersebut, antara lain :

1. Karakteristik Masyarakat :

Perbedaan karakteristik tingkat pendidikan, pendapatan, pengeluaran, umur, kepemilikan luas tanah dan kepemilikan luas bangunan pada masyarakat desa Wuran dengan desa Tarinsing yang akan sangat berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pasca pembangunan.

2. Bentuk Peran Serta Masyarakat :

Tahap perencanaan :

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ini sangat perlu, karena merupakan langkah awal dalam tahap berikutnya. Seperti dalam penentuan lokasi titik sumber air, lintasan jaringan pipa maupun penempatan hidran umum.

Tahap pelaksanaan :

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan ini tidak begitu perlu, karena pekerjaan tersebut dilaksanakan secara kontraktual hanya masyarakat dapat dilibatkan sebagai tenaga kerja sehingga menimbulkan rasa memiliki oleh masyarakat. Partisipasi dalam tahap ini tidak

mempunyai pengaruh yang *signifikan*, karena pembangunan dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor).

Tahap Operasional :

Partisipasi masyarakat dalam tahap operasional ini yang sangat perlu, karena dengan selesainya tahap pembangunan, maka hasil pembangunan tersebut akan diserahkan ke masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikelola. Untuk menjaga keberlanjutan operasionalnya SPAM ini, maka masyarakat harus membentuk badan pengelola. Kemudian badan pengelola menyusun peraturan-peraturan yang menyangkut tata kerja pengelolaan SPAM dan sistem pembiayaan. Operasionalnya SPAM ini sangat tergantung dari badan pengelola dan iuran bulanan masyarakat.

Sumber pembiayaan :

Pembiayaan dalam bentuk iuran masyarakat merupakan faktor utama untuk menunjang operasional sistem penyediaan air minum (SPAM) tersebut disamping mencari pembiayaan dari sumber lain seperti perusahaan batu bara yang ada disekitar desa tersebut. Besaran iuran bulanan perlu mempertimbangkan tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah pemakai air per kepala keluarga.

3. Aspek Teknis SPAM :

Penempatan lokasi SPAM baik bangunan mesin, jaringan pipa dan hidran umum harus sesuai dengan pertimbangan teknis yang disosialisasikan terhadap masyarakat.

Kesesuaian bangunan SPAM dengan kondisi topografi lokasi, sehingga bangunan SPAM dapat berfungsi dengan optimal.

Menjaga kelestarian lingkungan sehingga sumber air baku air minum tetap terjaga baik kualitas maupun kuantitas.

Perawatan bangunan SPAM mulai dari genset, pompa, jaringan pipa dan hidran umum merupakan tanggung jawab bersama masyarakat pengguna air.

Adanya perbedaan kontribusi yang sangat berbeda dari sesama masyarakat dan konflik kepentingan di dalam anggota masyarakat serta ketidakterbukaan pihak pemborong dan saudara Tiurlan selaku mitra kerja pemborong terhadap masyarakat Wurau mengenai pembangunan SPAM tersebut.

4. Manajemen Pengelolaan SPAM :

Badan Pengelola sistem penyediaan air minum (SPAM) yang mempunyai tugas utama dalam mengoperasikan dan memelihara segala peralatan bangunan SPAM, sehingga keberadaan badan pengelola merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan SPAM.

Keaktifan mengikuti rapat pengelolaan, kemampuan membayar iuran dan pertanggungjawaban yang transparan mengenai anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan beroperasionalnya bangunan SPAM.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai masukan bagi pihak yang terkait dengan sistem pengelolaan air minum (SPAM) pedesaan agar mencapai hasil secara optimal adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pembangunan peningkatan sosil ekonomi masyarakat disamping diadakan pembangunan fisik kepada masyarakat.
2. Perlunya partisipasi masyarakat khususnya dalam tahap perencanaan program SPAM yang menyangkut lokasi pembangunan SPAM baik sumber air baku, bangunan mesin, jaringan pipa dan hidran umum.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum diharapkan dapat melakukan kajian yang mendasar khususnya mengenai

pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan yang melibatkan seluruh *stakeholders* dalam teknis perencanaan, pelaksanaan dan operasional. Hal ini diperlukan agar pasca pembangunan SPAM dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Pemerintah lewat Dinas Pekerjaan Umum perlu membuat rencana manajemen pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) pedesaan dan pelatihan yang bertujuan untuk merencanakan suatu sistem pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) secara rinci, baik aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan serta bentuk peran serta masyarakat sehingga pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM). Hal ini untuk meningkatkan *capacity building* masyarakat penerima program sistem penyediaan air minum (SPAM).
5. Pembentukan badan pengelola sistem penyediaan air minum (SPAM) pada setiap penerima program SPAM pedesaan, kemudian menyiapkan peraturan-peraturan mengenai tata kerja operasional dan sumber pembiayaan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



JOSMAR LAMBOK BANJAR NAHOR, lahir di Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 19 Oktober 1971. Penulis merupakan anak ke-1 dari 9 bersaudara yang dilahirkan dari pasangan St.B.Banjar Nahor dan H.Lumban Gaol, yang keduanya masih sehat walafiat. Masa kecil penulis dihabiskan di kampung halaman sampai dengan SMA di Parsingguran Kecamatan Pollung Marbun Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara. Saat ini penulis tinggal di Jl. Patianom RT3 No. Perumnas Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Parsingguran pada Tahun 1984, SMP Negeri Pollung pada Tahun 1987 dan SMA Negeri Dolok Sanggul pada Tahun 1990. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin masuk tahun 1990 kemudian lulus tahun 1995. Sejak lulus dari tahun 1995 sampai 2006 bekerja pada PT Perentjana Djaja Jakarta sebagai Konsultan Supervisi Bidang Jalan dan Jembatan Proyek Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian pada tahun 2006 tercatat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Barito Timur dan ditempatkan sebagai staf Bidang Pembangunan. Tahun 2007 dan 2008 ditugaskan sebagai Bendahara Inspektorat Kabupaten Barito Timur. Pada Tahun 2009 mengikuti Diklat dan Sertifikasi Auditor Ahli di Pusbin JFA BPKP Ciawi-Bogor.

Bulan April 2008 hingga Pebruari 2010, penulis berkesempatan mengikuti Tugas Belajar pada Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Konsentrasi Perumahan dan Permukiman Sistem Modular Angkatan I Universitas Diponegoro Semarang dengan Beasiswa NUSSP-ADB-Departemen Pekerjaan Umum.

Saat ini penulis telah berumah tangga dengan pasangan hidup Isti Dr.Zarmiyeni, SP, MP dan telah dikaruniai dua orang anak putri yaitu Rifanny P. Banjar Nahor (8 tahun) dan Nayla P. Banjar Nahor (1 tahun 3 bulan).

DAFTAR PUSTAKA

Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pembaruan.

Ali Masduqi, Noor Endah, Eddy S. Soedjono, 2008, *Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan Berbasis Masyarakat: Studi Kasus HIPPAM di DAS Brantas Bagian Hilir* Seminar Nasional ITS.

A.Suryadi. 1983. *Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Penerbit PT. Alumni.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Bappeda Kabupaten Barito Timur. 2008. *Draf Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Timur 2004-2014*.

BAPPENAS. 2008. *Hambatan Perdagangan Antardaerah dan Dampak-nya terhadap Perekonomian Daerah*.

BPS Barito Timur. 2008. *Barito Timur Dalam Angka Tahun 2008*.

Budiharjo Eko, Joko Sujarto. 1998. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. Semarang Undip.

Budhy Prasadja. 1980. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, Jakarta: Penerbit Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Cetakan ke-1.

Chouguill,MB. *A letter of Community Participation for Underdevelopment Countries*, Habitat Intl, Vol.20 No.3 pp.431-444.

- Departemen Pekerjaan Umum Cipta Karya. 2007. *Kriteria, Prasyarat dan Kegiatan (Sesuai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM dan RKP 2007)*.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2006. *Pemetaan Kinerja Pemda Dalam Rangka Penyelenggaraan SPAM Demi Kinerja Kelembagaan Yang Lebih Optimal*.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2003. *Implementasi Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Percik*.
- Departemen Pekerjaan Umum Cipta Karya. 2009. *Pemerintah berkomitmen Sediakan Air Minum untuk MBR*.
- Desrizal, Hari Kusnanto. 2006. *Peran serta masyarakat dalam program water dan sanitation for low income communities 2 di Pasaman, KMPK Yogyakarta*.
- Dyah Purbandari Mulat Utami. 2008. *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Kontigensi pada pembangunan jalan lingkungan, Pratesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana MPWK Undip, Semarang*.
- Elmi Kurniarto W. 2007. *Konsep Keberlanjutan dalam Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi kasus Pembangunan prasarana air bersih pedesaan di Kel.Alastuo Kec.Poncol Kabupaten Magetan)*, Pratesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana MPWK Undip, Semarang.
- Ginandjar Kartasasmita. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat, Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur Surabaya.

Ignatius D.A. et.al *Pengembangan Sistem Pengolahan Air Bersih di daerah marjinal pasca gempa tsunami di propinsi Nangroe Aceh Darussalam.*

Ira Marina, Mardwi Rahdriawan. 2005. *Tata Loka Jurnal Ilmiah Perencanaan Wilayah dan Kota.*

Kodoatie. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar.

Kwik Kian Gie. 2002. *Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman*, Studium General ITB.

M Baiquni dan Susilawardani. 2002. *Pembangunan yang tidak berkelanjutan.* Transmedia Global Wacana.

Natsir Basuki. 2009. *Pembinaan Teknis Penyediaan Air Minum*, Dinas Perumahan dan Prasarana Wilayah Prop.DI Jogjakarta.

Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian.*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Ndara, Taliziduhu. 1983. *Partisipasi Dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.

Nieras, RM et.al.2002. *Making Participatory in Local Governance Happen*, Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, United Kingdom.

Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan di Indonesia. Pokja AMPL edisi I, April 2008.

Percik. 2003. *Lahirkan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.*

- Prabatmojo Hastu. *Wilayah Pedesaan Berkelanjutan: Suatu Eksplorasi Teoritis*, 2006. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Purnomo Agus B. 2009. *Teknik Kuantitatif untuk Arsitek dan Perancangan Kota*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ridja Sudirja. *Pengelolaan Air Bersih berbasis Masyarakat: Tinjauan Perspektif Legal*.
- Riduwan. 2002. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Riduwan. 2009. *Metode dan Teknis Menyusunan Tesis*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rukmana, Nana et.al, 1993 *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Santoso, Singgih. 2001. *SPSS Versi 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sastropetro, RA Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Displin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Schubeler, Peter. 1996. *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*. Washington, DC: The World Bank.
- Slamet, 1993. *Pembangunan Masyarakat berwawasan peran serta*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sigit Setio Pramono. *Pendekatan Sistem(Sistem Approach) pada Pengelolaan Air Bersih di Indonesia*.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Sitiumajah Masjkuri. 2007. *Perbaikan Kampung Komprehensif dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial serta Kemandirian Masyarakat Miskin Kampung Kumuh di Kota Surabaya*, Disertasi Doktor Pascasarjana ITS Surabaya.
- Soetrisno R. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Philosophy Press.
- Sunaji Zamroni. 2008. *Disorientasi kebijakan Publik di Indonesia*, IRE Yogyakarta.
- Sutrisno Loekman. 1995: 26. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Sugiarto, et. Al. 2001. *Teknik Sampling*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suparto Edi Sucahyo. 2002. *Analisa Struktur Tarif Air Minum dalam rangka Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih Kota Magelang*, Pratesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Magister Teknik Pemba-ngunan Kota, Universitas Diponegoro Semarang.
- USAID, Local Governance Support Program. 2009. *Peningkatan Pelayanan Lingkungan Kerjasama PDAM "Tirta Lihou" dengan Operator Non-PDAM dalam Peningkatan Manajemen Pelayanan Air Minum di Simalungun*.
- Warpani,Suwardjoko. 1984. *Analisis kota dan daerah*, Bandung: Penerbit ITB.

Wahyu Mardiansyah. 2008 . *Pengukuran Kualitas Pelayanan PDAM Kota Bekasi berdasarkan Kepuasan Pelanggan.*